



LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2019



KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR



Tahun 2019 adalah tahun akhir pelaksanaan pembangunan pertanian sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Periode 2015-2019. Kementerian Pertanian pada periode 2015-2019 telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu: (1) Meningkatnya pendapatan keluarga petani; (2) Meningkatnya ketahanan pangan nasional; (3) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional; (4) Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional; (5) Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional; (6) Stabilitasnya harga komoditas pertanian strategis; (7) Dimanfaatkannya inovasi teknologi; (8) Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan; (9) Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan; (10) Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di perdesaan; (11) Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional; dan (12) Terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pencapaian ke-12 sasaran strategis pada tahun 2019 telah diupayakan melalui implementasi Program Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (2) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura; (3) Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; (4) Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (6) Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan; (7) Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian; (8) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; (9) Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati; (10) Pendidikan Pertanian; (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; dan (12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja selama tahun 2019 harus dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu, Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2019 ini disusun.

Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2019 ini adalah bukti konkret bentuk pertanggungjawaban Kementerian Pertanian kepada publik dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Buku ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas Kementerian Pertanian di hadapan publik.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2019 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Berbagai keberhasilan pembangunan pertanian yang dipaparkan pada buku ini bukan berarti dilalui tanpa aral. Masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Besar harapan kami Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2019 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat memberikan manfaat, terutama dapat menjadi umpan balik (*feedback*) bagi proses perencanaan selanjutnya. Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Jakarta, Februari 2020

Menteri Pertanian,

SYAHRUL YASIN LIMPO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Pertanian terhadap Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, diperlukan laporan tertulis yang baik, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakin) Kementerian Pertanian Tahun 2019. Lakin Kementerian Pertanian Tahun 2019 ini juga disusun sebagai bentuk kepatuhan Kementerian Pertanian terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakin ini berisi laporan pencapaian kinerja tahun 2019, baik keberhasilan yang diraih maupun kekurangan yang perlu perbaikan ke depan, serta menyajikan perkembangan kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Lakin ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian juga sangat menentukan dalam menghasilkan Lakin yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakin ini diharapkan dapat menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, khususnya terkait dengan kedaulatan pangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 18 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagian besar atau 12 IKSS mencapai kategori sangat berhasil dengan nilai capaian kinerja $> 100\%$, sedangkan selebihnya terdiri dari 5 (lima) IKSS masuk kategori berhasil dengan capaian keberhasilan 80-100%, dan 1 (satu) IKSS belum memiliki capaian, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian; (2) Indeks Ketahanan Pangan; (3) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional; (4) Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian; (5) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia; (6) Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor; (7) Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional; (8) Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir); (9) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan; (10) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan; (11) Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam; dan (12) Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional.

Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional; (2) Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional; (3) Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen); (4) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis; dan (5) Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional

Indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian, karena sampai dengan bulan Februari 2019 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB. Walaupun evaluasi telah dilakukan dan *exit meeting* secara resmi berlangsung pada tanggal 21 Januari 2020.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2018, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN sebesar Rp21.831.606.427.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 12 (dua belas) program. Realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai Rp19.424.318.074.575,- atau 88,97%.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar gambar	viii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	4
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian	5
D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJAKEMENTERIAN PERTANIAN.....	8
A. Rencana Strategis 2015-2019	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.....	16
A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2019.....	16
Sasaran Strategis 1 (SS 1) MENINGKATNYA PENDAPATAN KELUARGA PETANI	22
Sasaran Strategis 2 (SS 2) MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN NASIONAL.....	25
Sasaran Strategis 3 (SS 3) MENINGKATNYA NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN NASIONAL	27
Sasaran Strategis 4 (SS 4) TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN STRATEGIS NASIONAL	37
Sasaran Strategis 5 (SS 5) TERJAMINNYA KUALITAS DAN KEAMANAN PANGAN STRATEGIS NASIONAL.....	59
Sasaran Strategis 6 (SS 6) STABILNYA HARGA KOMODITAS PERTANIAN STRATEGIS	63
Sasaran Strategis 7 (SS 7) DIMANFAATKANNYA INOVASI TEKNOLOGI.....	67
Sasaran Strategis 8 (SS 8) TERSEDIAINYA INFRASTRUKTUR PERTANIAN YANG SESUAI KEBUTUHAN.....	72
Sasaran Strategis 9 (SS 9) RASIO SERANGAN OPT DAN DPI TERHADAP LUAS TANAM.....	89
Sasaran Strategis 10 (SS 10) MENINGKATNYA PENERAPAN PENGELOLAAN PERTANIAN TERPADU DI PEDESAAN	94
Sasaran Strategis 11 (SS 11) MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN PETANI NASIONAL.....	100

Sasaran Strategis 12 (SS 12) TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN	104
B. Capaian Kinerja Lainnya	110
C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian	117
BAB IV PENUTUP	120
LAMPIRAN.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019	10
Tabel 2.	Indikator Kinerja dan Target 2018-2019	11
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2019	15
Tabel 4.	Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2019	18
Tabel 5.	Pengukuran Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian Tahun 2019	21
Tabel 6.	Jumlah PDB dan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2015-2019	24
Tabel 7.	Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2015-2019	25
Tabel 8.	Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Negara di Asia Tenggara	26
Tabel 9.	Perkembangan Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Komoditas Pangan Strategis Tahun 2016-2019	26
Tabel 10.	Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2015-2019.....	29
Tabel 11.	Perkembangan Volume Impor Komoditas Pertanian Tahun 2015-2019	33
Tabel 12.	Perkembangan Capaian Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian Tahun 2015-2019	36
Tabel 13.	Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis Nasional Tahun 2019	38
Tabel 14.	Produksi Komoditas Pangan Strategis Nasional Tahun 2015-2019.....	39
Tabel 15.	Luas Tanam Padi Tahun 2015-2019	43
Tabel 16.	Luas Tanam Jagung Tahun 2015-2019.....	46
Tabel 17.	Luas Tanam Kedelai Tahun 2015-2019.....	48
Tabel 18.	Perkembangan Harga Pangan Pokok dan Strategis Tingkat Konsumen Tahun 2015-2019	65
Tabel 19.	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dan Didesiminasiikan Selama 5 Tahun	68
Tabel 20.	Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Alsintan Pra dan Pasca Panen Tahun 2017-2019	78
Tabel 21.	Rincian Alsintan yang Tersedia Tahun 2015-2019	81
Tabel 22.	Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2019.....	90
Tabel 23.	Perkembangan Wilayah yang Terbebas Penyakit Menular Strategis Tahun 2015- 2019.....	93
Tabel 24.	Jumlah Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Tahun 2019	96
Tabel 25.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani pada Tahun 2019	102
Tabel 26.	Perkembangan Hasil PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2016 - 2019	106
Tabel 27.	Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2014-2019	117

Tabel 28.	Dukungan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian pertanian tahun 2019	118
-----------	--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Visi dan Misi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.....	9
Gambar 2.	Peta Strategi Kementerian Pertanian 2015-2019	11
Gambar 3.	Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2019	20
Gambar 4.	Perkembangan Pendapatan Petani Tahun 2015-2019	23
Gambar 5.	Sinergitas Kementerian Pertanian dengan <i>Stakeholder</i> terkait dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi Pangan	40
Gambar 6.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2015-2019	42
Gambar 7.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2015-2019	45
Gambar 8.	Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Kedelai Tahun 2015-2019	47
Gambar 9.	Produksi Cabai (Ton) Tahun 2015 – 2019	50
Gambar 10.	Pengaturan Pola Tanam Cabai dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis.....	51
Gambar 11.	Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2015 – 2019	52
Gambar 12.	Perkembangan Produksi, Luas Areal, dan Produksi Gula Tebu Tahun 2015-2019	54
Gambar 13.	Kebun Benih Datar di Gorontalo	55
Gambar 14.	Perkembangan Produksi Daging Sapi Kerbau Tahun 2015-2019	56
Gambar 15.	Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2015-2019 (Ribu Ekor)	56
Gambar 16.	Mentan Gelar Operasi Pasar Murah Cabai di Surakarta	66
Gambar 17.	Inpari 42 agritan GSR dan Inpari 43 agritan GSR.....	69
Gambar 18.	Jagung Hibrida NASA 29.....	70
Gambar 19.	Kedelai Biosoy 1 dan 2	70
Gambar 20.	TSS bawang Merah Agrihort 1 dan 2.....	71
Gambar 21.	Kegiatan RJIT Tahun 2019	74
Gambar 22.	Kegiatan RJIT di Provinsi Sumatera Utara, Penerima Manfaat P3A Tirta Sari, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 300 Ha.....	75
Gambar 23.	Capaian Kegiatan dan Target RJIT Periode TA. 2015-2019	75
Gambar 24.	Capaian Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Terhadap Total Irigasi Tersier yang Dibutuhkan 2015-2019	76
Gambar 25.	Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Tahun 2015-2019	79

Gambar 26.	Pemberian Bantuan Alsintan Traktor Roda 2 kepada Poktan Tana Tanre Kabupaten Bone, Prov. Sulawesi Selatan dan Pompa Air kepada Brigade, Kabupaten Bone, Prov. Sulawesi Selatan	80
Gambar 27.	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Luas Baku Lahan Tahun 2018-2019	85
Gambar 28.	Kegiatan Perluasan Sawah di Prov. Aceh, Penerima Manfaat Poktan Semangat Meugo, Ds. Sumber Harapan, Kec. Cot Glie, Kab. Merauke Seluas 14,8 Ha.....	86
Gambar 29.	Kondisi Lahan Rawa Sebelum dan Setelah Dikelola	87
Gambar 30.	Pekerjaan Normalisasi Saluran di Desa Lembang, Kecamatan Belawa, Kab. Wajo seluas 626 Ha.....	88
Gambar 31.	Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Tahun 2018-2019	88
Gambar 32.	Alur Pelaksanaan Sekolah Lapangan	97
Gambar 33.	Alur Pelaksanaan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita	99
Gambar 34.	Perkembangan Rasio Kelembagaan Petani Nasional yang Meningkatkan Kapasitasnya Tahun 2016-2019	100
Gambar 35.	Komponen Penilaian RB Kementerian/Lembaga	103
Gambar 36.	Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2016-2019.....	104
Gambar 37.	Menteri Pertanian Menerima Penghargaan K/L Anti Gratifikasi Terbaik dari KPK.....	105
Gambar 38.	Menteri Pertanian menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019	110
Gambar 39.	Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian 2006-2018	111
Gambar 40.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menerima Anugerah Parahita Ekapraya.....	112
Gambar 41.	Sekretaris Itjen, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Perwakilan 5 UPT Penerima Penghargaan ZI WBK/WBBM Tahun 2019.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah menyelesaikan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019), dan masuk pada tahap ke-4 pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Tujuan pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJMN adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai upaya konkret pelaksanaan pembangunan pada tahap ke-1 RPJMN (2005-2009) dan RPJMN ke-2 (2010-2014) telah dilakukan dan memberikan hasil yang membawa perubahan.

Sebagai bentuk keberlanjutan dari tahap sebelumnya, maka pelaksanaan pembangunan pada tahap akhir RPJMN 2015-2019 ini lebih difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Hal tersebut menjadi landasan bagi Kementerian Pertanian untuk berkontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan nasional masa mendatang.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan, kebutuhan akan pangan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang menjadi sangat fundamental. Ketersediaan pangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan suatu bangsa. Suatu negara dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik apabila mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi suatu bangsa (tidak terkecuali Indonesia) untuk dapat membangun sektor lainnya. Apabila kebutuhan masyarakat yang paling mendasar ini belum terpenuhi, maka akan sangat mudah terjadi kerawanan sosial, dan negara mudah ditekan oleh kekuatan luar karena ketergantungannya terhadap pangan.

Sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden yang telah tertuang dalam Visi, Misi dan Rencana Aksi, sasaran pembangunan pertanian adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dimana seluruh kebutuhan pangan pokok diupayakan secara optimal untuk dicukupi dari produksi dalam negeri. Amanah dari sasaran pembangunan pertanian tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian pada saat menyusun Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Kebijakan pembangunan pertanian ditetapkan dengan memperhatikan tujuan nasional dalam mencapai kedaulatan pangan dan

peningkatan agroindustri yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 4 (empat) Kebijakan Pembangunan Pertanian, yaitu: (1) melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian; (2) melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan; (3) membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional; dan (4) memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian. Selain empat kebijakan utama, terdapat 9 (sembilan) strategi pendukung, yaitu: (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Pertanian; (2) Peningkatan dukungan perkarantina; (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi; (4) Pelayanan informasi publik; (5) Pengelolaan regulasi; (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; (7) Pengelolaan perencanaan; (8) Penataan dan penguatan organisasi; dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak lepas dari kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian yang memfokuskan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan domestik seperti pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Dalam rangka membangun sektor pertanian perlu dilihat berbagai permasalahan yang ada, salah satunya indikator makro kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data BPS pada tahun 2012-2016 kontribusi sektor pertanian terhadap PDB stagnan di angka rata-rata 13,40%. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB memberikan informasi penting terhadap aspek lain seperti kontribusi peningkatan produksi pangan, penyerapan tenaga kerja dan tingkat pendapatan petani. Pada awal masa kerja Kabinet 2015 – 2019, telah diidentifikasi pula permasalahan lain di sektor pertanian terutama pada aspek mikro, seperti: keterbatasan luas baku lahan untuk setiap komoditas, terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih unggul, perubahan iklim, bencana alam, serangan hama dan penyakit, masih kurangnya populasi ternak, masih terbatasnya kapasitas kelembagaan petani, makin berkurangnya tenaga kerja pertanian, terbatasnya modal petani, kondisi perekonomian global yang melemah, gejolak harga pangan global, peningkatan jumlah penduduk, distribusi pangan yang belum bisa merata, serta panjangnya rantai tata niaga komoditas pertanian. Semua permasalahan pembangunan pertanian Indonesia seperti telah diuraikan, menjadi fokus pemerintah dan telah ditangani melalui penetapan berbagai kebijakan dan program sejak tahun 2018.

Pada tahun 2019 Kementerian Pertanian telah menetapkan target kinerja yang ingin dicapai, yaitu: (1) meningkatnya pendapatan keluarga petani, (2) meningkatnya ketahanan pangan nasional, (3) meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, (4) terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional, (5) terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional, (6) stabilnya harga komoditas pertanian strategis, (7) dimanfaatkannya inovasi teknologi, (8) tersedianya infrastruktur pertanian sesuai kebutuhan, (9) terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan, (10) meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di perdesaan, (11) meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional, serta (12) terwujudnya reformasi

birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan menjabarkan isu strategis, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kegiatan prioritas, meliputi: (1) optimalisasi pemanfaatan lahan tadah hujan (*rainfed field*), pasang surut, dan rawa lebak sebagai upaya peningkatan indeks Pertanaman (IP) 1 menjadi IP 2 atau IP 3 didukung pengembangan infrastruktur sumber-sumber air, (2) pengembangan pertanian di wilayah perbatasan berorientasi ekspor, (3) pengembangan pertanian organik, (4) percepatan peningkatan populasi ternak sapi melalui upaya khusus Sapi Indukan Wajib Bunting, (5) hilirisasi produk pertanian, dan (6) stabilisasi harga dan penguatan pasar.

Melalui berbagai upaya pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, terbukti telah memberikan dampak yang sangat positif, antara lain: (1) produksi jagung meningkat 4,3% dari tahun 2018 sebesar 21,65 juta ton menjadi 22,59 juta ton pada tahun 2019, (2) produksi cabai naik 1,19% dari tahun 2018 menjadi 2,57 juta ton pada tahun 2019, (3) produksi bawang merah naik 4,59% dari tahun 2018 menjadi 1,57 juta ton pada tahun 2019, (4) produksi gula tebu naik 2,42% dari tahun 2018 sebesar 2,17 juta ton menjadi 2,23 juta ton tahun 2019, (5) Pertumbuhan volume ekspor sebesar 17,57% dan penurunan volume impor sebesar 5,85% untuk produk pertanian nasional sebesar dibanding tahun 2018, (6) Stabilitasnya harga komoditas pertanian strategis, dengan CV 7,85, (7) Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sebesar 30%, naik 9% dibanding tahun 2018 sebesar 27,5%, (8) Nilai Tukar Petani (NTP) nasional naik 0,71% (102,28 pada tahun 2018 menjadi 103,01 tahun 2019), (9) Nilai Tukar Usaha Pertanian Nasional naik 0,54% (111,56 tahun 2018 menjadi 112,17 tahun 2019), dan (10) Jumlah penduduk miskin di desa turun 3,95% (15,54 juta jiwa tahun 2018 menjadi 14,93 juta jiwa tahun 2019).

Selain capaian produksi dan capaian dari beberapa indikator makro, Kementerian Pertanian telah memperoleh beberapa penghargaan selama tahun 2019, di antaranya: (1) Hasil penilaian *Global Food Security Index* menyatakan bahwa peringkat Ketahanan Pangan Indonesia naik dari peringkat 65 menjadi peringkat 62, (2) Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif, (3) Penghargaan Instansi dengan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (4) Kementerian Terbaik dalam Pencegahan dan Pengelolaan Gratifikasi, (5) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 (tiga) tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, (6) Penghargaan TOP Digital Implementation, (7) Penghargaan Akreditasi Arsip Kategori AA (Terbaik), (8) Anugerah Parahita Ekapraya, dan (9) Penghargaan *Recognition of Excellence*, dan (10) Penghargaan WBK/WBBM yang diraih oleh 5 (lima) UPT.

Meskipun kinerja sektor pertanian sudah memperlihatkan hasil yang menggembarakan di tahun 2019, namun diakui masih ada target-target yang memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Untuk itu, Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Kinerja sektor pertanian tidak sepenuhnya tergantung pada lingkup Kementerian Pertanian semata, tetapi ada pihak lain yang memiliki peran untuk berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dioptimalkan

koordinasi antar K/L, seperti: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, TNI-AD, Kepolisian Republik Indonesia, BULOG, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dunia usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan bank, serta peran aktif petani, pekebun, dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Kerjasama dan sinergitas seluruh pihak pelaku pembangunan pertanian sangat diharapkan bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia.

Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian ini menyajikan hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di tahun 2019.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, ditetapkan bahwa Kementerian Pertanian terdiri atas 5 (lima) Direktorat Jenderal, 4 (empat) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 5 (lima) Staf Ahli Menteri. Berdasarkan Peraturan Presiden yang berlaku sebelumnya, Kementerian Pertanian terdiri atas Wakil Menteri Pertanian, 6 (enam) Direktorat Jenderal, 4 (empat) Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan 4 (empat) Staf Ahli Menteri.

Perpres No 45/2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah menetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Gambar struktur organisasi Kementerian Pertanian dapat dilihat pada **Lampiran 1**). Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- (3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung,

- kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
- (4) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
 - (5) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
 - (6) Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pementapan ketahanan pangan;
 - (7) Pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
 - (8) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - (9) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - (10) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
 - (11) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja menetapkan Susunan Unit Organisasi Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian, terdiri atas:

- (1) Sekretariat Jenderal;
- (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- (3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- (4) Direktorat Jenderal Hortikultura;
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan;
- (6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (7) Inspektorat Jenderal;
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- (9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- (10) Badan Ketahanan Pangan;
- (11) Badan Karantina Pertanian;
- (12) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
- (13) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
- (14) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
- (15) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian;
- (16) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian;
- (17) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
- (18) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
- (19) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan
- (20) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
- (3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.
- (4) Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.
- (6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
- (7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pertanian.
- (9) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- (10) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pematapan ketahanan pangan.
- (11) Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.
- (12) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang tugasnya.
 - a) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang bio industri;
 - b) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional;
 - c) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang investasi pertanian;
 - d) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang lingkungan pertanian; dan

- e) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai dengan bidang infrastruktur pertanian.
- (13) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.
- (14) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
- (15) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
- (16) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

D. Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsi pada tahun 2019 didukung oleh 17.962 orang yang tersebar di 11 Unit Kerja Eselon I termasuk 159 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Klasifikasi pegawai Kementerian Pertanian terdiri dari Golongan I sebanyak 276 orang, golongan II sebanyak 3.764 orang, golongan III sebanyak 11.437 orang, dan golongan IV sebanyak 2.485 orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikan dirinci sebagai berikut: S3 sebanyak 737 orang, S2 sebanyak 4.211 orang, S1/D4 sebanyak 5.798 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1 sebanyak 1.617 orang, SLTA sebanyak 4.911 orang, serta SLTP/SD sebanyak 688 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 18.131 orang, maka jumlah pegawai tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 169 orang atau 0,93%. Penurunan jumlah pegawai disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun (purna tugas).

Selain didukung oleh pegawai PNS, keberhasilan program pembangunan pertanian juga mendapat dukungan dari pegawai non PNS di lapangan, yaitu Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB-PP) sebanyak 12.135 orang, penyuluh swadaya sebanyak 25.852 orang, penyuluh swasta sebanyak 100 orang, THL Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) sebanyak 1.151 orang, dan Inseminator IB sebanyak 5.912 orang. Jumlah pegawai Kementerian Pertanian tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Rencana Strategis 2015-2019

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Renstra Kementan) periode 2015-2019. Renstra Kementerian Pertanian yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016, mengalami revisi yaitu melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2018. Revisi Renstra dilakukan karena ada kebutuhan perubahan kebijakan untuk tetap mengacu pada Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 tersebut, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-3 (2015-2019) Bidang Pangan dan Pertanian dan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045.

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian, Renstra Kementerian Pertanian berfokus pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri untuk penguatan ketahanan pangan menuju tercapainya kedaulatan pangan. Fokus lainnya adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian melalui peningkatan agroindustri agar memiliki keunggulan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku pada 31 Desember 2015. Selaras dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian 2015 sampai 2019 juga mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*). Dengan perubahan paradigma tersebut, sektor pertanian tidak lagi hanya diposisikan sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, tetapi juga sebagai sektor yang memiliki fungsi strategis lainnya dalam pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan fokus kedua RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian, yaitu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, yang dapat meningkatkan pangsa ekspor dan membendung masuknya komoditas impor dari negara-negara lain sehingga dapat berkontribusi memperkuat ekonomi nasional. Dalam Renstra, keselarasan kedua hal tersebut secara eksplisit terurai dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pertanian.

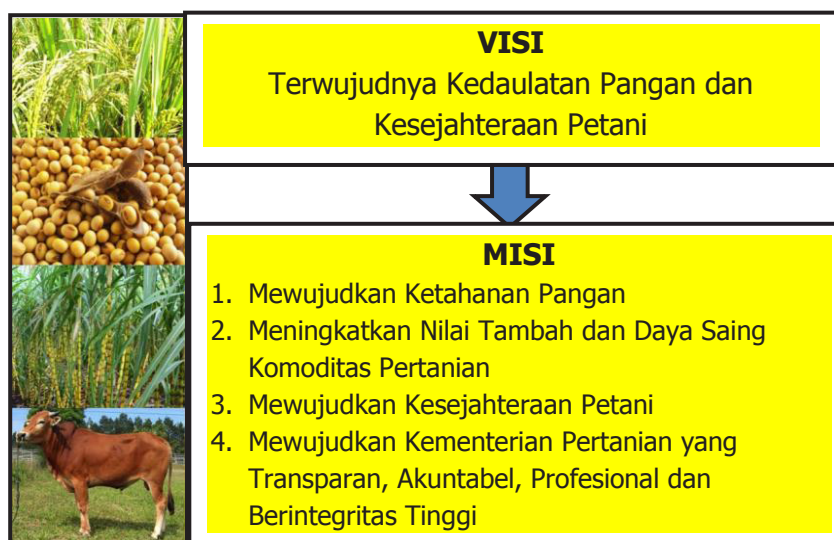
Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang dijadikan panduan pelaksanaan pembangunan pertanian selama lima tahun (2015-2019). Renstra Kementerian Pertanian digunakan sebagai acuan dan arahan bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2015-2019 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/sub sektor terkait.

Seperti telah diuraikan, bahwa Renstra Kementerian Pertanian telah mengalami revisi sebanyak dua kali. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan dan organisasi yang tujuannya untuk meningkatkan capaian pembangunan pertanian melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.

Sasaran Strategis (SS) dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 mengalami perubahan. Pada Renstra Awal terdapat enam SS, pada Renstra Revisi I terdapat sebelas SS, serta pada Renstra Revisi II terdapat dua belas SS.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 juga mengalami perubahan. Pada Renstra Awal terdapat tiga puluh dua IKSS, pada Renstra Revisi I terdapat dua puluh delapan IKSS, serta pada Renstra Revisi II terdapat delapan belas IKSS.

Pada Gambar 1 dan Tabel 1 disajikan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 Revisi II.



Gambar 1. Visi dan Misi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

VISI DAN MISI			
TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	
1	Terwujudnya kemandirian pangan nasional	1	Indeks Ketahanan Pangan (<i>The Global Food Security Index</i>)
2	Terwujudnya pengelolaan pertanian terpadu berkelanjutan	2	Rasio desa yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total desa di Indonesia
3	Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi	3	Pertumbuhan indeks keunggulan komparatif andalan ekspor pertanian
4	Meningkatnya kesejahteraan petani	4	PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian
5	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian	5	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 (Revisi II)

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 4 (empat) Kebijakan Membangun Pertanian sebagai berikut:

1. Melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya pertanian;
2. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan;
3. Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional; dan
4. Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian.

Berdasarkan keempat kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan;
2. Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit;
3. Mendorong penguatan kelembagaan petani;
4. Memperkuat kelembagaan penyuluhan;
5. Mengembangkan dan mendorong pembiayaan pertanian;
6. Memperkuat jaringan pasar produk pertanian;
7. Melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman;
8. Mendorong upaya perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian;
9. Meningkatkan dukungan dan pemanfaatan inovasi teknologi;
10. Koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penguatan kelembagaan pangan;
11. Penataan dan penguatan organisasi, dan
12. Pengelolaan sistem pengawasan.

Seluruh kebijakan dan langkah strategis dijalankan secara berkesinambungan selama periode 2015-2019. Untuk mengukur pencapaian pelaksanaan strategi atas visi, misi, dan tujuan pembangunan pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Strategi Kementerian Pertanian 2015-2019

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Penyusunan dan penentuan sasaran strategis ini menggunakan metode *Balance Scorecard* (BSC) dengan pendekatan empat perspektif, yaitu: *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam periode 2018-2019 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Kinerja dan Target 2018-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SATUAN	Target		
			2018	2019	
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE					
SS.1	Meningkatnya pendapatan keluarga petani	1. PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian	Rp Juta	26,9	27
SS.2	Meningkatnya ketahanan pangan nasional	2. Indeks Ketahanan Pangan (<i>The Global Food Security Index</i>)	Ranking	69	68
CUSTOMER PERSPECTIVE					
SS.3	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	3. Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional	%	8,97	10,52
		4. Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional	%	5,02	6,61

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	SATUAN	Target		
				2018	2019	
		5.	Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian	%	0,1	0,1
SS.4	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional	6.	Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional	%	5,9	7,9
SS.5	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	7.	Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia	Jumlah	11	10
		8.	Rasio kasus komoditas pertanian impor diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor	%	40	40
SS.6	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis	9.	Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional	%	10-30	10-30
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS.7	Dimanfaatkannya inovasi teknologi	10.	Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (5 tahun terakhir) terhadap penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir)	%	60	70
SS.8	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan	11.	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	%	33	33
		12.	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen)	%	66,3	68,4
		13.	Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan (%)	%	97,67	96,83
SS.9	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	14.	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	%	11,05	11,05
		15.	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	79	80
SS.10	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	16.	Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional	%	10	15
SS.11	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	17.	Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional	%	27,5	30

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		SATUAN	Target	
					2018	2019
LEARN AND GROWTH						
SS.12	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan	18.	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Indeks	86,79	87,78

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 (Revisi II)

Indikator kinerja sebagaimana tersaji pada Tabel 2 merupakan indikator yang tertera pada Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 (Revisi II), dengan target sebanyak 18 indikator. Sebagai tindak lanjut, maka telah ditetapkan Permentan Nomor 43/Permentan/RC.020/11/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dengan indikator-indikator yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Komitmen Kementerian Pertanian untuk mengeksekusi strategi pembangunan pertanian pada tahun ke-5 pelaksanaan Renstra 2015-2019 diwujudkan melalui penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2019. Hal ini sejalan dengan amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai dengan Perpres No 29/2014 dan Permen PAN dan RB No 53/2014 tersebut, Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2019 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan standar kinerja, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian yang memuat tentang Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja (IK), serta Target Kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2019. Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan pada bulan Januari Tahun 2019, satu bulan setelah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan.

Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2019 dilaksanakan oleh 11 Eselon I teknis yang ada di lingkup Kementerian Pertanian melalui 12 (dua belas) Program Pembangunan Pertanian, yaitu:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian;
- 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian;
- 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- 4) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- 5) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;
- 6) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat;
- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian;
- 8) Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan;
- 9) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian;
- 10) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 11) Program Peningkatan Kualitas Pengkarantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati; dan
- 12) Program Pendidikan Pertanian.

Masing-masing program sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, menjadi tanggung jawab dari tiap unit Eselon I sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Ukuran kinerja Eselon I dalam menjalankan program terkait adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) dari unit kerja di bawahnya, Eselon II atau unit kerja mandiri. Kinerja Eselon-I bergantung pada hasil dari pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja di bawahnya. Dengan demikian, ukuran kinerja Eselon II atau unit kerja mandiri diperbolehkan untuk sekurang-kurangnya dalam bentuk indikator keluaran (*output*).

Kementerian Pertanian melakukan satu kali revisi Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2019 yaitu pada bulan Oktober dikarenakan terjadi perubahan anggaran, yang mengakibatkan pagu Kementerian Pertanian, Unit Kerja Eselon I, dan Unit Kerja Eselon II lingkup Kementerian Pertanian mengalami penyesuaian. Revisi juga dilakukan karena terjadi pergantian pimpinan Kementerian Pertanian.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pendapatan keluarga petani	1 PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian	27 (Rp Juta)
2	Meningkatnya ketahanan pangan nasional	1 Indeks Ketahanan Pangan	68 (Ranking)
3	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	1 Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional	10,52%
		2 Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional	6,61%
		3 Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian	0,1%
4	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional	1 Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional	7,90%
5	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	1 Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia	10 Kasus
		2 Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor	40%
6	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis	1 Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional	10-30 CV
7	Dimanfaatkannya inovasi teknologi	2 Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir)	70,00%
8	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan	1 Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33%
		2 Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen)	68,40%
		3 Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	96,83%
9	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	1 Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	11,05%
		2 Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	80%
10	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	1 Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional	15%
11	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	1 Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional	30%
12	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	1 Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	87,78(Nilai)

Sumber : Kementerian Pertanian, 2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2019

Untuk mengukur capaian kinerja, Kementerian Pertanian menggunakan metode *scoring* terhadap sasaran yang telah ditetapkan, yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%). Evaluasi dan analisis pencapaian Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2019 yang dilaporkan pada Laporan Kinerja ini menggunakan acuan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di bawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. *Lag indicator* adalah indikator yang pencapaiannya di luar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pimpinan Kementerian/Lembaga adalah *outcome/impact (lag indicator)*. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) Menteri hingga Eselon II harus menggunakan *lag indicator*. Pada Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pertanian Tahun 2019, seluruh indikator kinerja merupakan *lag indicator*.

Evaluasi kinerja Kementerian Pertanian tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2019 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun 2019. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Kementerian Pertanian sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 (Revisi II) memiliki 12 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 18 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui 2 jenis target yaitu *maximize target* dan *minimize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Sebaliknya, yang dimaksud dengan *minimize target* adalah apabila

hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target semakin kecil, maka semakin baik kinerjanya. Indikator kinerja yang termasuk dalam kategori *maximize target* adalah sebagai berikut: (1) PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja; (2) Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian nasional; (3) Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional; (4) Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor; (5) Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir); (6) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis; (7) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan; (8) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen); (9) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan; (10) Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional; (11) Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional; dan (12) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

Maximize target dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target atau dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator kinerja yang termasuk dalam kategori *minimize target* adalah sebagai berikut: (1) Indeks Ketahanan Pangan; (2) Penurunan volume impor produk pertanian nasional; (3) Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian; (4) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia; (5) Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional; dan (6) Rasio Serangan OPT dan DPI terhadap Luas Tanam. Kategori *minimize target* dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2019 selengkapnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Indikator Kementerian Pertanian Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Meningkatnya pendapatan keluarga petani	1 PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian (RP Juta)	27	32,61	120,78	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya ketahanan pangan nasional	2 Indeks Ketahanan Pangan (Peringkat)	68	62	109	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	3 Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional (%)	10,52	17,57	167,02	Sangat Berhasil
		4 Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional (%)	6,61	5,85	88,53	Berhasil
		5 Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian (%)	0,1	0,03	170	Sangat Berhasil
4	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional	6 Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional (%)	7,9	7,00	88,56	Berhasil
5	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	7 Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia (kasus)	10	0	200	Sangat Berhasil
		8 Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor (%)	40	53,85	134,62	Sangat Berhasil
6	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis	9 Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional	10-30	7,85	161	Sangat Berhasil
7	Dimanfaatkannya inovasi teknologi	10 Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir) (%)	70	92,73	132,47	Sangat Berhasil
8	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan	11 Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan (%)	33	37,89	114,82	Sangat Berhasil
		12 Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen) (%)	68,4	63,55	92,90	Berhasil
		13 Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan (%)	96,83	105,81	109,27	Sangat Berhasil
9	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	14 Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam (%)	11,05	5,3	151	Sangat Berhasil
		15 Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (%)	80	78,07	97,59	Berhasil
10	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	16 Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	15	15,64	104,30	Sangat Berhasil
11	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	17 Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	30	30	100	Berhasil
12	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	18 Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	87,78		Exit Meeting tgl 21 Januari 2020	-

Sumber : PK dan hasil Pengukuran Kinerja

Keterangan:

*) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sampai dengan pertengahan Februari 2020 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi AKIP Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel 4, dapat dikatakan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian berhasil. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan serta segenap jajaran Kementerian Pertanian dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2019.

Dari 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, sebagian besar indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil (12 indikator). Dari hasil evaluasi terdapat 5 (lima) indikator yang berhasil dan 1 (satu) indikator belum diketahui hasilnya.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian; (2) Indeks Ketahanan Pangan; (3) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional; (4) Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian; (5) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia; (6) Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor; (7) Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional; (8) Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir); (9) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan; (10) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan; (11) Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam; dan (12) Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional.

Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional, (2) Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional, (3) Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen), dan (4) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis; dan (5) Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional.

Indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian, karena sampai dengan bulan Februari 2019 belum diumumkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB.

Pada sisi lain, Kementerian Pertanian juga dinilai kinerja keuangannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai kinerja Kementerian Pertanian tahun 2019 sebesar 94,56% atau termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Capaian Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 2019
Sumber: Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017 (SMART), 2019

Persentase capaian kinerja anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2019 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 214/2017 di atas terdiri dua indikator, yaitu:

1. Persentase Capaian Sasaran Strategis adalah 100%.
2. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Eselon I adalah 89,11%.

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumber daya anggaran berdasarkan PMK 214/2017, maka dilakukan perhitungan Nilai Efisiensi (NE) dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut :

$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$ <p>Dimana :</p> <p>NE = Nilai Efisiensi</p> <p>E = Efisiensi</p>	<p>* Catatan :</p> <p>Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.</p>
---	--

Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian diperoleh dari rata-rata NE Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana terlihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Pengukuran Nilai Efisiensi Kementerian Pertanian Tahun 2019

No.	Unit Eselon I	Capaian Sasaran Program	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Rata-rata Nilai Kinerja Satker	Nilai Kinerja Unit Eselon I	NE
1	SEKRETARIAT JENDERAL	100.00	98.32	92.71	100.00	1.68	84.66	89.90	54.20
2	INSPEKTORAT JENDERAL	100.00	95.60	99.11	100.00	5.95	93.87	95.16	64.88
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	89.28	79.24	86.80	93.63	15.37	71.43	80.39	88.43
4	DITJEN HORTIKULTURA	100.00	90.83	84.07	96.01	5.40	73.01	83.85	63.50
5	DITJEN PERKEBUNAN	98.47	96.09	84.63	99.75	3.67	74.91	84.45	59.18
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	100.00	93.88	91.13	100.00	10.28	84.45	90.70	75.70
7	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	100.00	86.27	62.57	97.03	11.09	78.44	86.59	77.73
8	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	100.00	95.27	92.81	100.00	20.00	90.50	94.96	100.00
9	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	100.00	92.54	94.15	100.00	9.21	81.22	89.03	73.03
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	100.00	97.05	87.22	99.36	2.32	83.52	89.17	55.80
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN	100.00	99.18	98.75	100.00	11.34	94.19	96.01	78.35
RATA-RATA NILAI EFISIENSI									71.89

Sumber: Aplikasi SMART Kementerian Keuangan pertanggal 28 Februari 2020

Berdasarkan Tabel 5, nilai efisiensi sumber daya anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2019 mencapai 71,89. Hal tersebut memperlihatkan bahwa efisiensi anggaran di Kementerian Pertanian masih belum optimal, terutama bagi Eselon I yang nilainya masih berada di bawah rata-rata NE Kementerian Pertanian. Oleh karena itu pada tahun 2020 perlu upaya untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkup Kementerian Pertanian.

Belum optimalnya efisiensi anggaran di Kementerian Pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; a) Ketidaktepatan dalam rencana penarikan dana sesuai jadwal bulanan yang telah ditetapkan, b) Sering terjadinya revisi anggaran, dan c) Penarikan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

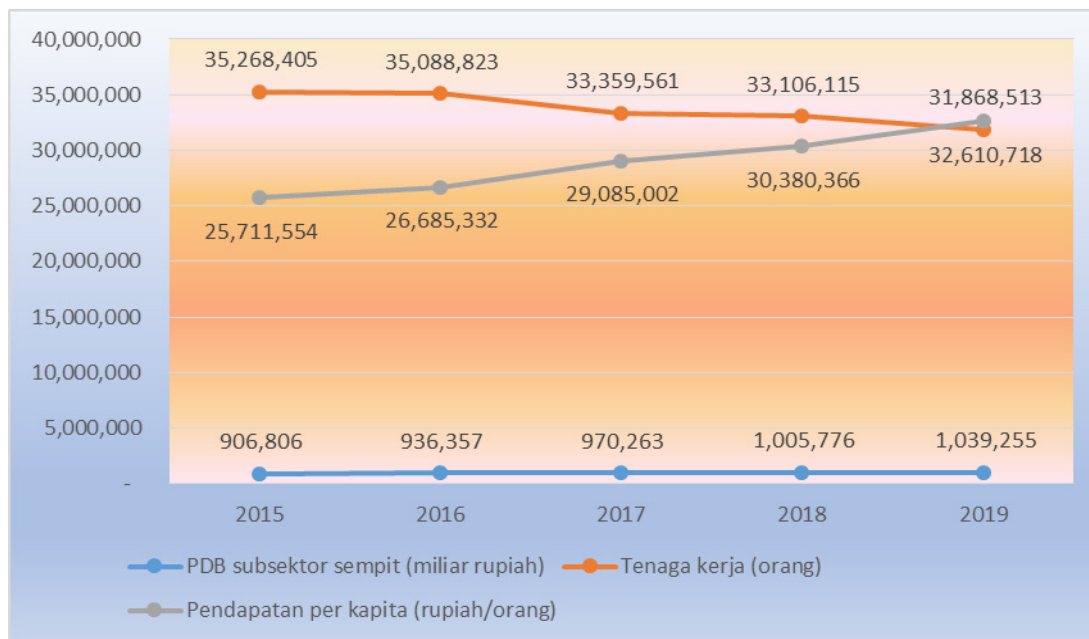
Upaya ke depan, rencana penarikan dana harus benar-benar dicermati dengan koordinasi antara pejabat/petugas di bagian yang menangani perencanaan anggaran, bagian evaluasi, dan bagian teknis.

Sasaran Strategis 1 (SS 1) MENINGKATNYA PENDAPATAN KELUARGA PETANI

Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang ingin dicapai dari pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dialokasikan untuk bekerja di bidang pertanian. Tingkat kesejahteraan petani salah satunya diukur melalui pendapatan per kapita petani, yaitu dengan membandingkan antara Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sempit dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian. Cakupan PDB yang masuk dalam sektor pertanian sempit adalah sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian serta perburuhan. Sasaran Strategis ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu PDB Pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian, sebagai berikut:

SS 1. IKU 1 PDB Pertanian Sempit per Jumlah Tenaga Kerja Pertanian	
Target Rp27 Juta/Orang/Kapita	Realisasi Rp32,61 Juta/Orang/Kapita
% Capaian 120,78% Sangat Berhasil	

Capaian indikator PDB Pertanian per jumlah tenaga kerja pertanian tahun 2019 sebesar Rp32,61 juta/orang/kapita atau 120,78% dari target Rp27 juta/orang/kapita, sehingga masuk kategori **sangat berhasil**. Capaian kinerja tahun 2019 ini mengalami peningkatan 7,34% dibanding capaian PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian tahun 2018 sebesar Rp30,38 juta/orang/kapita. Perkembangan pendapatan keluarga petani selama periode 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Perkembangan Pendapatan Petani Tahun 2015-2019

Gambar 4 memperlihatkan perkembangan pendapatan petani selama jangka waktu 2015 hingga 2019 yang menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, PDB pertanian sempit per total tenaga kerja sektor pertanian sebesar Rp25,71 juta/orang/tahun dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp32,61 juta/orang/tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan petani meningkat setiap tahunnya, dapat dikatakan pula bahwa kesejahteraan petani juga mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Untuk itu, kinerja yang sangat berhasil pada periode 2015-2019 ini harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada periode yang akan datang.

Peningkatan pendapatan petani dipengaruhi oleh peningkatan produksi komoditas pertanian dan kestabilan harga dari komoditas pertanian. Semakin tinggi produksi yang dihasilkan dan didukung dengan harga tinggi yang diterima petani, maka pendapatan petani akan semakin tinggi pula. Kementerian Pertanian juga turut menjaga kestabilan harga pangan melalui berbagai kebijakan seperti operasi pasar, serap gabah petani, dan pembatasan impor, sehingga petani mendapatkan harga jual yang layak. Perbandingan antara PDB sektor pertanian sempit dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian dalam mengukur capaian kinerja disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah PDB dan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
PDB subsektor sempit (miliar rupiah)	906.806	936.357	969.774	1.005.776 ^{*)}	1.039.255 ^{**)}
Tenaga kerja (orang)	35.268.405	35.088.823	33.359.561	33.106.115	31.868.513

Sumber: BPS diolah Pusdatin, 2019

Keterangan: Termasuk di dalam sektor pertanian sempit adalah sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan jasa pertanian serta perburuhan.

^{*)} Angka Sementara

^{**)} Angka Sangat Sementara

Produk Domestik Bruto sektor pertanian sempit mengalami peningkatan secara konsisten dari Rp906,81 Triliun tahun 2015 menjadi Rp1.039,25 Triliun pada tahun 2019. Sebaliknya trend jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan, dari 35,27 juta orang pada tahun 2015 menjadi 31,87 juta orang pada tahun 2019. Hal ini dimungkinkan karena adanya peningkatan penerapan teknologi pertanian seperti alsintan yang cukup signifikan di sektor pertanian. Meningkatnya penggunaan teknologi seperti alat mesin pertanian, menunjukkan perkembangan ke arah pertanian modern yang berdampak pada percepatan pengolahan lahan, dari manual ke penggunaan traktor, baik traktor roda-2, maupun traktor roda-4. Selain itu dari sisi pasca panen penggunaan alat pemanen, dari manual menggunakan ketam beralih ke penggunaan *combine harvester* menyebabkan pekerjaan lebih jauh lebih cepat, walaupun mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Diharapkan adanya pengurangan tenaga kerja tersebut dapat beralih ke tenaga kerja sektor industri berbahan baku pertanian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode pembangunan pertanian jangka menengah 2015-2019, pendapatan petani mengalami peningkatan dari waktu ke waktu seiring meningkatnya PDB sektor pertanian sempit. Meningkatnya PDB sektor pertanian dapat didorong dari meningkatnya komponen investasi di sektor pertanian dan penurunan komponen impor khususnya pangan.

Tercapainya sasaran strategis peningkatan pendapatan petani merupakan dampak atau *outcome* dari berbagai program/kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian target sukses lainnya, yaitu meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional, terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional, stabilnya harga komoditas pertanian strategis, dimanfaatkannya inovasi teknologi, tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan, terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan, meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di perdesaan, dan meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional.

Sasaran Strategis 2 (SS 2) MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Meningkatnya ketahanan pangan nasional salah satunya diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Pangan Nasional yang dikeluarkan oleh *The Economist Intelligence Unit (EIU)*.

SS 2. IKU 2	
Indeks Ketahanan Pangan Nasional	
Target Ranking 68	Realisasi Ranking 62 <i>(Minimize Target)</i>
% Capaian 109 % Sangat Berhasil	

Upaya Kementerian Pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan telah memberikan hasil positif. Dalam kajian yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit (EIU)*, *Global Food Security Index (GFSI)* atau Indeks Ketahanan Pangan, pada tahun 2019 Indonesia berada pada peringkat 62 dengan skor 62,6. Posisi ini meningkat dibandingkan posisi tahun 2018 yang berada di posisi ke-65.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, posisi Indonesia terus membaik. Berada pada peringkat 74 pada tahun 2015, meningkat menjadi peringkat 71 dengan skor 50,6 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indonesia berada pada peringkat 69 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi peringkat 65. Peningkatan ini terus terjadi hingga pada tahun 2019 dimana Indonesia mendapat peringkat ke-62. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2015-2019

Aspek	2015		2016		2017		2018		2019	
	Rangking	Skor	Rangking	Skor	Rangking	Skor	Rangking	Skor	Rangking	Skor
1. Overall	74	46,7	71	50,6	69	51,3	65	54,8	62	62,6
2. Availability	72	51,2	66	54,1	64	54,4	58	58,2	48	61,3
3. Affordability	74	44,3	70	50,3	68	50,8	63	55,2	58	70,4
4. Quality and Safety	88	40,1	87	42	86	44,1	84	44,5	84	47,1

Sumber: <http://foodsecurityindex.eiu.com>

Meningkatnya posisi dan indeks ketahanan pangan Indonesia ini merupakan dampak dari membaiknya posisi tiga pilar pembentuknya, yaitu pilar keterjangkauan (*affordability*), ketersediaan (*availability*), serta kualitas dan keamanan (*quality and safety*). Pada aspek keterjangkauan terhadap pangan, posisi Indonesia naik dari 63 pada tahun 2018 menjadi 58 pada tahun 2019. Pada aspek ketersediaan pangan, tidak hanya peringkat, tapi skornya juga mengalami peningkatan tajam. Pada tahun 2018 peringkat Indonesia 58, naik menjadi

peringkat 48 pada tahun 2019. Begitu juga skor ketersediaan pangan mengalami kenaikan yang sangat tajam, yaitu 3,1 poin, dari skor 58,2 menjadi skor 61,3. Pada aspek ketersediaan pangan, posisi Indonesia juga berada di atas Philipina (peringkat 64 dengan skor 61), Myanmar (peringkat 77 dengan skor 57), dan Kamboja (peringkat 90 dengan skor 49,4). Untuk indikator aspek kualitas dan keamanan pangan, Indonesia menduduki posisi 84, masih sama dengan tahun 2018.

Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Indonesia tahun 2019 ini sudah melampaui target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2019 yaitu peringkat 68 (109%). Berdasarkan capaian tersebut, kinerja ketahanan pangan Indonesia tahun 2019 sangat berhasil dan harus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang. Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Negara di Asia Tenggara selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Negara di Asia Tenggara

Global Rank	Regional Rank	Country	Overall Score	Affordability	Availability	Quality&Safety
1	1	Singapore	87.4	95.4	83.0	79.4
28	5	Malaysia	73.8	81.7	67.7	70.6
52	9	Thailand	65.1	77.1	58.7	52.6
54	11	Vietnam	64.6	75.1	59.7	51.7
62	12	Indonesia	62.6	70.4	61.3	47.1
64	13	Philippines	61.0	68.9	57.7	50.3
77	17	Myanmar	57.0	59.1	57.2	51.3
90	21	Cambodia	49.4	56.7	48.1	34.6
92	22	Laos	49.1	55.5	47.6	37.4

Sumber: *The Economist Intelligence Unit (EIU)*, 2019

Peningkatan posisi ketahanan pangan Indonesia tidak terlepas dari sinergi semua pihak dan upaya keras yang telah dilakukan oleh pemerintah yang diterjemahkan dalam bentuk program terobosan pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian dalam empat tahun terakhir ini.

Upaya Kementerian Pertanian dalam peningkatan produksi pangan strategis merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat. Kementerian Pertanian harus menjamin bahwa pangan strategis harus tersedia sesuai kebutuhan penduduk. Selama periode 2016-2019, ketersediaan pangan strategis dinilai cukup bahkan surplus, seperti terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perkembangan Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Komoditas Pangan Strategis Tahun 2016-2019

No	Komoditas	2016			2017			2018			2019		
		Ketersediaan	Kebutuhan	Rasio	Ketersediaan	Kebutuhan	Rasio	Ketersediaan	Kebutuhan	Rasio	Ketersediaan	Kebutuhan	Rasio
1	Beras	30.143.093	32.283.628	0,93	30.678.240	29.951.340	1,02	33.433.605	29.475.151	1,13	31.427.745	29.782.030	1,06
2	Jagung	3.607.238	4.570.218	0,79	5.186.965	5.446.649	0,95	6.816.132	5.505.128	1,24	6.803.262	5.562.444	1,22
3	Kedelai	3.066.043	2.724.553	1,13	3.162.136	2.754.687	1,15	4.270.988	3.140.881	1,36	3.063.224	2.428.898	1,26
4	Cabai	2.079.947	195.005	10,67	2.266.483	681.092	3,33	2.502.544	682.007	3,67	2.240.336	1.095.000	2,05
5	Bawang Merah	854.244	828.479	1,03	859.404	830.492	1,03	874.201	839.409	1,04	1.357.750	1.352.062	1,00
6	Gula	6.859.867	6.475.602	1,06	6.989.943	6.558.073	1,07	6.461.488	7.044.945	0,92	4.490.427	1.868.383	2,40
7	Daging	643.853	595.021	1,08	614.628	708.273	0,87	631.541	715.878	0,88	786.777	786.777	1,00
				2,384			1,346			1,463			1,428

Sumber: Badan Ketahanan Pangan, 2019

Selain pangan yang cukup, Kementerian Pertanian juga memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak ada kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia sepanjang tahun 2019.

Dari aspek keterjangkauan (*affordability*) Kementerian Pertanian juga melakukan terobosan program nyata lainnya terkait distribusi dan stabilisasi harga dengan memperpendek rantai pasok melalui program Toko Tani Indonesia (TTI), sehingga bahan pangan menjadi mudah untuk diakses dan harga di tingkat konsumen menjadi lebih terjangkau.

Toko Tani Indonesia merupakan bagian dari kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), yang pelaksanaannya pada tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.220/12/2018. Toko Tani Indonesia dibentuk dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya *Patron-Client* (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan *market power* oleh pelaku usaha tertentu.

Sasaran Strategis 3 (SS 3)

MENINGKATNYA NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING KOMODITAS PERTANIAN NASIONAL

Dalam era globalisasi saat ini, semua produk dan komoditas harus mampu bersaing, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar internasional. Beberapa komoditas pertanian telah memiliki posisi dan mampu bersaing di luar negeri, seperti komoditas perkebunan. Pada sisi lain, Kementerian Pertanian juga telah berupaya untuk menekan laju pertumbuhan impor melalui peningkatan produksi komoditas substitusi impor. Demikian pula dalam rangka mendukung akselerasi ekspor, Kementerian Pertanian melakukan sertifikasi kesehatan terhadap media pembawa ekspor.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tiga indikator, yaitu: (1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional, (2) Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional, dan (3) Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian.

SS 3. IKU 3 Pertumbuhan Volume Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional	
Target 10,52%	Realisasi 17,57%
% Capaian 167,02% Sangat Berhasil	

Volume ekspor produk pertanian utama terdiri dari volume ekspor 33 (tiga puluh tiga) komoditas dari empat subsektor yaitu, yaitu subsektor tanaman pangan (kacang tanah dan ubi jalar), subsektor hortikultura (mangga, nenas, manggis, salak, pisang, krisan, kentang, jamur, dan jahe), subsektor perkebunan (lada, pala, cengkeh, jambu mete, kopi, kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, teh, nilam, serai wangi, tembakau, vanili, dan gambir) dan subsektor peternakan (kambing hidup, domba hidup, babi hidup, daging ayam potong, telur tetas, anak ayam (*Day Old Chick – DOC*), serta obat hewan). Pertumbuhan volume ekspor diukur dalam nilai persentase dengan membandingkan jumlah pertumbuhan volume ekspor pertanian dengan jumlah komoditas ekspor pertanian atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{pertumbuhan volume ekspor pertanian}}{\sum \text{komoditas ekspor pertanian}} \right)$$

Dimana pertumbuhan volume ekspor pertanian dihitung dengan cara membandingkan peningkatan volume ekspor tahun berjalan dengan volume ekspor pertanian tahun sebelumnya atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\text{Volume ekspor pertanian tahun berjalan (t)} - \text{Volume ekspor pertanian tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Volume ekspor pertanian tahun sebelumnya (t-1)}} \right) \times 100\%$$

Target kinerja pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama tahun 2019 adalah sebesar 10,52%, dimana realisasinya mencapai 17,57%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 167,02%. Pertumbuhan volume ekspor produk pertanian utama dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Secara rinci volume ekspor untuk masing-masing produk pertanian utama dijabarkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perkembangan Ekspor Komoditas Pertanian Tahun 2015-2019

No	Komoditas	Volume Ekspor (Ton)					2019/2018	2018/2017	2017/2016	2016/2015
		2015	2016	2017	2018	2019				
1	Kacang Tanah	8,975.80	6,387.00	5,786.30	5,439.28	4,909.66	(9.74)	-6.00	-9.41	-28.84
2	Ubi Jalar	11,873.19	9,539.57	11,142.35	10,865.13	10,816.05	(0.45)	-2.49	16.80	-19.65
3	Mangga	1,242.72	473.27	2,519.85	2,567.43	2,470.44	(3.78)	1.89	432.43	-61.92
4	Nenas	193,948.24	138,400.20	210,045.85	228,532.76	236,225.89	3.37	8.80	51.77	-28.64
5	Manggis	38,177.34	34,955.21	9,167.30	38,841.37	27,797.08	(28.43)	323.69	-73.77	-8.44
6	Salak	2,201.64	937.54	965.65	1,234.28	1,698.38	37.60	27.82	3.00	-57.42
7	Pisang	22,308.11	19,024.30	18,176.62	30,377.31	22,745.02	(25.12)	67.12	-4.46	-14.72
8	Krisan	59.63	60.65	61.06	59.11	47.82	(19.10)	-3.19	0.67	1.72
9	Kentang	7,142.17	6,066.88	5,215.45	5,159.48	4,854.88	(5.90)	-1.07	-14.03	-15.06
10	Jamur	6,726.58	5,057.13	3,029.34	4,008.42	2,292.20	(42.82)	32.32	-40.10	-24.82
11	Jahe	25,935.37	21,934.30	24,361.79	3,203.12	4,444.94	38.77	-86.85	11.07	-15.43
12	Lada	58,075.05	53,099.62	42,690.77	47,619.80	51,771.12	8.72	11.55	-19.60	-8.57
13	Pala	17,027.10	15,842.35	19,936.38	20,206.99	19,957.25	(1.24)	1.36	25.84	-6.96
14	Cengkeh	12,888.87	12,754.38	9,078.76	20,246.35	25,990.24	28.37	123.01	-28.82	-1.04
15	Jambu Mete	104,654.65	70,325.57	62,811.44	58,390.78	90,558.70	55.09	-7.04	-10.68	-32.80
16	Kopi	502,020.68	414,651.16	467,790.12	279,960.74	359,053.17	28.25	-40.15	12.82	-17.40
17	Kelapa Sawit	32,543,312.32	28,493,069.24	33,519,211.16	34,602,284.10	35,593,499.71	2.86	3.23	17.64	-12.45
18	karet	2,630,313.17	2,578,790.69	3,276,336.17	2,954,366.91	2,582,684.20	(12.58)	-9.83	27.05	-1.96
19	kakao	355,320.83	330,029.48	354,752.34	380,829.84	341,518.14	(10.32)	7.35	7.49	-7.12
20	Kelapa	1,826,309.77	1,564,260.45	1,878,834.27	1,985,191.96	1,878,871.92	(5.36)	5.66	20.11	-14.35
21	Teh	61,915.30	51,319.02	54,187.17	49,038.02	43,112.77	(12.08)	-9.50	5.59	-17.11
22	Nilam	926.82	1,232.79	1,259.95	10,718.00	7,962.00	(25.71)	750.67	2.20	33.01
23	Serai Wangi	2,181.17	28,561.50	938.95	1,768.31	1,676.00	(5.22)	88.33	-96.71	1209.46
24	Tembakau	30,675.47	28,005.21	29,134.04	32,309.77	33,265.73	2.96	10.90	4.03	-8.70
25	Vanili	354.60	606.21	294.81	203.75	260.81	28.01	-30.89	-51.37	70.96
26	Gambir	14,019.84	15,446.13	15,215.44	18,015.77	18,608.07	3.29	18.40	-1.49	10.17
27	Kambing Hidup	12.78	-	6.24	11.26	15.12	34.34	80.37	100.00	-100.00
28	Domba Hidup	-	-	-	81.50	21.00	(74.23)	100.00	0.00	0.00
29	Babi Hidup	28,145.60	27,575.40	28,711.95	27,862.64	30,721.54	10.26	-2.96	4.12	-2.03
30	Daging ayam Potong	4.25	16.13	311.91	400.65	722.77	80.40	28.45	1833.51	280.02
31	Telur tetas	9.20	303.05	376.19	46.07	166.71	261.87	-87.75	24.13	3194.05
32	DOC	-	-	0.04	3.41	11.08	225.26	8420.00		
33	Obat Hewan	562.40	616.44	549.03	739.51	832.90	12.63	34.69	-10.94	9.61
Rata-rata Pertumbuhan per Tahun						17.57	298.72	69.97	134.49	

Sumber: Pusdatin, 2019

Persentase peningkatan volume ekspor komoditas pertanian tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 tertinggi disumbang oleh ekspor telur tetas sebesar 261,87% dan DOC sebesar 225,26%, walaupun volume ekspor untuk kedua komoditas tersebut masih kecil. Ekspor telur tetas tersebut dilakukan oleh perusahaan swasta nasional yang ditujukan ke Timor Leste dan Myanmar. Selanjutnya, untuk ekspor DOC ditujukan ke Timor Leste, Gabon dan Irak. Realisasi ekspor tersebut merupakan kesepakatan *government to government*. Kementerian Pertanian telah menjamin telur tetas dan DOC yang dikirim telah memenuhi aturan kesehatan hewan sesuai dengan standar internasional dan telah memperoleh Sertifikat Kompartemenalisasi Bebas *Avian Influenza*. Ekspor DOC ditahun-tahun mendatang diperkirakan terus meningkat, sesuai hasil *updating* Importasi Risk Analysis (IRA) yang dilakukan Tim Teknis Timor Leste ke Unit Usaha milik perusahaan swasta nasional penghasil DOC.

Kontribusi ekspor subsektor peternakan juga terlihat dari persentase peningkatan ekspor daging ayam potong tahun 2019 juga cukup tinggi mencapai 80,40%. Peningkatan sangat signifikan tersebut disebabkan karena sejak tahun 2018 telah terbuka pintu ekspor daging ayam olahan ke Timor Leste, Jepang dan Papua New Guinea (PNG), dimana sebelumnya negara-negara tersebut tidak memperbolehkan masuknya unggas dan produk unggas dari Indonesia yang belum bebas dari penyakit Avian Influenza (AI). Hal ini merupakan tindak lanjut MoU antara Menteri Pertanian Indonesia dan Timor Leste yang diikuti penandatanganan *Technical Agreement* antara Pemerintah Timor Leste dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada awal tahun 2018. Berdasarkan *Import Risk Analysis*,

Timor Leste dapat menerima sistem kompartemen bebas AI yang secara aturan Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) telah diakui. PT. Charoen Phokphand Indonesia merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang mendapatkan *Exor Permit* ke Timor Leste yang berlaku sampai Desember 2018. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan *Import Risk Analysis* kedua dan ijin diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020. Khusus untuk Jepang pada tahun 2018, dilakukan perpanjangan ijin ekspor ke Jepang oleh Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang (MAFF Japan), sehingga membuka peluang ekspor untuk produk olahan. Ekspor komoditas lain yang peningkatannya cukup tinggi pada tahun 2019 adalah jambu mete dan jahe, masing-masing meningkat 55,09% dan 38,77%.

Selain performa peningkatan ekspor komoditas pertanian yang menjanjikan, di sisi lain beberapa komoditas memperlihatkan penurunan. Penurunan tertinggi adalah untuk ekspor domba hidup, walaupun volumenya relatif kecil, pada tahun 2019 ekspor domba hidup turun 74,23% dibandingkan tahun 2018. Selain komoditas peternakan tersebut, penurunan ekspor yang cukup besar terjadi pada komoditas perkebunan yaitu karet, kelapa, kakao, teh, nilam, dan sereh wangi. Meskipun demikian, komoditas pertanian lainnya yang mengalami penurunan ekspor tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan komoditas yang mengalami peningkatan ekspor. Secara keseluruhan dari komoditas yang dihitung pada Laporan Kinerja ini, rata-rata peningkatan ekspor sebesar 17,57%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan volume ekspor produk pertanian nasional adalah:

1. Penerapan sistem perizinan sektor pertanian melalui layanan berbasis Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik. Melalui sistem tersebut, waktu layanan perizinan semakin pendek dan lebih transparan serta akuntabel. Sistem ini dibangun dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/ PP.210/7/2019, tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Sistem yang dibangun Kementerian Pertanian ini terintegrasi dengan sistem perizinan *online* terintegrasi atau *Online Single Submission* (OSS) yang sudah terhubung dengan Kementerian Keuangan, Pemda dan BKPM.
2. Akselerasi peningkatan ekspor produk peternakan melalui pembentukan Tim Percepatan Pengeluaran Benih, Bibit, Hewan, Produk Hewan, Bahan Pakan atau Pakan dan Obat Hewan berdasarkan Keputusan Dirjen PKH Nomor 4542/Kpts/OT.050/F/05/2019.
3. Pendampingan akselerasi ekspor terhadap pelaku usaha siap ekspor produk peternakan.
4. Membuat Sistem Kompartemen bebas penyakit Avian Influenza (AI) untuk mendorong peningkatan kualitas produk peternakan yang akan diekspor.
5. Menerbitkan Sertifikat Veteriner untuk semua hewan dan produk hewan yang akan diekspor dalam bentuk *Veterinary Certificate*, *Sanitary Certificate* dan *Health Certificate*. Sertifikat Veteriner menjadi salah satu persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan persetujuan dari negara calon pengimpor sebagai bukti jaminan keamanan hewan/produk hewan.
6. Dalam upaya memberikan jaminan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), Kementerian Pertanian melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada unit usaha produk hewan. Sertifikat NKV diberikan sebagai bukti

terpenuhinya persyaratan higiene sanitasi unit usaha produk hewan. Sertifikat NKV juga menjadi salah satu persyaratan bagi unit usaha yang akan melakukan pemasukan (impor) dan/atau pengeluaran (ekspor) sebagai *establishment number* (nomor registrasi unit usaha).

7. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang siap melakukan ekspor komoditas peternakan melalui upaya-upaya: (a) Melakukan promosi dan misi dagang di negara potensial ekspor dengan berkoordinasi bersama K/L terkait, (b) Melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor bagi pelaku usaha berkoordinasi dengan direktorat teknis, dan (c) Melakukan identifikasi potensi produk siap ekspor dan identifikasi potensi Negara tujuan ekspor.
8. Melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura.
9. Pendampingan dan bimbingan teknis dalam penerapan budi daya yang baik sesuai GAP terutama untuk komoditas potensi ekspor.
10. Fasilitasi registrasi kebun/lahan usaha, sertifikasi GAP, organik dan registrasi *packing house*.
11. Fasilitasi pengembangan akses pemasaran/investasi produk hortikultura di pasar luar negeri dan melakukan promosi di dalam dan luar negeri.
12. Mendorong kemitraan usaha antara kelembagaan tani dengan perusahaan eksportir dalam memasok produk hortikultura yang memenuhi persyaratan mutu ekspor.
13. Fasilitasi bantuan saprodi peningkatan produksi ubi jalar dan kacang tanah. Bantuan saprodi ini meliputi perbanyak benih sumber serta pengawasan dan sertifikasi benih.
14. Mendorong percepatan registrasi kebun dalam memenuhi persyaratan ekspor.
15. Bimbingan teknis pengendalian OPT.
16. Fasilitasi promosi produk perkebunan unggulan.
11. Peningkatan kualitas dan jaminan mutu standarisasi komoditas ekspor perkebunan.

Beberapa komoditas pertanian yang belum memperlihatkan peningkatan ekspor bahkan cenderung menurun, di antaranya komoditas ubi jalar, kacang tanah, jahe, kopi, karet, dan telur tetas. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain:

1. Penerapan labelisasi maupun standarisasi yang masih kurang;
2. Kurangnya pengembangan komoditas bernilai tambah;
3. Daya saing produk dalam negeri untuk keperluan ekspor yang belum optimal;
4. Masih terhambatnya penyelesaian G to G pada beberapa negara tujuan ekspor, khususnya produk peternakan yang mempersyaratkan Indonesia bebas dari penyakit tertentu;
5. Terbatasnya informasi akses pasar para pelaku ekspor; dan
6. Kurangnya dukungan Kementerian/Lembaga lain untuk percepatan ekspor.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka rekomendasi ke depan yang dapat diberikan antara lain:

1. Pembinaan pelaku usaha ekspor pertanian terhadap standarisasi mutu ekspor;
2. Peningkatan produksi komoditas bernilai tambah;
3. Melakukan koordinasi dengan Kedutaan dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan G to G antar negara.

4. Pengembangan pasar tujuan ekspor potensial dengan memperkuat peran atase pertanian sebagai *market intelligent*;
5. Pembentukan Tim Percepatan Ekspor yang secara berkala melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan progres penyelesaian pemenuhan persyaratan kesehatan hewan di negara tujuan ekspor, serta membantu penyiapan persyaratan teknis dan kelengkapannya; dan
6. Pelaksanaan pameran perdagangan kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi akses pasar antara pelaku usaha dengan calon *buyer*, serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea Cukai) untuk melakukan percepatan ekspor komoditas pertanian.

SS 3. IKU 4 Penurunan Volume Impor Untuk Produk Pertanian Nasional	
Target 6,61%	Realisasi 5,85%
% Capaian 88,53% Berhasil	

Volume impor produk pertanian utama terdiri dari volume impor 13 (tiga belas) produk pertanian nasional dari 3 (tiga) subsektor, yaitu tanaman pangan (ubi kayu dan kacang hijau); hortikultura (jeruk dan bawang putih); dan peternakan (susu dan kepala susu, mentega, keju dan dadih susu, yoghurt, sapi hidup, daging lembu, jeroan lembu, sosis dan produk sejenisnya, serta itik).

Persentase capaian kinerja impor produk pertanian dihitung menggunakan langkah sebagai berikut:

1. Menghitung target volume impor (dalam ton) tahun 2019 yang dihitung dengan cara jumlah volume impor 13 produk pertanian tahun 2018 dikurangi 6,61%;
2. Membagi realisasi impor produk pertanian tahun 2019 dengan hasil perhitungan target penurunan impor sebesar 6,61%, seperti dihitung pada butir 1; dan
3. Menghitung capaian persentase penurunan impor dengan pendekatan rumus minimize.

Penurunan volume impor pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 6,61%, dimana hasil perhitungan terhadap target penurunan impor 2019 menunjukkan realisasi sebesar 5,85%, sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah 88,53%. Sesuai dengan kriteria *scoring* pengukuran keberhasilan kinerja sasaran strategis, maka capaian SS3 IKU 4 masuk kategori berhasil (80%-100%), namun dibandingkan capaian sasaran strategis lainnya upaya Kementerian Pertanian untuk menurunkan impor masih belum optimal, karena idealnya tingkat keberhasilannya memiliki *scoring* 100%. Capaian penurunan volume impor pertanian tahun 2019 kurang menggembirakan diduga karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti ekonomi global yang lesu, perang dagang Amerika VS China,

dan fenomena iklim yang kurang baik. Pada masa mendatang kinerja penurunan volume impor komoditas pertanian ini perlu ditingkatkan, sehingga pengurangan devisa dalam negeri untuk membeli barang impor dapat dikurangi. Perkembangan volume impor tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Perkembangan Volume Impor Komoditas Pertanian Tahun 2015-2019

No	Komoditas	Volume impor (ton)					% 2019/2018	Target 2019 (-6,61%)	% Capaian 2019 (minimize)
		2015	2016	2017	2018	2019			
1	Ubi Kayu	600.163,06	642.667,22	388.822,00	375.898,37	348.112,32	(7,39)	351.051,48	100,84
2	Kacang Hijau	45.213,54	64.735,53	78.786,02	97.225,67	80.480,66	(17,22)	90.799,06	111,36
3	Jeruk	121.476,47	86.683,15	120.354,86	95.962,09	151.243,83	57,61	89.619,00	31,24
4	Bawang Putih	482.665,29	448.881,16	559.727,81	587.942,45	472.922,19	(19,56)	549.079,45	113,87
5	Susu dan kepala susu	212.386,75	237.483,57	223.855,34	256.657,19	296.413,45	15,49	239.692,15	76,34
6	Mentega	135.419,16	148.630,71	155.671,75	167.652,71	167.653,59	0,00	156.570,86	92,92
7	Keju dan dadih susu	20.717,63	24.278,09	30.253,28	30.048,51	30.124,33	0,25	28.062,30	92,65
8	Yoghurt	320,04	1.783,49	1.957,12	1.201,05	911,28	(24,13)	1.121,66	118,76
9	Sapi hidup	197.604,09	195.764,11	168.588,53	204.682,78	223.100,72	9,00	191.153,24	83,29
10	Daging lembu	50.309,02	116.761,38	118.646,84	164.260,57	201.554,33	22,70	153.402,95	68,61
11	Jeroan lembu	2.473,26	32.202,55	44.421,42	46.781,04	64.904,33	38,74	43.688,81	51,44
12	Sosis dan produk sejenisnya	5.541,37	5.640,69	46,87	30,05	47,92	59,48	28,06	29,23
13	Itik	2.572,00	3.499,00	617,26	1,20	0,22	(81,67)	1,12	180,37
Rata-rata Penurunan Volume Impor Komoditas Pertanian									88,53

Sumber: Pusdatin, 2019

Berdasarkan Tabel 11, pada Tahun 2019 terjadi penurunan impor beberapa komoditas antara lain ubi kayu, kacang hijau, bawang putih, yoghurt dan itik. Penurunan volume impor tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yang tertinggi adalah untuk komoditas itik mencapai 81,67%. Sebaliknya beberapa komoditas juga menunjukkan peningkatan impor seperti jeruk, susu, sosis, dan beberapa komoditas lainnya. Sosis adalah komoditas yang mengalami peningkatan impor cukup besar pada tahun 2019 yaitu sebesar 59,48% meskipun volumenya kecil yaitu 47,92 ton. Akan tetapi jika dibandingkan dengan volume impor sosis tahun 2015, maka capaian tahun 2019 sudah sangat baik (volume impor turun rata-rata 18,45% per tahun).

Beberapa komoditas pertanian yang belum sesuai harapan dalam hal penurunan volume impor adalah jeruk, susu, sapi hidup, daging dan jeroan lembu, serta sosis. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Kurangnya penguasaan pasar domestik;
2. Upaya peningkatan produksi di tingkat hulu hingga penanganan di hilir belum optimal;
3. Produk dalam negeri yang kurang kompetitif dengan komoditas negara pesaing;
4. Menurunnya produksi dalam negeri karena musim kemarau panjang di tahun 2019.

Beberapa kegiatan yang mendukung penurunan volume impor produk pertanian nasional adalah:

1. Peningkatan produksi dalam negeri komoditas substitusi impor melalui pengembangan kawasan hortikultura (komoditas bawang putih);

2. Peningkatan peran swasta melalui investasi antara lain melalui fasilitasi *tax allowance* atau pengurangan pajak bagi pelaku usaha bidang peternakan;
3. Tersusunnya bahan kebijakan terkait pendaftaran dan perijinan usaha peternakan. Bahan ini telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai bagian dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian dan terfinalisasinya bahan revisi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau sebagai mitigasi risiko usaha peternakan sapi dan kerbau dengan pertanggungjawaban untuk risiko kematian karena sakit, beranak dan kecelakaan, serta kehilangan. Dengan adanya produk asuransi ini investor lebih tenang dalam menjalankan usahanya dan terjamin keberlanjutan usahanya;
4. Pada aspek pembiayaan telah dilakukan koordinasi intensif bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam upaya penyediaan skema pembiayaan yang terjangkau dan sesuai kriteria usaha pertanian melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR);
5. Pengembangan kemitraan usaha peternakan;
6. Penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Berkembangnya usaha pembibitan dan budi daya itik sepanjang tahun 2019; dan
8. Berkembangnya Unit Usaha Pengolahan (UPH) yoghurt di tingkat peternak (terintegrasi dengan budi daya) maupun pada UPH yang terpisah.
9. Pelayanan Informasi Pasar.

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan antara lain:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas berdaya saing;
2. Pengembangan infrastruktur, kelembagaan, dan sarana pemasaran;
3. Promosi produk pertanian di dalam negeri;
4. Stabilisasi harga;
5. Rekomendasi kebijakan impor;
6. Peningkatan pengolahan peternakan untuk mendukung substitusi impor;
7. Pengembangan investasi sapi (potong dan perah);
8. Pembuatan sarana pengairan; dan
9. Pendampingan secara intensif dalam budi daya terutama dalam pengendalian OPT.

SS 3. IKU 5	
Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan Terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian	
Target 0,1%	Realisasi 0,03% (<i>Minimize Indicator</i>)
% Capaian 170% Sangat Berhasil	

Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor, Badan Karantina Pertanian melakukan sertifikasi kesehatan terhadap media pembawa ekspor. Keberhasilan sertifikasi ekspor diukur dari jumlah ekspor komoditas pertanian yang disertifikasi dibanding jumlah komoditas pertanian ekspor yang tidak memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Indikasinya adalah jumlah pemberitahuan ketidaksesuaian dari negara tujuan ekspor dalam bentuk *Notification of Non-Compliance (NNC)*, Brafak, atau dokumen lainnya yang menyatakan bahwa komoditas pertanian yang disertifikasi ditolak atau dimusnahkan di negara tujuan. Target dari indikator kinerja sebesar 0,1%, artinya sertifikasi produk pertanian ekspor yang tidak dapat memenuhi persyaratan negara tujuan, ditolak atau dimusnahkan oleh negara tujuan maksimal sebesar 0,1%, penghitungan indikator tersebut sebagai berikut:

$$IKSS5 = \frac{\text{Jumlah Pemberitahuan ketidaksesuaian atas Ekspor Komoditas Pertanian (KH dan KT)}}{\text{Jumlah sertifikasi Komoditas Pertanian (KH dan KT)}} \times 100\%$$

Keterangan:

KH = Karantina Hewan; KT = Karantina Tumbuhan

Berdasarkan data lalu lintas ekspor media pembawa dan pemberitahuan ketidaksesuaian dari negara tujuan ekspor selama tahun 2019, dari 166.710 kali sertifikasi ekspor karantina tumbuhan dan 20.383 kali sertifikasi ekspor karantina hewan, terdapat 57 pemberitahuan ketidaksesuaian atas ekspor komoditas pertanian, yang secara detil dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Pemberitahuan ketidaksesuaian oleh negara lain dikarenakan komoditas ekspor tidak memenuhi persyaratan karantina dan keamanan pangan di negara tujuan antara lain masih ditemukan Organisme Pengganggu Tumbuhan maupun serangga hidup pada produk ekspor pertanian, seperti lalat buah, terjadi pertumbuhan bibit pada saat pengiriman misalnya kelapa yang berkecambah, ketidak patuhan dengan persyaratan khusus di negara tujuan, dan komoditas pertanian terkontaminasi Aflatoksin. Berdasarkan data tersebut, maka dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$\text{IKSS 5} = \left(\frac{0+57}{20383+166710} \right) \times 100\% = 0.03\%$$

Perkembangan capaian Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan Terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian selama empat tahun terakhir juga mengalami peningkatan, seperti terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Perkembangan Capaian Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian Tahun 2015-2019

Target dan Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019
Target (%)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Realisasi (%)	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03
Capaian (%)	180	180	180	190	170

Sumber: Badan Karantina Pertanian, 2019

Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2019 sebesar 0,1%, capaian Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan Terhadap Total Komoditas Ekspor tahun 2019 telah terlampaui, yaitu 170%. Oleh karena itu, kinerja yang sangat berhasil pada tahun 2019 harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam menangani komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian didukung oleh berbagai upaya antara lain:

1. Penguatan regulasi ekspor komoditas pertanian;
2. Percepatan pelayanan sertifikasi ekspor komoditas pertanian melalui penerapan *inline inspection*;
3. Penyediaan informasi teknis dalam rangka memenuhi persyaratan negara tujuan;
4. Upaya pemenuhan protokol dalam rangka perluasan akses pasar ekspor komoditas pertanian;
5. Penyediaan protokol ekspor untuk beberapa komoditas unggulan dalam pemenuhan persyaratan negara tujuan;
6. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Badan Karantina Pertanian dan pihak ketiga dalam menjalankan tindakan karantina melalui pelatihan, dan bimbingan teknis (diseminasi);
7. Pengembangan teknik dan metoda pemeriksaan kesehatan dan keamanan hayati serta tindakan perlakuan terhadap komoditas pertanian yang akan diekspor;
8. Penerapan dan pengembangan sertifikat elektronik dengan negara tujuan ekspor seperti Selandia baru, Belanda, dan Australia; serta
9. Kemampuan untuk memenuhi persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor yang mengalami perubahan antara lain: Uni Eropa dan Thailand.

Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan, maka dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam aspek perkarantinaan (pemenuhan persyaratan negara tujuan) untuk mendukung akselerasi ekspor komoditas unggulan;
2. Meningkatkan kerjasama bilateral dalam kerangka SPS dengan negara tujuan ekspor sehingga komoditas pertanian Indonesia dapat diterima di pasar Internasional;
3. Akreditasi laboratorium pengujian yang diakui secara internasional;
4. Membangun jejaring kerja dengan organisasi dan instansi terkait baik nasional maupun internasional;
5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan baik nasional maupun internasional;
6. Peningkatan pengawasan terhadap pihak ketiga yang terdaftar sebagai pelaksana tindakan karantina tertentu melalui penerapan sistem audit;
7. Pemenuhan sarana dan prasarana tindakan karantina khususnya tindakan pemeriksaan dan perlakuan media pembawa di UPT tempat pengeluaran;
8. Pemanfaatan hasil uji terap dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi tindakan karantina sebagai pendukung akselerasi ekspor; dan
9. Melakukan bimbingan teknis akselerasi ekspor.

Sasaran Strategis 4 (SS 4)

TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN STRATEGIS NASIONAL

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah menetapkan 7 (tujuh) komoditas pangan pokok, yaitu padi, jagung, kedelai, gula tebu, daging sapi/kerbau, cabai, dan bawang merah. Untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan pokok, Kementerian Pertanian menetapkan rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional sebagai indikator pencapaian Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Strategis Nasional.

SS 4. IKU 6	
Rata-Rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional	
Target 7,9%	Realisasi 7,00%
% Capaian 88,56% Berhasil	

Target kinerja peningkatan produksi pangan strategis nasional tahun 2019 diharapkan sebesar produksi naik sebesar 7,9%. Berdasarkan hasil perhitungan sebagai mana pada Tabel 13. diperoleh hasil sebesar 7,00%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian

untuk indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 88,56% atau masuk dalam kategori berhasil.

Metode perhitungan capaian produksi pangan strategis nasional dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Hitung jumlah nominal (dalam ton) target kenaikan produksi tahun 2019 dengan cara melakukan perkalian produksi 7 komoditas strategis tahun 2018 sebesar 107,9%.
2. Data produksi hasil perhitungan butir satu merupakan data target yang seharusnya dicapai pada tahun 2019.
3. Persentase capaian produksi tahun 2019 dihitung dari realisasi produksi 2019 dibagi dengan data target produksi (butir 2) dikalikan 100%.
4. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Rata-Rata Capaian Produksi Pangan Strategis Nasional Tahun 2019

NO	KEGIATAN	Realisasi 2018	Target peningkatan 7% th2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019
1	Produksi padi (Ton)	59.200.534	63.877.376	54.604.033	85,48
2	Produksi jagung (Ton)	21.655.172	23.365.931	22.586.207	96,66
3	Produksi kedelai (Ton)	650.000	701.350	424.189	60,48
4	Produksi Cabai (Ton)	2.542.332	2.743.176	2.572.519	93,78
5	Produksi Bawang Merah (Ton)	1.503.436	1.622.207	1.572.456	96,93
6	Produksi tebu (Ton)	2.174.400	2.346.178	2.258.133	96,25
7	Produksi Daging Sapi&Kerbau (Ton)	527.905	569.609	514.400	90,31
Capaian Rata-Rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional					88,56

Sumber: BPS, diolah Eselon I terkait

Keterangan:

*) Data produksi padi, jagung, dan kedelai tahun 2018 dan 2019 hasil koreksi dari BPS

***) Produksi Cabai, Bawang Merah, tebu, dan daging sapi&kerbau: Angka Sementara

Rata-rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren berfluktuasi dengan kecenderungan menurun untuk komoditas padi, kedelai, dan sapi (Tabel 14). Adanya perubahan metode penghitungan produksi tanaman pangan menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA) yang berujung pada rasionalisasi luas baku lahan, menyebabkan terjadinya penyesuaian dan harmonisasi produksi tanaman pangan tahun 2018 dan 2019. Meskipun demikian, beberapa produksi mengalami kenaikan yaitu jagung, cabai, bawang merah, dan tebu, masing-masing sebesar 4,3%; 1,19%; 4,53%; dan 3,85% jika dibanding produksi tahun 2018.

Tabel 14. Produksi Komoditas Pangan Strategis Nasional Tahun 2015-2019

NO	KEGIATAN	2015	2016	2017	2018*)	2019**)	Keterangan
1	Produksi padi*) (Ton)	75.397.841	79.354.767	81.148.594	59.200.534	54.604.033	Angka Sangat Sementara
2	Produksi jagung*) (Ton)	19.612.435	23.578.413	28.924.015	21.655.172	22.586.207	Angka Sangat Sementara
3	Produksi kedelai*) (Ton)	963.183	859.653	538.728	650.000	424.189	Angka Sangat Sementara
4	Produksi Cabai (Ton)	1.915.120	1.961.575	2.359.421	2.542.332	2.572.519	Angka Sementara
5	Produksi Bawang Merah (Ton)	1.229.184	1.446.860	1.470.155	1.503.436	1.572.456	Angka Sementara
6	Produksi tebu (Ton)	2.497.997	2.204.619	2.121.671	2.174.400	2.258.133	Angka Sementara
7	Produksi Daging Sapi & Kerbau (Ton)	542.071	550.389	515.700	527.905	514.400	Angka Sementara

Sumber: BPS, diolah Eselon I terkait

Keterangan:

*) Data produksi padi, jagung, dan kedelai tahun 2018 dan 2019 hasil koreksi dari BPS

***) Produksi Cabai, Bawang Merah, tebu, dan daging sapi&kerbau: Angka Sementara

Meskipun produksi beberapa komoditas strategis mengalami penurunan, berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya pencapaian kinerja peningkatan produksi pangan strategis di antaranya komitmen pimpinan yang tinggi dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi pangan strategis. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran ini adalah dikeluarkannya kebijakan tentang Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Strategis. Upaya ini merupakan kebijakan strategis yang diambil oleh Menteri Pertanian dalam meningkatkan produksi komoditas strategis pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional. Kebijakan ini merupakan program akselerasi dalam percepatan pencapaian target kinerja jangka menengah, khususnya yang terkait dengan swasembada dan peningkatan produksi pangan strategis (Gambar 5). Pada sisi lain, adanya penurunan beberapa komoditas pertanian strategis 2019 telah mempengaruhi *supply* ke konsumen, hal ini dibuktikan selama tahun 2019 tidak terjadi gejolak harga pangan pokok.



Gambar 5. Sinergitas Kementerian Pertanian dengan *Stakeholder* terkait dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi Pangan

Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Strategis digulirkan pertama kali tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/02/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya Tahun Anggaran 2015. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14.1/Permentan/RC.220/4/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus Percepatan Swasembada Pangan dan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis.

Selama lima tahun (2015-2019) Kabinet Kerja, Kementerian Pertanian telah melaksanakan Program Upaya Khusus percepatan swasembada dan peningkatan produksi komoditas strategis padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi/kerbau, cabai dan bawang merah. Pelaksanaan program tersebut memiliki tantangan dan permasalahan yang cukup kompleks, termasuk iklim ekstrim El Nino dan La Nina yang berdampak pada kekeringan dan banjir. Untuk mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan, beberapa terobosan kebijakan telah dilaksanakan Kementerian Pertanian, diantaranya adalah: (1) revisi Perpres Pengadaan Barang/Jasa dari semula tender menjadi penunjukan langsung dan menggunakan *e-catalogue*; (2) *refocusing* kegiatan dan anggaran untuk tujuh komoditas utama padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, bawang merah, dan cabai; (3) bersinergi dengan seluruh instansi terkait; (4) penerapan sistem *reward and punishment*; (5)

mengawal dan mendampingi UPSUS secara masif; (6) pengendalian impor untuk memberikan insentif kepada petani; (7) antisipasi dini banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT); dan (8) IB untuk 3,0 juta sapi dan produksi *straw* tidak seluruhnya diekspor.

Kebijakan yang telah digulirkan selain memberikan hasil yang nyata, upaya percepatan swasembada pangan juga telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi dan ekspor pangan. Dalam tiga tahun pelaksanaan kegiatan di lapangan memberikan dukungan dalam percepatan pencapaian swasembada pangan. Hasil lain dari dampak kebijakan tersebut adalah: (1) tenaga kerja dapat dihemat 70-80% dan biaya produksi dapat dihemat 30%; (2) semangat dan sinergi kerja meningkat, serta lebih kompak; (3) *losses* turun dari 10% menjadi 2%; dan (4) pendapatan petani meningkat.

Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi pangan strategis nasional tahun 2019, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Upaya Peningkatan Produksi Padi, Jagung, Kedelai

a. Padi

Berdasarkan angka harmonisasi data padi dan palawija yang ditetapkan tanggal 4 Februari 2020 BPS dengan Kementerian Pertanian, produksi padi Tahun 2019 sebesar 54,60 juta ton, atau mencapai 85,48% dari target peningkatan produksi pangan strategis 7%. Capaian 2019 ini mengalami penurunan 7,76% dari produksi Tahun 2018 (59,20 juta ton GKG). Belum tercapainya produksi padi dikarenakan metode penghitungan pencapaian produksi di tahun 2019 menggunakan data KSA dari BPS, dengan merasionalisasi angka sasaran produksi padi berdasarkan pada luas baku lahan (ATR-BPN) seluas 7,1 juta hektar. Jika dibandingkan dengan capaian produksi padi tahun 2018 sebesar 59,20 juta ton (berdasarkan angka KSA), produksi padi tahun 2019 mengalami penurunan 7,76%.

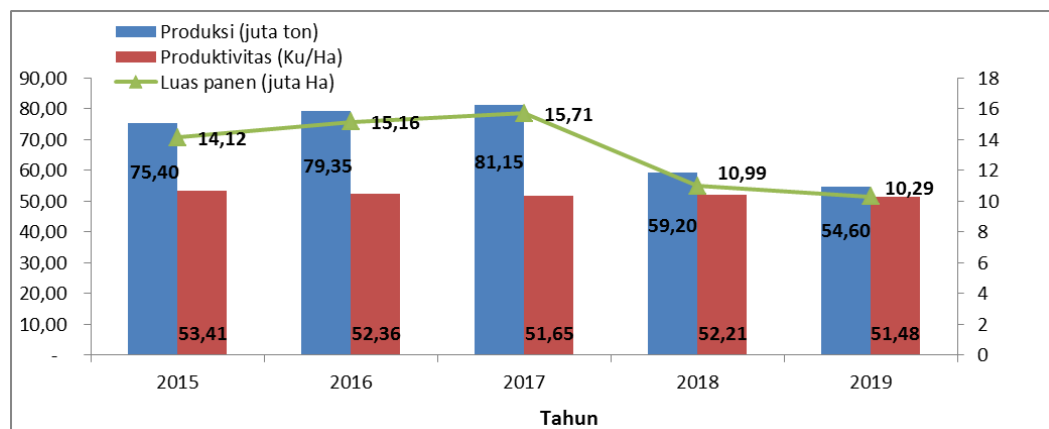
Berdasarkan Survey Konversi Gabah ke Beras (SKGB) Tahun 2019, konversi rendemen penggilingan dari Gabah Kering Giling (GKG) ke Beras adalah 57,35%, sehingga produksi beras Tahun 2019 berdasarkan konversi tersebut adalah 31,31 juta ton. Dengan rata-rata konsumsi nasional per kapita tahun 2017 adalah 111,58 kg/kapita/tahun, dan proyeksi penduduk tahun 2019 sebesar 267.569.200 juta jiwa, sehingga kebutuhan konsumsi beras adalah 29,78 juta ton, maka masih terdapat surplus (produksi dikurangi konsumsi) sebesar 1,53 juta ton. Meskipun terjadi perubahan metode perhitungan produksi yang menyebabkan penurunan angka produksi dari tahun-tahun sebelumnya, perhitungan produksi beras masih bisa mencukupi konsumsi penduduk nasional, dan justru masih surplus sehingga Indonesia dapat melakukan ekspor beras ke beberapa negara. Jumlah ekspor beras tahun 2019 adalah 178 ton.

Rasionalisasi luas lahan baku sawah yang mengacu pada perhitungan BPS dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) menyebabkan penurunan area sawah dari 8,16 juta ha yang ditetapkan tahun 2017, menurun menjadi 7,46 juta ha yang disebut

dalam SK Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019. Penurunan ini juga berdampak pada penurunan luas panen dari tahun 2017 sebesar 15,71 juta ha menjadi 11,38 juta ha di tahun 2018. Pergeseran musim tanam di tahun 2019 juga menyebabkan turunnya luas tanam dan luas panen di tahun 2019. Luas panen tahun 2019 menurun 0,7 juta ha dari luas panen tahun 2018.

Produktivitas tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 0,89 ku/ha yang disebabkan oleh musim kemarau yang lebih panjang di tahun 2019 sehingga ketersediaan air berkurang, yang berdampak pada terjadinya kekeringan di area persawahan sehingga produktivitas menurun.

Fluktuasi perkembangan produktivitas, luas panen, dan produksi padi tahun 2015-2019 dapat terlihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi Tahun 2015-2019

Keterangan: Data 2018 dan 2019 dihitung menggunakan metode KSA dari BPS

Penurunan luas panen seringkali berkontribusi terhadap penurunan produksi. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan luas tanam padi. Tabel 15 memperlihatkan terjadi penurunan luas tanam padi sebesar 725.137 ha pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Begitu pula dibandingkan dengan tahun 2015-2018, luas tanam padi tahun 2019 merupakan yang terendah. Luas tambah tanam padi tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Luas Tanam Padi Tahun 2015-2019

No	Tahun	Masa Tanam (MT)	Luas Tanam (Ha)
1	2015	MT 2014/2015 (Okt 2014-Sept 2015)	14,459,123
2	2016	MT 2015/2016 (Okt 2015-Sept 2016)	15,512,181
3	2017	MT 2016/2018 (Okt 2016-Sept 2017)	15,820,210
4	2018	MT 2018/2019 (Okt 2017-Sept 2018)	11,785,720
5	2019	MT 2018/2019 (Okt 2018-Sept 2019)	11,060,583

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2019

Pada tahun 2019 produksi padi tidak mencapai target yang diharapkan disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:

1. Rasionalisasi luas lahan baku sawah yang mengacu pada perhitungan BPS dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) menyebabkan penurunan area sawah dari 8,16 juta ha yang ditetapkan tahun 2017, menurun menjadi 7,105 juta ha yang disebut dalam Ketetapan Menteri ATR Nomor 339/2018 tanggal 8 Oktober 2018, sedangkan luas lahan baku sawah tersebut menjadi dasar perhitungan luas panen, sehingga secara langsung akan menurunkan produksi.
2. Musim kemarau tahun 2019 lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan mundurnya musim tanam dan penurunan luas tanam
3. Terjadinya kekeringan di tahun 2019 (353.171 ha) lebih tinggi 203,61% dibanding kekeringan tahun 2018 (173.458 ha) dan berdampak pada penurunan produktivitas.
4. Ketersediaan benih padi bersertifikat masih kurang yaitu sebesar 220.738 ton dari kebutuhan sebesar 276.515 ton (79,83%) dan sertifikasi benih tercapai 84.455 ha (71,27%) dari target 118.500 ton.

Rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut, antara lain:

1. Pada tahun 2019, Ditjen Tanaman Pangan bekerja sama lintas unit kerja Eselon I melakukan upaya verifikasi pendataan khususnya di wilayah yang mengalami pengurangan luas baku lahan cukup besar. Hasilnya pada tanggal 4 Februari 2020, Kepala BPN mengumumkan luas baku sawah tahun 2019 adalah 7.463.948 ha, atau terjadi peningkatan dari rilis sebelumnya seluas 7.1 ha
2. Menghimbau kepala daerah untuk mengoptimalkan penggunaan pompa air dan embung.
3. Peningkatan produksi Tahun 2020 dilakukan dengan pendekatan program pengembangan kawasan padi berbasis korporasi petani, yang diklasifikasi ke dalam Kawasan Utama, Kawasan Andalan, dan Kawasan Pengembangan.
4. Peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, diseminasi dan penerapan paket teknologi tepat guna spesifik lokasi, mekanisasi alat mesin pertanian, peningkatan mutu sarana prasarana.

5. Pengembangan padi di lahan rawa untuk meningkatkan IP dan produktivitas, pengembangan padi tadah hujan dan lahan kering/padi gogo, penambahan luas tambah tanam di lahan potensial lainnya.

Kegiatan utama yang mendukung produksi padi Tahun 2019 melalui APBN Ditjen Tanaman Pangan, adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Budi Daya Padi

Kegiatan budi daya padi Tahun 2019 mencakup 8 kegiatan, terdiri atas Kegiatan budi daya tumpang sari padi jagung, tumpang sari padi kedelai, padi rawa serasi, padi rawa non serasi, padi inbrida, padi bebas residu, padi Merauke, dan kawasan padi berbasis korporasi petani. Kegiatan budi daya padi ini dialokasikan pada areal 1.380.390 Ha dan terealisasi sebesar 1.046.915 Ha (70,69%) dengan realisasi tanam budi daya padi sebesar 828.270 ha.

2) Bantuan Benih

Rasio benih padi yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan adalah indikator kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman. Benih padi yang tersedia sebelum masa tanam selesai adalah 220.738 ton, sedangkan total benih padi yang dibutuhkan untuk memenuhi realisasi tanam seluas 11.060.583 ha adalah 276.515 ton, sehingga rasio benih yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan adalah 79,83%. Kekurangan kebutuhan benih padi sebanyak 55.777 ton (ekuivalen 2.231.808 ha) dipenuhi dari benih yang dikembangkan sendiri oleh petani.

Penyediaan benih padi sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi. Penyediaan benih padi di lapangan didukung oleh beberapa kegiatan perbenihan yang semakin baik, antara lain:

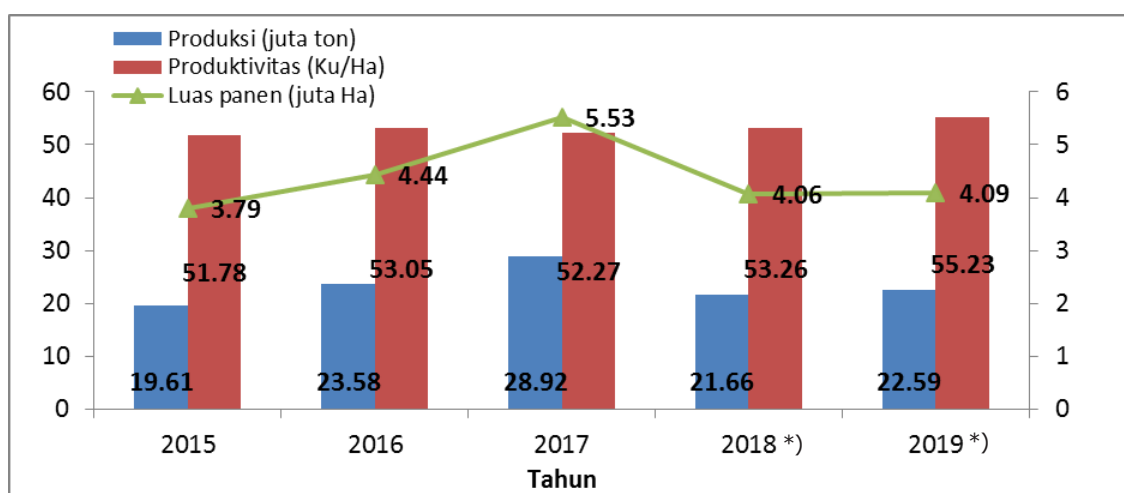
- **Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Padi**
Target Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Padi adalah 231 Ha dengan realisasi mencapai 174,5 Ha (75,54%).
- **Bantuan Benih Pusat**
Target bantuan benih padi lahan kering adalah 216.463 Ha, terealisasi sebesar 199.207 Ha (92,03%), dan telah ditanam seluas 199.207 Ha. Target bantuan benih padi inbrida adalah 626.220 Ha terealisasi sebesar 606.481 Ha (96,85%), dan telah ditanam seluas 606.481 Ha. Target bantuan benih padi hibrida adalah 36.153 Ha terealisasi 100%, dan telah ditanam seluas 36.153 Ha (100%).
- **Pengembangan Petani Produsen Benih Padi (P3BP)**
Kegiatan P3BP merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi bersertifikat yang dalam pelaksanaannya melibatkan petani penangkar. Target bantuan P3BP adalah 2.595 Ha dan terealisasi mencapai 2.350 Ha (90,56%). Kegiatan P3BP telah ditanam seluas 2.350 Ha.
- **Sertifikasi Pengawasan Peredaran Benih**
Target bantuansertifikasi pengawasan peredaran benih adalah 118.500 ha dan terealisasi sebesar 84.455 ha (71,27%).

3) Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

Peningkatan produktivitas padi dipengaruhi oleh pemupukan seperti penggunaan pupuk organik. Oleh karena itu, pada tahun 2019 dilaksanakan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 500 unit. Adapun kegiatan UPPO telah terealisasi 495 unit (99%) dari sasaran 500 unit.

b. Jagung

Produksi jagung pada tahun 2019 mencapai 22,59 juta ton pipilan kering atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 4,30%. Perkembangan produksi jagung Tahun 2015-2019 menunjukkan ada pertumbuhan setiap tahunnya, kecuali tahun 2018 yang terdapat koreksi angka dari BPS. Pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2017 (22,67%) dan 2016 (20,22). Capaian produksi jagung tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh peningkatan luas panen jagung dan produktivitas. Gambar 7 memperlihatkan bahwa produktivitas dan luas panen jagung juga mengalami fluktuasi selama 2015-2019.



Gambar 7. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung Tahun 2015-2019

Keterangan: *) Perhitungan menggunakan metode baru dari BPS

Meskipun mengalami penurunan luas tanam jagung pada tahun 2019, produksi dan luas panen jagung mengalami peningkatan dikarenakan produktivitas jagung yang meningkat. Data tahun 2015-2019 seperti terlihat pada Tabel 16 memperlihatkan terjadi penurunan luas tanam jagung sebesar 77 ribu hektar tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan awal periode jangka menengah tahun 2015, terdapat peningkatan luas tanam jagung sebesar 1,89 juta hektar.

Tabel 16. Luas Tanam Jagung Tahun 2015-2019

No	Tahun	Masa Tanam (MT)	Luas Tambah Tanam (Ha)
1	2015	Okt 2014-Sept 2015	3,951,349
2	2016	Okt 2015-Sept 2016	4,667,853
3	2017	Okt 2016-Sept 2017	5,761,316
4	2018	Okt 2017-Sept 2018	5,923.623
5	2019	Okt 2018-Sept 2019	5.846.282

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2019

Produksi jagung belum mencapai target yang diharapkan disebabkan oleh permasalahan non teknis dan teknis, antara lain:

1. Permasalahan non teknis, terkait transisi perubahan metode pendataan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dengan laporan data SP menjadi pendataan dengan menggunakan metode KSA, sehingga terdapat penyesuaian perbaikan data produksi jagung.
2. Jagung yang ditanam di lahan kering juga membutuhkan air di musim hujan, terjadinya kemarau panjang 2019 menyebabkan petani gagal tanam jagung sehingga luas tanam jagung 2019 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya

Rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut, antara lain :

1. Ditjen Tanaman Pangan mendukung Perbaikan data jagung menuju satu data yang terintegrasi dan diupayakan oleh lintas K/L.
2. Peningkatan produksi jagung dengan pola pendekatan pengembangan kawasan korporasi. Pengembangan jagung diprioritaskan pada Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) di lahan kering, tadah hujan, lahan kritis, areal berlereng maupun di areal tanaman tahunan kebun/hutan, dengan pola tumpang sari dengan menerapkan prinsip konservasi lahan dan menjaga kelestarian lingkungan

Kegiatan utama yang mendukung peningkatan produksi jagung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Budi Daya Jagung
Kegiatan budi daya jagung Tahun 2019 mencakup 3 kegiatan, yang terdiri atas kegiatan budi daya tumpang sari jagung dengan padi, tumpang sari jagung kedelai, dan pengembangan budi daya jagung hibrida. Target kegiatan budi daya jagung adalah 814.975 ha, terealisasi sebesar 601.129 ha (69,91%) serta telah ditanam 100%.
- 2) Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Jagung
Benih jagung yang tersedia sebelum masa tanam selesai adalah 102.940 ton, sedangkan total benih jagung yang dibutuhkan 87.694 ton, sehingga rasionya adalah 117,39% dari target 80,50 %. Keberhasilan capaian ini mendorong peningkatan produksi jagung dengan penggunaan benih unggul bersertifikat dalam berbudi daya jagung.

Ketersediaan benih jagung didukung oleh adanya *carry over* benih dari tahun sebelumnya yang cukup banyak, penangkaran benih jagung sepanjang tahun sehingga pengadaan benih jagung akan stabil dan tersedia di pasar bebas. Selain itu juga didukung oleh kegiatan atau program dari Direktorat Perbenihan. Penyediaan benih jagung sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi jagung.

Target Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber jagung adalah 2 ha dan terealisasi 100%. Realisasi tanam dari bantuan benih jagung adalah 2 ha dan sudah panen 2 ha, yang menghasilkan 3.600 kg.

3) Bantuan Benih Jagung

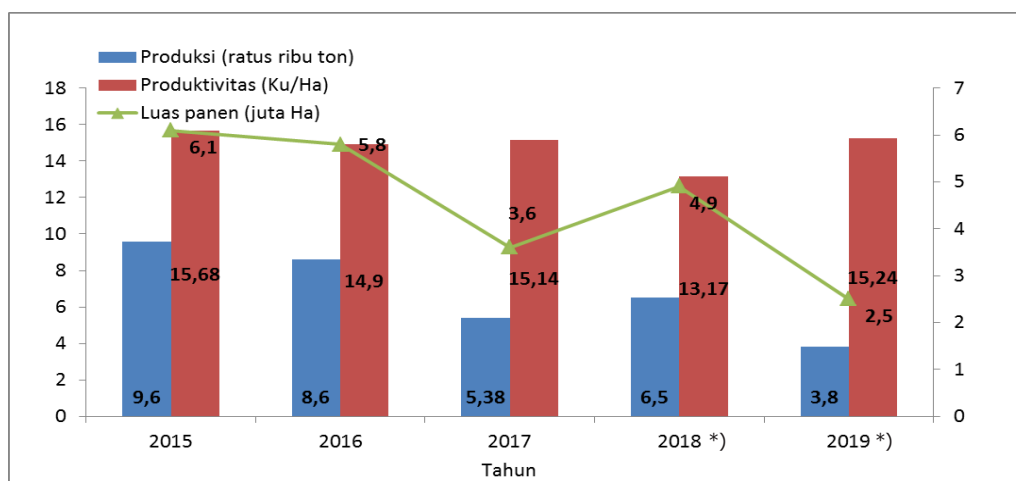
Bantuan Benih jagung terdiri dari bantuan benih untuk varietas umum 2 dan varietas umum 3. Alokasi dari bantuan benih jagung adalah 1.704.000 ha dan terealisasi sebesar 1.389.273 Ha (96,09%). Realisasi tanam dari bantuan benih jagung adalah 931.893 Ha.

4) *Pilot Project* Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani

Target bantuan *Pilot Project* Perbenihan Berbasis Korporasi Petani adalah 1.075 ha dan terealisasi sebesar 1.073 ha (99,17%). Bantuan benih tersebut telah seluruhnya ditanam.

c. Kedelai

Berdasarkan harmonisasi data padi dan palawija tanggal 4 Februari 2020 antara BPS dengan Kementerian Pertanian, Produksi kedelai tahun 2019 mencapai 0,42 juta ton, atau mengalami penurunan sebesar 34,74% dari produksi tahun 2018. Fluktuasi perkembangan produksi kedelai 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Perkembangan Realisasi Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Kedelai Tahun 2015-2019

Keterangan: *) Tahun 2018 dan 2019 menggunakan penghitungan dengan Metode Baru dari BPS

Penurunan produksi kedelai disebabkan oleh penurunan luas panen yang disebabkan oleh menurunnya luas tanam, masih rendahnya minat petani, juga kurang tersedia

benih kedelai pada saat musim tanam tiba. Meskipun demikian, terjadi peningkatan produktivitas sebesar 12,90%. Tabel 17 memperlihatkan terjadi penurunan luas tanam kedelai sebesar 488 ribu ha di tahun 2019 dibanding di tahun 2018.

Tabel 17. Luas Tanam Kedelai Tahun 2015-2019

No	Tahun	Masa Tanam (MT)	Luas Tanam (Ha)
1	2015	Okt 2014-Sept 2015	653,205
2	2016	Okt 2015-Sept 2016	626,229
3	2017	Okt 2016-Sept 2017	369,038
4	2018	Okt 2017-Sept 2018	790,873
5	2019	Okt 2018-Sept 2019	302.777

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan, 2019

Beberapa hal yang menyebabkan produksi kedelai belum mencapai target yang diharapkan, dikarenakan:

1. Rendahnya produktivitas, Banpem yang dibiayai APBN semula hanya menyediakan bantuan benih saja yang kemudian direvisi pada bulan Oktober 2019 dilengkapi dengan pupuk organik cair.
2. Daya simpan benih kedelai pendek, sehingga saat benih tersedia sementara belum masuk masa tanam menyebabkan benih tidak termanfaatkan yang berakibat pada menurunnya daya tumbuh.
3. Petani kedelai tidak mau mengambil resiko dalam melakukan usahatani.
4. Minat petani yang kurang untuk menanam kedelai dikarenakan harga jual produk yang tidak bisa berkompetisi dengan kedelai impor.
5. Khusus untuk program pelaksanaan banpem yang dibiayai APBN, terkendala oleh ketersediaan benih kedelai bersertifikat yang tersedia namun tidak tepat jadwal tanamnya.
6. Untuk pencapaian target produksi nasional sebesar 2,8 juta ton, pada mulanya dialokasikan program/kegiatan peningkatan produksi kedelai seluas 1.000.000 ha. Namun demikian, terdapat perubahan kebijakan yang tertuang dalam revisi DIPA ke-9 tanggal 8 Oktober 2019 berupa refocusing program yang semula 1.000.000 ha menjadi 600.000 ha. Pengurangan program/kegiatan dimaksud, sangat berpengaruh terhadap pencapaian produksi nasional, mengingat pengembangan komoditi kedelai ini masih bertumpu pada program pemerintah.

Rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut, antara lain:

1. Terkait minat petani yang kurang dalam budi daya/produksi kedelai, diupayakan kenaikannya dengan cara promosi kedelai lokal dan insentif harga jual.

Promosi kedelai lokal (non GMO) dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L), BUMN, Rumah Sakit, Restoran dan Catering. Filosofi

promosi kedelai lokal adalah produk kedelai lokal merupakan produk non GMO yang apabila dikonsumsi dalam jangka panjang lebih menjamin kesehatan konsumen, dibanding apabila mengkonsumsi produk olahan kedelai dari biji kedelai impor.

2. Pengembangan kedelai difokuskan pada daerah sentra kedelai.

Untuk mendorong petani/produsen setempat bertanam kedelai, program peningkatan produksi kedelai diutamakan pada wilayah yang terdapat produsen/penangkar benih kedelai, sehingga petani tidak kesulitan mendapatkan kedelai, mengingat umur benih kedelai yang pendek (3 bulan).

Pertanaman kedelai pada daerah sentra, dikawal oleh PBT untuk diusulkan sertifikasinya ke BPSB setempat, sehingga hasil panennya dapat dijadikan benih untuk pertanaman berikutnya, dan selanjutnya perluasan pertanaman kedelai tidak terkendala oleh keterbatasan jumlah benih.

3. Pengembangan Kawasan Kedelai berbasis Korporasi

Pengembangan kawasan kedelai berbasis korporasi ditujukan untuk menjamin pengelolaan budi daya kedelai dari hulu sampai hilir, menjamin ketersediaan benih di awal masa tanam, pengelolaan budidaya yang menjamin peningkatan produktivitas, pengelolaan pasca panen yang meminimalisir kehilangan hasil (*losses*) dan menjamin pemasaran hasil panen ke industri yang membutuhkan baik untuk benih maupun industri tahu/tempe/olahan lainnya

4. Sinkronisasi data areal pengawalan sertifikasi, jadwal panen benih kedelai, jumlah benih yang disertifikasi dan tanggal kedaluwarsa. Selanjutnya data tersebut dapat diakses secara mudah oleh pengguna.

5. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten berkoordinasi dengan BPSB untuk memetakan proses produksi benih dan menyandingkan dengan jadwal tanam kedelai di daerah binaan masing-masing.

6. Sinkronisasi program P3BK yang dikawal oleh Direktorat Perbenihan dengan program Peningkatan Produksi Kedelai yang dikawal oleh Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.

7. Penyelarasan pengadaan benih dengan jadwal tanam.

Kegiatan utama dalam rangka mendukung pencapaian produksi kedelai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Fasilitasi Bantuan Saprodi Peningkatan Produksi Kedelai

Fasilitasi bantuan saprodi peningkatan produksi kedelai tahun 2019 terdiri dari kegiatan peningkatan produksi kedelai melalui monokultur, tumpang sari padi kedelai, dan tumpang sari jagung kedelai. Target fasilitasi kedelai adalah seluas 600.000 ha dan terealisasi sebesar 482.257 ha (80,38%). Realisasi tanam fasilitasi kedelai sampai dengan akhir Desember 2019 adalah 145.520 ha, dengan luas panen 109.167 ha.

2) Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Kedelai

Rasio benih kedelai yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan adalah indikator keberhasilan kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman.

Benih kedelai yang tersedia sebelum masa tanam selesai adalah 10.212 ton, sedangkan total benih kedelai yang dibutuhkan 15.139 ton, sehingga rasionya adalah 67,45% dari target 36,00%. Keberhasilan capaian ini mendorong penggunaan benih unggul bersertifikat dalam budi daya kedelai, yang menjadi salah satu kunci peningkatan produktivitas. Ketersediaan benih kedelai didukung oleh adanya Kegiatan Desa Mandiri Benih dalam penyediaan benih kedelai antara lain dilakukan dengan:

- Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Kedelai

Target Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber kedelai adalah 136 ha dengan realisasi mencapai 59 ha (43,38%) Realisasi tanam dan panen dari bantuan benih jagung adalah 100%.

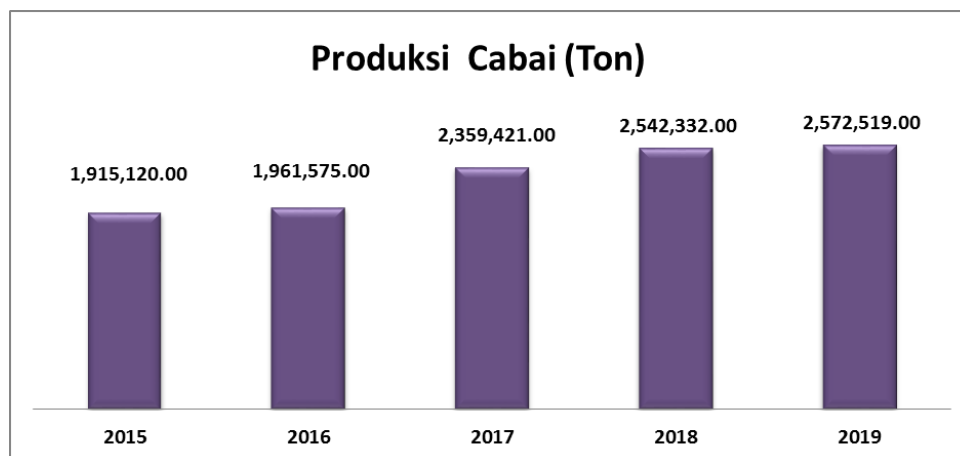
- Pengembangan Petani Produsen Benih Kedelai (P3BK)

Target P3BK adalah 1.966 ha dengan realisasi mencapai 1.523 ha (77,47%) dan produksi benihnya telah tertanam seluruhnya.

2. Upaya Peningkatan Produksi Cabai dan Bawang Merah

a. Cabai

Produksi cabai pada tahun 2019 sebesar 2,57 juta ton atau 112,23% dari target sebesar 2,29 ton, sehingga dapat dikatakan sangat berhasil. Produksi cabai dihitung dari produksi cabai rawit sebesar 1,37 juta ton dan cabai besar sebesar 1,20 juta ton. Dari tahun 2015 sampai dengan 2019, produksi cabai cenderung meningkat, dimana peningkatan tahun 2017 sebesar 20,28% merupakan yang terbesar dalam periode tersebut. Perkembangan produksi cabai nasional dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Produksi Cabai (Ton) Tahun 2015 – 2019

Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi cabai ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019 antara lain:

1) Pengaturan Pola Tanam

Pengaturan pola tanam berbasis kebutuhan riil dilakukan secara nasional yang kemudian dirinci menjadi pola tanam provinsi dan kabupaten. Setiap daerah mempunyai target untuk menyediakan luas tanam baru setiap bulannya yang dapat mencukupi kebutuhan cabai 3 (tiga) bulan berikutnya. Tujuan pengaturan pola tanam ini adalah agar dapat mengatur keseimbangan *supply demand*, sehingga stabilisasi pasokan dan harga dapat terjaga yang akhirnya berdampak pada berkurangnya inflasi. Secara umum, produksi cabai mencukupi di tahun 2019, meskipun di pertengahan tahun sempat terjadi gejolak harga dikarenakan berkurangnya produksi yang diakibatkan karena faktor musim kemarau dan penerapan pola tanam belum optimal di beberapa daerah, serta masih adanya ketergantungan pasokan cabai dari daerah lain.



Gambar 10. Pengaturan Pola Tanam Cabai dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis

2) Pengembangan Kawasan

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan kawasan adalah stabilisasi pasokan, perbaikan mutu, serta pengelolaan lahan usaha pada sentra produksi. Target pengembangan kawasan cabai pada tahun 2019 adalah seluas 10.050 Ha dan terealisasi 99,50%. Penguatan kawasan cabai penyangga Jabodetabek diperuntukkan sentra di Pulau Jawa yang menjadi pemasok utama pasar Jabodetabek, sedangkan pengembangan sentra baru di luar Pulau Jawa bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan lokal agar tidak bergantung pasokan dari luar daerah.

3) Pengendalian OPT Ramah Lingkungan

Berdasarkan hasil analisis usahatani cabai, penggunaan pestisida kimia memberikan kontribusi biaya produksi sebesar 30–40%. Namun, dengan penerapan pengendalian OPT ramah lingkungan melalui penggunaan pestisida

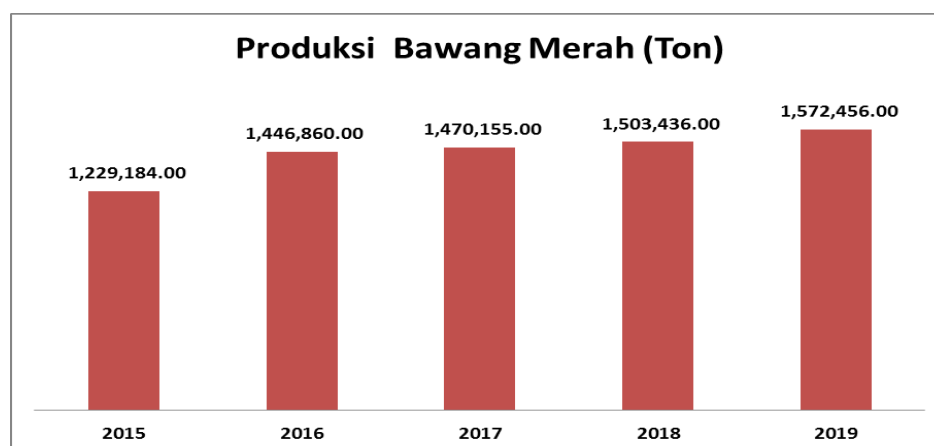
nabati, perangkap hama, likat kuning, tanaman border, dan pengendalian OPT ramah lingkungan lainnya, kontribusi biaya produksinya lebih rendah, yaitu hanya sekitar 10–15%. Saat ini petani/kelompok tani mulai menyadari bahwa pengendalian OPT menggunakan pestisida kimia membutuhkan biaya yang lebih tinggi, sedangkan permodalan petani terbatas. Oleh karena itu petani/kelompok tani sudah mulai bertahap melakukan budi daya cabai ramah lingkungan. Pengendalian OPT ramah lingkungan menjaga kondisi ekosistem yang lebih sehat bagi tanah dan produksi cabai serta produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

Ditjen Hortikultura mendorong pembentukan korporasi di sentra produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dalam rantai pemasaran. Strategi yang dapat ditempuh yaitu peningkatan kualitas produk yang dihasilkan dan mempertahankan kontinuitas produksi dengan mengatur manajemen pola tanam, industrialisasi hulu-hilir usaha tani serta pemasaran kolektif. Inisiasi pembentukan korporasi petani cabai saat ini baru dilaksanakan di Kabupaten Cianjur melalui kegiatan koperasi yang bernama "Koperasi Pemasaran Maju Berkah Mandiri" dan sudah berbadan hukum.

Beberapa upaya ke depan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan peningkatan produksi aneka cabai di antaranya menyusun pola tanam 2020 baik berdasarkan data ATAP dan kebutuhan riil, konsistensi daerah untuk melaksanakan manajemen pola tanam, mendorong percepatan proses pengadaan bantuan dari APBN, mendorong penerapan sistem budi daya ramah lingkungan, serta komunikasi yang efektif antara pusat, daerah dan *Champion*.

b. Bawang Merah

Pada Tahun 2019 produksi bawang merah mencapai 1.572.456 ton atau 105,11% dari target sebesar 1.495.993 ton. Produksi bawang merah sepanjang tahun 2015 sampai 2019 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,54% (Gambar 11).



Gambar 11. Produksi Bawang Merah (Ton) Tahun 2015 - 2019

Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi bawang merah ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019 antara lain:

1) Pengaturan Pola Tanam

Pola tanam bawang merah diatur melalui pertemuan manajemen pola tanam, yang dilakukan di awal tahun khusus untuk membahas target luas tanam dan luas panen per bulan per provinsi. Setiap provinsi memiliki target bulanan yang akan di-*breakdown* sampai ke tingkat kecamatan. Pemantauan luas tambah tanam dilakukan harian oleh Mantri Tani atau Petugas Penyuluh Lapang (PPL), yang kemudian dilaporkan ke pusat. Melalui manajemen pola tanam, ditentukan daerah-daerah yang dapat menjadi penyangga saat *off season*, yaitu di bulan basah dimana biasanya terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Pengalokasian APBN juga diarahkan untuk pertanaman *off season*.

2) Pengembangan Kawasan Bawang Merah

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas bawang merah merata sepanjang tahun, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta kesejahteraan petani, melalui fasilitasi sarana produksi dan sarana budi daya serta penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Standard Operational Procedure* (SOP). Sasaran yang ingin dicapai adalah untuk ketersediaan produksi bawang merah merata sepanjang tahun, sehingga kebutuhan konsumsi masyarakat tercukupi, adanya kestabilan harga di tingkat produsen dan konsumen dan peningkatan ekspor. Target pengembangan kawasan bawang merah pada tahun 2019 adalah seluas 5.200 Ha di 33 Provinsi yang terdiri dari 1.076 ha pengembangan kawasan di Pulau Jawa dan 4.124 ha pengembangan kawasan di luar Jawa. Pengembangan kawasan bawang merah di luar Jawa dilakukan dengan tujuan menumbuhkan kawasan sentra bawang merah dan penyebaran produksi bawang merah, sehingga tidak tergantung dengan daerah sentra di Pulau Jawa dan terjadinya stabilisasi pasokan.

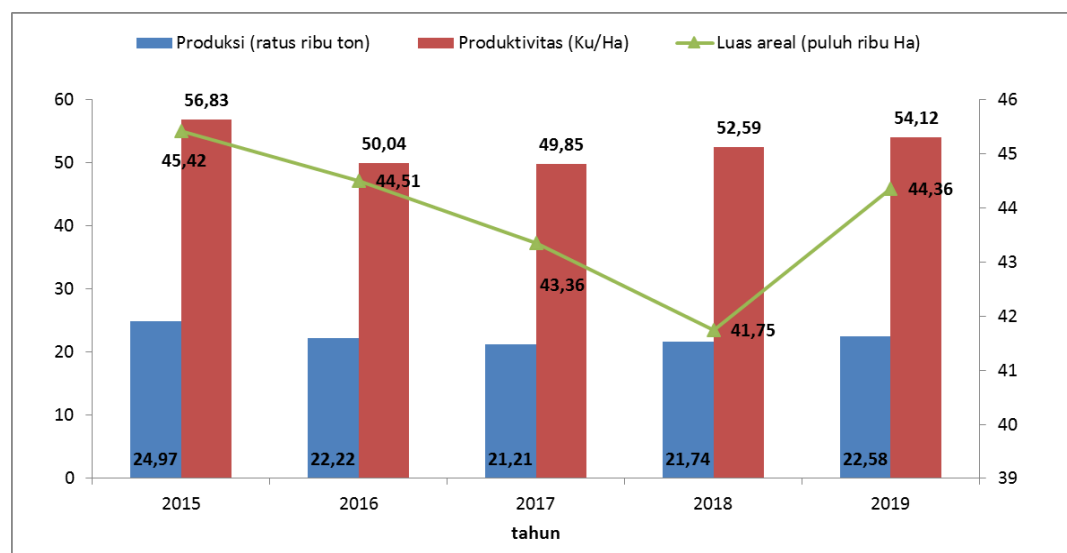
Upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan produksi bawang merah tahun 2019 adalah mendorong penggunaan benih bermutu, mendorong penggunaan benih biji (TSS) dan menerapkan budi daya ramah lingkungan. Alokasi APBN difokuskan untuk pengembangan di luar sentra produksi dan pulau Jawa. Saat ini, pengembangan bawang merah telah menyebar di wilayah *shortage* bawang merah dan muncul sentra-sentra baru. Selain itu adanya kebijakan tidak membuka keran impor bawang merah semakin memacu produksi di dalam negeri.

3) Pemberdayaan *Champion*

Peran *champion* bawang merah terhadap produksi bawang merah atau stabilisasi pasokan dan harga adalah dalam menginformasikan perkembangan bawang merah khususnya di wilayah-wilayah sentra. *Champion* berperan sebagai corong program pemerintah, sehingga program pemerintah terutama terkait pola tanam dan teknologi budi daya dapat lebih cepat tersosialisasi ke petani, serta berperan dalam membantu stabilisasi harga jika diperlukan.

3. Upaya Peningkatan Produksi Gula Tebu

Capaian kinerja produksi gula tebu tahun 2019 mencapai 2,26 juta ton atau mengalami peningkatan 3,85% dari produksi tahun 2018 sebesar 2,17 juta ton. Perkembangan produksi gula tebu Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Perkembangan Produksi, Luas Areal, dan Produksi Gula Tebu Tahun 2015-2019

Peningkatan produksi gula tebu tahun 2019 ditunjang oleh 58 Pabrik Gula (PG) yang tersebar di 12 provinsi dengan hasil GKP (gula Kristal Putih) sebesar 5,51 ton/ha dan ditunjang oleh tingginya rendeman tebu rata-rata 7,98%. Meskipun luas tanam tebu tahun 2019 turun menjadi 409.673 hektar, atau berkurang 20.286 hektar dibanding luas tanam tahun 2018. Ada beberapa kebijakan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019 sebagai upaya peningkatan produksi gula, antara lain:

a. Perluasan Tanaman Tebu

Salah satu upaya peningkatan produksi gula nasional adalah melalui perluasan tanaman tebu khususnya di wilayah potensial seperti Jawa Timur, Bali dan Jawa Barat. Pada tahun 2019 telah dialokasikan perluasan lahan tebu seluas 1.045 hektar realisasi luas penanaman sebesar 100%.

b. Rawat Ratoon

Kegiatan rawat ratoon dilakukan apabila sisa tebangan tebu masih cukup tinggi dan tingkat produksi tebu masih menguntungkan. Pada TA. 2019 telah dialokasikan kegiatan rawat ratoon pada areal seluas 14.055 hektar dan seluruhnya dilaksanakan (100%).

c. Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD)

Benih merupakan komponen teknologi yang sangat penting dalam budi daya tanaman karena sangat menentukan tingkat produktivitas, dan mutu hasil. Penggunaan benih unggul bermutu pada tanaman tebu merupakan salah satu faktor penting dan secara langsung berdampak positif terhadap produktivitas tebu. Oleh karena itu penggunaan benih unggul bermutu menjadi keharusan bagi pelaku usaha

(petani dan pabrik gula/PG). Benih harus dihasilkan dari kebun benih yang dikelola dengan baik dan dilakukan secara berjenjang. Benih yang dihasilkan dapat melalui perbanyakan secara konvensional (stek) dan asal kultur jaringan (laboratorium). Untuk tebu, produksi dan pengelolaan benih dilakukan secara berjenjang. Jenjang kebun benih tebu konvensional, meliputi: Kebun Bibit Pokok Utama (KBPU), Kebun Bibit Pokok (KBP), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk



Gambar 13. Kebun Benih Datar di Gorontalo

(KBI) dan Kebun Bibit Datar (KBD) (Gambar 13). Pada TA. 2019 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) seluas 150 Ha di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dan sudah terealisasi.

d. Pengadaan Sumber Air

Untuk mendukung ketersediaan air sebagai salah satu komponen penting dalam budi daya tanaman tebu, pada tahun 2019 diadakan pompa air sebanyak 79 unit

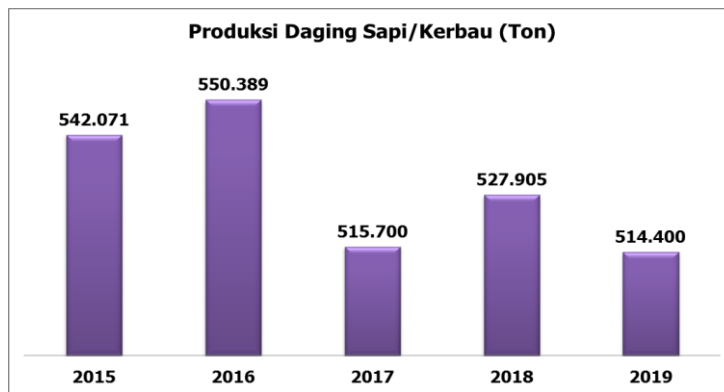
e. Pengadaan Traktor

Pengadaan traktor diperlukan untuk mempercepat pengolahan tanah, pembuatan saluran air kebun tebu di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dialokasikan 1 unit traktor dan traktor tersebut sudah disalurkan kepada Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) sasaran.

4. Upaya Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Kerbau

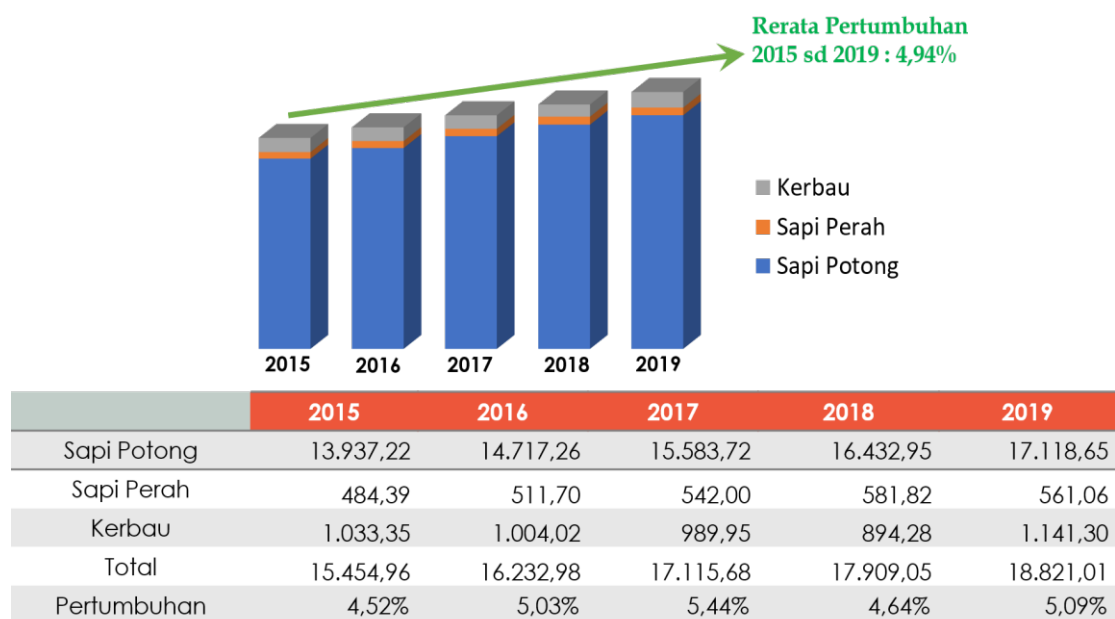
Pada tahun 2019 produksi daging sapi dan kerbau tercapai sebesar 514,4 ribu ton atau mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 2,56%. Penurunan tersebut disebabkan adanya gangguan reproduksi pada indukan ternak sapi, pemotongan betina produktif, kualitas pakan yang rendah, skala kepemilikan peternak yang kecil, ternak sebagai usaha sampingan, kekurangan jumlah SDM tenaga teknis reproduksi (IB, PKb, dan ATR), dan kurangnya sarana dan prasarana.

Perkembangan produksi daging sapi dan kerbau tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Perkembangan Produksi Daging Sapi Kerbau Tahun 2015-2019

Pencapaian kinerja produksi daging sapi dan kerbau sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi sapi dan kerbau seperti terlihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Populasi Sapi dan Kerbau Tahun 2015-2019 (Ribu Ekor)

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 15, perkembangan populasi sapi dan kerbau selama 2015-2019 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah populasi sapi dan kerbau sebanyak 15,45 juta ekor dan secara konsisten meningkat menjadi 16,23 juta ekor pada tahun 2016; 17,12 juta ekor pada tahun 2017; 17,91 juta ekor di tahun 2018; dan 18,82 juta ekor di tahun 2019. Keberhasilan capaian indikator kinerja produksi daging sapi dan kerbau ditunjang oleh beberapa kebijakan yang dilaksanakan antara lain:

a. Penerbitan beberapa regulasi terkait ruminansia besar, antara lain:

- (1) Permentan Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2018 merupakan perubahan atas Permentan Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah NKRI. Penyempurnaan yang dilakukan dalam Permentan ini adalah terkait jangka waktu pemenuhan rasio

swasta/koperasi untuk mengimpor sapi indukan, spesifikasi ternak ruminansia besar, dan masa berlaku rekomendasi.

- (2) Permentan Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2018 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Salah satu wujud regulasi tersebut, pada tanggal 14 Desember 2018, Kementerian Pertanian memfasilitasi penandatanganan MoU antara Bank dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mendorong peran aktif, serta sinergi antara Pemerintah Daerah, Perbankan dan investor dalam pengembangan peternakan sapi.

b. Optimalisasi Reproduksi melalui Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)

SIWAB adalah kegiatan yang terintegrasi untuk percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau secara berkelanjutan. Percepatan peningkatan populasi dilaksanakan melalui Inseminasi Buatan (IB). Tahun 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan kegiatan optimalisasi reproduksi melalui UPSUS SIWAB. Capaian akseptor dari Januari s.d Desember 2019 sebanyak 3.586.374 akseptor atau 119,55% dari target 3.000.000 akseptor. Capaian bunting sebanyak 2.334.474 ekor atau 111,17% dari target 2.100.000 ekor, dan lahir sebanyak 1.995.528 ekor atau 118,78% dari target 1.680.000 ekor.

c. Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak ruminansia pada lokasi kegiatan melalui penanaman dan pemanfaatan tanaman pakan ternak yang berkualitas yang dapat diakses oleh kelompok ternak, dalam rangka mendukung Kegiatan UPSUS SIWAB. Capaian pemenuhan hijauan pakan sampai bulan Desember 2019 sebanyak 1.893 Ha atau 108,06% dari target sebanyak 1.752 Ha.

d. Penyediaan Semen Beku

Semen beku yang digunakan dalam UPSUS SIWAB adalah yang ber-SNI atau telah melakukan uji lab berkala yang terstandar, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa semen beku yang beredar di masyarakat harus terjamin kualitasnya sehingga tidak merugikan peternak sebagai produsen. Pada tahun 2019 jumlah semen beku yang telah diterima oleh provinsi dari Balai Inseminasi Buatan dan Balai Inseminasi Buatan Daerah sebanyak 3.937.880 dosis, atau 81,55% dari target hibah 4.829.051 dosis dan distribusi semen beku dari provinsi ke kabupaten/kota sebanyak 3.746.985 dosis atau 76,36% dari target distribusi sebanyak 4.907.223.

e. Pengendalian Pematangan Betina Produktif

Kegiatan pengendalian pematangan betina produktif merupakan salah satu kegiatan dalam Program SIWAB. Pengendalian pematangan betina produktif bertujuan untuk mencegah pematangan sapi/kerbau betina produktif yang masih terjadi di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R). Sapi/kerbau betina produktif merupakan mesin produksi sapi/kerbau yang harus dilindungi, oleh sebab itu pemotongannya harus dikendalikan, sehingga sapi/kerbau betina produktif yang diselamatkan diharapkan akan mempertahankan keberadaan akseptor pelaksanaan SIWAB baik akseptor yang akan di-IB maupun akseptor yang sudah bunting. Pada tahun 2019, target

pengendalian pemotongan betina produktif sebanyak 80 lokasi yang tercapai sebanyak 80 lokasi atau 100%.

Dalam upaya pengendalian pemotongan betina produktif telah dilakukan kegiatan sosialisasi, perjanjian kerjasama (MoU) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baharkam Polri), dan pengawasan. Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepolisian Republik Indonesia dilakukan sejak tanggal 9 Mei 2018.

Pemotongan sapi dan kerbau betina produktif secara nasional pada periode Januari sampai Desember 2019 sebanyak 9.741 ekor. Jumlah pemotongan tersebut menurun 57,79% jika dibandingkan dengan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif pada rentang waktu yang sama pada Tahun 2018. Laporan pemotongan betina produktif tersebut berdasarkan data iSIKHNAS, dengan rata-rata partisipasi kabupaten/kota yang melaporkan sebanyak 368 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota se Indonesia (71,68%) pada Tahun 2019.

Dalam kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif dilakukan penolakan pemotongan betina produktif di Rumah Potong Hewan. Berdasarkan data iSIKHNAS, penolakan pemotongan betina produktif di RPH sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2019 di 34 Provinsi ditargetkan sebanyak 4.976 ekor dengan alasan penolakan bunting dan masih produktif.

f. Penanganan Gangguan Reproduksi

Kegiatan ini dilakukan oleh 8 UPT Veteriner dengan total wilayah penanganan sejumlah 27 provinsi. Capaian kinerja penanganan gangguan reproduksi nasional tahun 2019 sejumlah 61.859 ekor atau 91,26% dari target 67.780 ekor penanganan. Selanjutnya dari penanganan tersebut, tingkat kesembuhan nasional yang tercapai sejumlah 45.615 ekor atau 73,74%. Tindak lanjut dari kesembuhan adalah dilakukannya Inseminasi Buatan (IB) dengan realisasi IB sejumlah 26.036 ekor atau 57,08%.

Beberapa upaya perbaikan di masa mendatang yang perlu dilakukan, antara lain: (1) penanggulangan gangguan reproduksi pada indukan sapi, (2) penanganan pemotongan sapi betina produktif, (3) perbaikan pakan sapi, (4) penguatan kelembagaan peternak, (5) pelatihan dan bimbingan teknis, (6) penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana semen beku, N₂ Cair, dan kontainer, serta (7) penambahan bibit sapi indukan.

Sasaran Strategis 5 (SS 5)

TERJAMINNYA KUALITAS DAN KEAMANAN PANGAN STRATEGIS NASIONAL

Pangan merupakan kebutuhan dasar, yang pemenuhannya menjadi salah satu hak azasi manusia. Salah satu permasalahan pangan adalah masih dijumpainya praktek-praktek penanganan pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Hal ini meningkatkan terjadinya potensi kontaminasi atau residu pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Dari aspek kualitas pangan, kualitas pangan yang rendah menyebabkan daya saing produk menjadi berkurang.

Keamanan pangan tidak hanya terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, namun juga terkait dengan perdagangan pangan, dimana keamanan pangan menjadi salah satu persyaratan dalam perdagangan global. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara eksportir produk pertanian utama di dunia, seperti rempah-rempah dan kelapa sawit.

Terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, maka jumlah kasus pangan menjadi sasaran strategis. Dengan mempertimbangkan bahwa penanganan keamanan pangan di Indonesia dilakukan oleh beberapa instansi tergantung pada jenis produk pangannya.

Keberhasilan dari pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia; dan (2) Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor.

SS 5. IKU 7	
Jumlah Kasus Pangan Segar Nasional yang Membahayakan Kesehatan Manusia	
Target 10 kasus	Realisasi 0 kasus (<i>Minimize Target</i>)
% Capaian 200 % Sangat Berhasil	

Pencapaian Indikator Kinerja tahun 2019 yang terkait dengan pengawasan keamanan pangan segar adalah jumlah kasus pangan segar komoditas strategis nasional yang membahayakan kesehatan manusia, khususnya yang disebabkan oleh Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT). Target kasus pangan segar tersebut adalah 10 (sepuluh) kasus di tahun 2019. Dari data dan informasi yang dihimpun, tidak ada kasus pangan segar strategis nasional yang membahayakan kesehatan manusia berdasarkan pemberitaan di media massa cetak dan/atau elektronik nasional pada tahun 2019 (0 kasus).

Keberhasilan pengawasan keamanan pangan segar ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Sertifikasi keamanan pangan PSAT oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan baik Pusat maupun Daerah (OKKPP-OKKPD). Kegiatan sertifikasi PSAT ini merupakan salah satu bentuk pengawasan sebelum peredaran (*pre-market*) yang dilakukan oleh OKKPP maupun OKKPD. Sertifikasi keamanan PSAT atau Sertifikasi Prima merupakan jaminan pemenuhan persyaratan keamanan pangan di tingkat proses produksi (*On Farm*). Sertifikasi Prima dibedakan menjadi sertifikasi Prima 1, Prima 2 dan Prima 3. Sertifikasi Prima 3 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan pangan khususnya dari aspek residu pestisida; Prima 2 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; sedangkan Prima 1 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan. Sepanjang tahun 2019, OKKPP telah menerbitkan sertifikat Prima 1, Prima 2 dan Prima 3 sejumlah 570 sertifikat.
2. Sertifikasi kesehatan PSAT tujuan ekspor (*health certificate*/HC). HC diberikan bagi PSAT tujuan ekspor yang dinyatakan memenuhi ketentuan keamanan pangan tertentu di negara tujuan ekspor. Penerbitan HC dilakukan melalui mekanisme pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium yang diakui. Untuk saat ini penerbitan HC masih terfokus bagi produk pala yang diekspor ke Uni Eropa, meskipun ada beberapa komoditas lain yang mengajukan permohonan penerbitan HC untuk memenuhi ketentuan di negara tujuan ekspor. Sepanjang tahun 2019, OKKPP telah menerbitkan HC sejumlah 527 sertifikat.
3. Pengawasan keamanan PSAT dilakukan juga melalui kegiatan pendaftaran baik pendaftaran PSAT maupun pendaftaran rumah pengemasan (*packing house*). Pendaftaran PSAT dilakukan melalui mekanisme inspeksi sarana produksi dan distribusi, proses produksi dan distribusi serta pengujian produk terkait parameter keamanan pangan. Nomor pendaftaran PSAT diberikan kepada produk PSAT yang dinyatakan memenuhi persyaratan keamanan PSAT baik dalam proses maupun produk itu sendiri. Sedangkan pendaftaran rumah kemas dilakukan melalui penilaian secara simultan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP) pada unit yang melakukan pengemasan PSAT. Secara khusus pendaftaran rumah pengemasan merupakan respon terhadap kecenderungan peningkatan kebutuhan dan permintaan konsumen global terhadap PSAT yang aman dan bermutu. Pemenuhan standar dan kriteria penilaian rumah kemas secara konsisten oleh pelaku usaha/eksportir PSAT diharapkan dapat mengurangi risiko penolakan dan notifikasi produk PSAT dari negara tujuan ekspor. Sepanjang tahun 2019 diperoleh capaian pendaftaran PSAT maupun rumah pengemasan yaitu: 1405 nomor pendaftaran PSAT dan 43 rumah kemas.

SS 5. IKU 8 Rasio Kasus Komoditas Pertanian Impor yang Diselesaikan Terhadap Total Kasus Komoditas Pertanian Impor	
Target 40%	Realisasi 53,85%
% Capaian 134,62 % Sangat Berhasil	

Fungsi karantina adalah mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung pelaksanaan perkarantinaaan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2019 dibanding jumlah kasus yang dapat diselesaikan sampai tahap P21, yaitu pelimpahan kasus dari penyidik ke pengadilan. Batasan kasus yang dihitung pada indikator ini adalah kasus yang ditangani oleh PPNS Badan Karantina Pertanian dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{IKSS 8} = \frac{\text{Jumlah kasus yang dapat diselesaikan sampai tahap P21}}{\text{Jumlah kasus tahun berjalan dengan satu tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan data kasus pelanggaran perkarantinaaan dan penyelesaiannya sampai P21 selama tahun 2019 dihasilkan perhitungan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKSS 8} &= \frac{7}{13} \times 100\% \\ &= 53,85\% \end{aligned}$$

Penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaaan dimulai dari P-1 (Penerimaan Laporan) atau P-2 (Surat Perintah Penyelidikan) sampai dengan tahap P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyelidikan sudah Lengkap) dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Capaian penyelesaian kasus pertanian impor tahun 2019 adalah sebesar 53,85% melebihi target yang ditetapkan pada akhir jangka menegah sebesar 40%, sehingga dapat dikatakan terealisasi 134,62%. Capaian tersebut juga melebihi capaian tahun 2018 sebesar 43,59%.

Kasus komoditas pertanian ini pada umumnya dikarenakan pemilik atau penanggung jawab komoditas tidak melengkapi dokumen persyaratan karantina *Phytosanitary Certificate (PC)* atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dan *Animal Health Certificate (AHC)* atau Sertifikat

Kesehatan Hewan dari negara asal serta tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Pertanian. Kasus komoditas pertanian impor yang dapat diselesaikan disajikan **Lampiran 4**.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan:

1. Peningkatan kompetensi SDM Karantina Pertanian dalam bidang kewasdakan melalui *workshop* PPNS, Intelijen dan Polsus;
2. Dukungan TNI AD, TNI AL dan POLRI dalam pengawasan dan penindakan perkarantinaan melalui kerjasama yang tertuang dalam MoU;
3. Patroli bersama dalam rangka tindak lanjut perjanjian kerjasama dengan instansi terkait;
4. Penguatan kerja sama perkarantinaan secara regional melalui BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Phillipina) dan IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand *Growth Triangle*);
5. Peningkatan koordinasi kewasdakan regional dan nasional dengan instansi terkait penegakan hukum; dan
6. Tersedianya pedoman pelaksanaan pengawasan dan penindakan.

Untuk mempertahankan dan menunjang keberhasilan tahun mendatang dapat dilakukan:

1. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan pedoman kewasdakan;
2. Penguatan sinergitas petugas karantina dalam melaksanakan fungsi PPNS, intelijen dan pelaksanaan teknis perkarantinaan;
3. Peningkatan kualitas PPNS, Intelijen dan Polsus melalui pendidikan dan pelatihan kewasdakan;
4. Penguatan koordinasi dengan TNI-POLRI, BC, POS, Jasa Pengiriman dan pengembangan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam mendukung pengawasan dan penindakan perkarantinaan;
5. Pengembangan kerjasama bilateral perkarantinaan terkait wilayah perbatasan (PNG, Timor Leste, Malaysia);
6. Pengembangan kerjasama bilateral perkarantinaan (Jerman, China, Itali, Maroco, Turki, EU, Sudi Arabia, Rusia, RDTL, Azarbaizan, Bosnia, Peru, dan lain-lain);
7. Penguatan kerja sama perkarantinaan secara regional 38 anggota BIMP-EAGA (Brunai, Indonesia, Malaysia dan Phillipina) dan IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle);
8. Penguatan pengawasan berbasis data elektronik melalui aplikasi SIWASDAK yang terintegrasi dengan IQ FAST dan sertifikat elektronik (e-Cert);
9. Penderasan informasi perkarantinaan melalui media informasi Badan Karantina Pertanian dalam rangka kegiatan *Pre-emptif*; dan
10. *Update* layanan prioritas.

Sasaran Strategis 6 (SS 6)

STABILNYA HARGA KOMODITAS PERTANIAN STRATEGIS

Salah satu permasalahan di dalam pembangunan ketahanan pangan adalah distribusi pangan dari daerah sentra produksi ke konsumen yang belum optimal. Masalah jaringan distribusi pangan seringkali menjadi penyebab ketidaklancaran pasokan pangan khusus pada daerah-daerah defisit pangan yang wilayahnya sulit dijangkau. Jaringan distribusi dan perdagangan antar pulau menjadi sangat penting perannya dalam perdagangan hasil pertanian, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Kondisi ini tentu akan memicu terjadinya gejolak harga pangan.

Dinamika harga pangan sangat penting untuk dimonitor setiap saat mengingat stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor pendukung kemudahan akses pangan masyarakat. Harga pangan juga merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian dan berkontribusi terhadap inflasi. Gangguan ketersediaan, pasokan dan harga pangan strategis dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan nasional. Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam negeri sehingga aksesibilitas mIKU asyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan pangan.

Keberhasilan dari pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator Koefisien Variasi (CV) Harga Komoditas Pertanian Strategis Nasional. Komoditas pertanian strategis nasional yang perlu dimonitor meliputi beras, jagung pipilan kering, kedelai biji kering, bawang merah, cabai, daging sapi, dan gula pasir.

SS 6. IKU 9 Koefisien Variasi Harga Komoditas Pertanian Strategis Nasional (CV)	
Target 10-30 CV	Realisasi 7,85 CV (<i>Minimize target</i>)
% Capaian 161 % Sangat Berhasil	

Koefisien variasi (CV) harga pangan menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk setiap komoditas yang dipantau. Kondisi yang diharapkan adalah angka CV yang kecil karena semakin rendah angka koefisien variasi berarti kondisi harga pangan yang semakin stabil. Stabilitas harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen mencerminkan kondisi yang mendekati kepada keseimbangan penawaran dan permintaan yang akan mendukung pemantapan ketahanan pangan.

Rumus Koefisien Variasi Harga adalah sebagai berikut:

$$KV = S/X \times 100 \%$$

Dimana:

- KV = koefisien variasi
- S = simpangan baku
- X = rata-rata

Adapun simpangan baku merupakan standar deviasi dari x_1, x_2, \dots, x_n , dengan penghitungan mengikuti rumus sebagai berikut:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Nilai rata-rata merupakan rata-rata harga yang nilainya diperoleh dari:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Target nilai CV harga komoditas pangan strategis nasional untuk tahun 2019 ditetapkan 10-30% (untuk komoditas beras, jagung, gula pasir, kedelai, daging sapi, maksimal 10%; bawang merah maksimal 25% dan cabai maksimal 30%). Untuk pengukuran kisaran target CV diantara 10-30%, maka dapat diambil angka tengah yaitu 20%. Capaian CV Harga Komoditas Pertanian Strategis Nasional tahun 2019 adalah sebesar 7,85% sehingga sesuai target yang ditetapkan sebesar 20% maka realisasinya mencapai 161% (*Minimize Target*).

Untuk mendukung pembangunan *data base* harga pangan, Kementerian Pertanian sejak tahun 2010 mulai mengembangkan model pemantauan data harga dan pasokan pangan melalui metode panel untuk mendukung perumusan kebijakan stabilisasi harga pangan. Dengan metode panel, dapat diperoleh data harga dan pasokan pangan yang mutakhir, sehingga dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak harga, terutama saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) dimana kebutuhan dan harga pangan cenderung mengalami peningkatan. Selain itu, diperoleh gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan dapat memprediksi kecenderungan harga pangan ke depan.

Kegiatan panel harga pangan tahun 2019 dilaksanakan di 34 provinsi dengan melibatkan enumerator sebanyak 1.022 orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan melaporkan data, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Pengiriman data dilakukan dengan menggunakan fasilitas pesan pendek (*Short Message Services/SMS*), *website* dan aplikasi Android. Berdasarkan hasil pemantauan harga pangan melalui Panel Harga Pangan BKP, perkembangan harga pangan selama tahun 2015-2019 di tingkat konsumen disajikan pada

Tabel 18 sebagai berikut.

Tabel 18. Perkembangan Harga Pangan Pokok dan Strategis Tingkat Konsumen Tahun 2015-2019

No	Komoditas	Harga (Rp/kg)					% Perubahan Harga				Fluktuasi/CV (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2015	2016	2017	2018	2019
1	Beras Medium	10,469	11,067	10,95	10.834	12.418	5.95	-0.85	-1.06	14,62	4,65	2,81	3,11	1,97	0,55
2	Jagung Pipilan Kering	6,448	6,904	7,123	6.210	7.054	9.21	3.08	-12.82	13,60	6,06	6,19	6,3	2,8	1,01
3	Kedelai Biji Kering	11,478	10,562	10,657	9.521	9.877	-7.01	0.47	-10.66	3,74	7,95	6,14	5,33	1,59	2,8
4	Cabai Merah Keriting	30,118	40,84	36,314	29.618	40.557	38.57	-9.68	-18.44	36,93	26,45	8,61	23,23	10,62	29,89
5	Bawang Merah	26,544	40,84	32,339	27.727	30.737	55.29	-20.95	-14.26	10,85	18,7	8,61	16,47	16,24	16,35
6	Daging Sapi	107,985	115,333	118,52	118.337	120.212	7.02	2.98	-0.15	1,58	4,17	2,59	2,22	0,93	0,97
7	Gula Pasir Curah	12,695	14,978	13,927	12.565	12.755	18.07	-7.07	-9.78	1,51	5,92	8,25	3,74	1,17	3,35
Rata-Rata CV											10,56	6,17	8,63	5,05	7,85

Sumber: Panel Harga BKP, 2019

Berdasarkan hasil analisis data harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen pada tahun 2015 - 2019, menunjukkan bahwa harga komoditas pangan pokok dan strategis mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, dengan kisaran peningkatan antara 1,51% - 36,93%.

Berdasarkan Tabel 18 dapat dilihat pula bahwa nilai koefisien variasi komoditas pangan pokok strategis di tingkat konsumen cenderung semakin menurun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Meskipun CV Tahun 2019 relatif lebih tinggi dibandingkan Tahun 2018, tetapi koefisien variasi komoditas pangan pokok strategis di tingkat konsumen ini berada di bawah target nilai CV yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa harga komoditas pangan pokok strategis di tingkat konsumen semakin stabil dari tahun ke tahun.

Dari Tabel 18 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 nilai koefisien variasi untuk komoditas pangan pokok, kacang-kacangan, dan pangan hewani di tingkat konsumen seluruhnya di bawah 5% (beras 0,55%, jagung pipilan kering 1,01%, kedelai biji kering 2,80%, daging sapi 0,97%, dan gula pasir 3,35%). Sementara untuk komoditas bawang merah dan cabai merah selama tahun 2019 juga stabil dengan angka koefisien variasi di bawah target yang ditetapkan, yaitu bawang merah 16,35% (di bawah 25%) dan cabai merah 29,89% (di bawah 30%). Komoditas hortikultura merupakan komoditas pertanian yang memiliki tingkat fluktuasi harga cukup tinggi jika dibanding subsektor pertanian lainnya. Hal ini disebabkan karena produksinya lebih rentan terhadap cuaca dan serangan OPT.

Stabilnya harga pangan pada tahun 2019 ini tidak terlepas dari upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan yang secara berkesinambungan telah dilaksanakan Kementerian Pertanian sejak tahun 2015. Beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian antara lain:

1. Pengembangan Toko Tani Indonesia

Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan kegiatan pemberdayaan lembaga usaha pangan masyarakat (Gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan) dalam melayani Toko Tani Indonesia (TTI). Pada tahun 2019, terdapat sebanyak 1.154 lembaga usaha pangan masyarakat yang tersebar di seluruh

Indonesia yang menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis serta memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas, dengan harga yang wajar. Sebanyak 1.412 TTI lokal di tahun 2019 melakukan terobosan untuk solusi permanen melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) menyerap produk pertanian, (2) memperpendek rantai distribusi pemasaran, dan (3) memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat, bahkan di beberapa provinsi untuk optimalisasi pasokan komoditas pangan melalui program *e-commerce* dari gapoktan langsung ke TTI. Selain TTI, terdapat Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang merupakan lembaga yang bertugas untuk membantu kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Di tahun 2019, terdapat sebanyak 20 TTIC di 20 provinsi di Indonesia.

2. Gelar Operasi Pasar Murah

Dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang rentan mengalami fluktuasi. Kementerian Pertanian melakukan intervensi untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui gelar pasar murah. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan harga pangan agar tidak mengalami kenaikan.



Gambar 16. Mentan Gelar Operasi Pasar Murah Cabai di Surakarta

Sasaran Strategis 7 (SS 7) DIMANFAATKANNYA INOVASI TEKNOLOGI

Dalam konteks pembangunan pertanian, penelitian merupakan salah satu faktor yang penting bagi kemajuan pertanian secara umum, baik dalam sisi perubahan perilaku petani, peningkatan produksi, efektivitas dan efisiensi usaha tani bahkan ketepatan sasaran dan kebijakan pemerintah terkait dengan pertanian pun tergantung dari sejauh mana kemajuan penelitian di suatu negara.

Pertanian di Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan-persoalan mendasar seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan permintaan pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan pembibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, serta masih rawannya ketahanan pangan dan energi. Dengan masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian, maka pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Peran penelitian menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan tersebut, terutama penyediaan benih dan bibit unggul bermutu, teknik budi daya yang lebih maju dan inovasi teknologi prosesing yang makin beragam yang dapat meningkatkan nilai tambah dan metode alih inovasi teknologi yang cepat dari teknologi yang tepat guna. Keberhasilan dari sasaran ini dapat diukur dari pencapaian indikator Rasio Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan (Akumulasi 5 Tahun Terakhir) terhadap Hasil Penelitian yang Dihasilkan (5 Tahun Terakhir).

SS 7. IKU 10 Rasio Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan (Akumulasi 5 Tahun Terakhir) terhadap Hasil Penelitian yang Dihasilkan (5 Tahun Terakhir)	
Target 70%	Realisasi 92,73%
% Capaian 132,47 % Sangat Berhasil	

Pengukuran realisasi indikator tersebut diperoleh dengan cara membandingkan hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir), atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (t-5 hingga t)}}{\sum \text{Hasil penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan (t-6 hingga t-1)}} \right) \times 100\%$$

Sesuai dengan proses bisnis penelitian dan pengembangan sampai pengguna, maka hasil penelitian dan pengembangan perlu didiseminasikan untuk dimanfaatkan. Pengukuran dilakukan melalui kompilasi data hasil penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan lingkup Badan Litbang Pertanian mulai dari tahun 2013-2018 serta kompilasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan lingkup Badan Litbang Pertanian dari tahun 2014-2019. Diseminasi dapat berupa: karya ilmiah, gelar teknologi, penyuluhan dan temu bisnis. Capaian IKU rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir) (persen) sebesar 96,74%, atau sebesar 138,20% dari target yang ditetapkan (sangat berhasil). Rincian jenis penelitian terlihat dalam Tabel 19.

Tabel 19. Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dan Didesiminasikan Selama 5 Tahun

No	Unit Kerja	IKU	Realisasi IKU
1	PUSLITBANGTAN	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Tanaman Pangan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	18
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Tanaman Pangan yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	20
2	PUSLITBANGBUN	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Tanaman Perkebunan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	96
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Tanaman Perkebunan yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	96
3	PUSLITBANGHORTI	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hortikultura yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	230
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hortikultura yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	230
4	PUSLITBANGNAK	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	50
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	50
5	BBSDLP	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BBSDLP yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	1055
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BBSDLP yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	1055
6	BBP MEKTAN	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BBP Mektan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	20
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Mektan yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	20
7	BBIOGEN	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BB Biogen yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	18
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BB Biogen yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	18
8	BB PASCAPANEN	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan paspa yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	55
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan paspa yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	86
9	BBP2TP	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BBP2TP yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	1074
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan BBP2TP yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)	1246
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)			2.616
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang didesiminasikan (t-6 sampai dengan t-1)			2.821
Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir) (persen)			92,73

Sumber: Badan Litbang Pertanian, 2019

Capaian indikator Rasio Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) Terhadap Hasil Penelitian yang Dihasilkan (5 tahun terakhir) pada tahun akhir pembangunan jangka menengah 2019 adalah sebesar 92,73%, atau sebesar 132,47% dari target yang ditetapkan (sangat berhasil). Capaian tahun 2019 ini meningkat 17,22% jika dibandingkan dengan rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan dan didesiminasikan pada tahun 2018 sebesar 113,01%. Beberapa hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan selama 5 tahun terakhir dan hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan selama 5 tahun diantaranya untuk komoditas strategis Kementerian Pertanian yaitu : **padi, jagung, kedelai, bawang merah dan ayam Sensi-1 Agrinak** seperti di bawah ini:

1. Padi

Varietas Inpari 42 Agritan GSR dan Inpari 43 Agritan GSR yang dilepas tahun 2016 merupakan salah satu varietas padi unggulan Balitbangtan yang cukup diminati oleh petani di Indonesia. Varietas ini memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut: 1) memiliki potensi hasil sekitar 10 ton/hektar (ha) pada kondisi uji multi lokasi, 2) mampu mengurangi penggunaan input seperti pestisida, pupuk kimia, dan air, 3) mampu berproduksi tinggi dalam kondisi sub-optimum, seperti kekeringan dan banjir (amphibi), dan 4) memiliki ketahanan dalam menghadapi serangan hama wereng yang kerap datang.



Gambar 17. Inpari 42 agritan GSR dan Inpari 43 agritan GSR

2. Jagung (Nakula Sadewa 29)

Jagung Hibrida Nakula Sadewa (NASA) 29 telah didiseminasikan kepada masyarakat mulai tahun 2016 dalam skala luas. Petanipun dengan cepat mengadopsi jagung tersebut walaupun varietas jagung hibrida NASA 29 ini baru dilepas dengan SK Mentan pada tahun 2017. Keunggulan dari varietas ini dibandingkan varietas lainnya yaitu: 1) mempunyai penampilan yang sangat menarik dimana kelobot tertutup rapat sehingga jika panen saat kondisi hujan, air hujan tidak mudah masuk ke tongkol yang dapat menyebabkan biji berkecambah, 2) warna biji jagung oranye terang cerah dan menarik, sangat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pedagang atau pembeli jagung di pasaran. Diharapkan NASA 29 dapat menjadi solusi untuk menurunkan harga benih jagung hibrida yang relatif mahal di tingkat petani dan meningkatkan produktivitas jagung nasional.



Gambar 18. Jagung Hibrida NASA 29

3. Kedelai (Biosoy 1 dan 2)

Varietas kedelai Biosoy 1 dan 2 merupakan varietas unggul yang diharapkan jika ditanam di seluruh Indonesia selama dua tahun, Indonesia dapat berswasembada kedelai sendiri. Keunggulan dari varietas ini adalah merupakan kedelai biji besar dengan potensi hasil hingga 3,55 ton per hektar dan memiliki stabilitas hasil yang luas di berbagai lokasi pengujian. Kelebihan lain dari kedelai ini adalah toleran penyakit karat serta memiliki ukuran batang yang besar dan kokoh yang dicirikan oleh diameter batang yang lebar.



Gambar 19. Kedelai Biosoy 1 dan 2

4. TSS Bawang Merah (TSS Agrihort 1 dan 2)

Varietas bawang merah ini dihasilkan dari teknologi penanaman menggunakan biji bawang merah (tidak dari umbinya). Beberapa keunggulan dari varietas bawang merah Agrihort 1 diantaranya adalah: 1) biaya transportasi lebih murah karena berbentuk biji, 2) benih bisa lebih lama disimpan dalam gudang penyimpanan (maksimal dua tahun) selama tidak terkena sinar matahari dan 3) biaya produksi jika bawang merah dipanen dalam bentuk bawang siap konsumsi menjadi lebih rendah. Dua varietas ini dilepas pada tahun 2015. Perbedaan dari dua varietas ini salah satunya adalah toleran terhadap penyakit dan curah hujan yang tinggi.



Gambar 20. TSS bawang Merah Agrihort 1 dan 2

5. Ayam SenSi-1 Agrinak

Galur ini merupakan varietas unggulan Balitbangtan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan bibit ayam lokal unggul. Galur ini merupakan varian lanjutan dari ayam KUB.



Galur [SenSi-1 Agrinak](#) akan menghasilkan ayam lokal pedaging berbobot 800-1.000 gram untuk usia 70 hari. Ayam ini juga relatif lebih tahan penyakit.

Galur [SenSi-1 Agrinak](#) merupakan merupakan salah satu galur murni (*pure line*) ayam lokal pedaging unggul. Ayam ini dapat dimanfaatkan sebagai ayam niaga (*final stock*) dan atau ayam tetua (*parent stock*). Terdapat dua varian bulu yaitu Sensi-1 Agrinak Bulu Abu dan Sensi-1 Agrinak Bulu Pucak (Putih bercak hitam). Galur ini dilepas pada tahun 2017 oleh SK Menteri Pertanian. Analisis ekonomi 95 ekor ayam SenSi-1 Agrinak sebagai unggas pedaging

mempunyai nilai keuntungan mencapai Rp630.000 (harga rata-rata ayam Rp40.000/ekor) dengan perbandingan antara penerimaan dengan biaya usaha sebesar 1,2. Artinya setiap penambahan biaya pengeluaran sebesar Rp1 akan memberikan penerimaan sejumlah Rp1,20.

Tercapainya kinerja sasaran IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain:

- Diterapkannya *monitoring* dan evaluasi kegiatan secara periodik, mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik;
- Sarana dan prasarana penelitian serta sumber daya anggaran cukup memadai untuk mendukung kegiatan penelitian, seperti laboratorium, perpustakaan, pengolahan data, jaringan internet, dan lain-lain;
- Tata kelola yang selaras dengan standar manajemen ISO 9001:2008 sebagai acuan

pelaksanaan manajemen, SNI ISO/IEC 17025:2008 untuk laboratorium, dan manajemen penelitian Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) untuk meningkatkan mutu hasil litbang; dan

- d. Ketersediaan sumberdaya manusia, baik tenaga fungsional peneliti, teknisi litkayasa dan tenaga administrasi yang memadai.

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penelitian diantaranya adalah telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian maupun dengan Kementerian lain serta Pemerintah Daerah. Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sasaran Strategis 8 (SS 8)

TERSEDIA NYA INFRASTRUKTUR PERTANIAN YANG SESUAI KEBUTUHAN

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan Indonesia dan juga percepatan perekonomiannya. Kontribusi tersebut dalam hal penyerapan tenaga kerja, penyedia pangan, penyedia bahan baku, serta menambah pendapatan dan devisa negara. Dengan demikian pembangunan pertanian ini menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong pembangunan Indonesia secara menyeluruh.

Infrastruktur memiliki peranan vital dalam menyukseskan pembangunan pertanian. Ketersediaan infrastruktur dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang optimal akan memudahkan petani untuk mendapat hasil yang maksimal dari lahan pertaniannya. Petani akan lebih mudah dalam hal proses budi daya, akses sarana produksi, hingga pemasaran hasil pertaniannya. Jika semua hal ini terpenuhi maka tidak ada petani yang kurang sejahtera lagi dan nantinya akan mendorong pembangunan perekonomian negara secara menyeluruh.

Infrastruktur pertanian masih menjadi kendala dan penyebab ketertinggalan pertanian Indonesia sampai sekarang. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah infrastruktur pertanian yang kurang memadai dalam mendukung peningkatan hasil pertanian, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Indonesia kini tengah berbenah dalam memperbaiki insfrastruktur, termasuk juga infrastruktur pertanian. Kementerian Pertanian memiliki komitmen tinggi melalui pencanangan sejumlah program strategis dan kebijakan dalam rangka meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, terutama dalam hal infrastruktur pertanian.

Keberhasilan dari pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tiga indikator, yaitu: (1) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan; (2) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen); dan (3) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan.

SS 8. IKU 11 Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Terhadap Total Irigasi Tersier yang Dibutuhkan	
Target 33%	Realisasi 37,89%
% Capaian 114,82% Sangat Berhasil	

Ketersediaan air irigasi pertanian merupakan salah satu faktor determinan yang mempengaruhi produksi, sehingga penting dan strategis peranannya dalam menunjang keberhasilan usaha pertanian, terutama dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Ketersediaan air irigasi untuk proses produksi pertanian secara berkelanjutan diupayakan melalui pengelolaan secara partisipatif oleh kelembagaan kelompok tani/gapoktan dan P3A/GP3A baik secara langsung maupun tidak langsung yang diharapkan akan berdampak positif terhadap kinerja sistem produksi pertanian. Upaya menjamin ketersediaan air irigasi untuk pertanian dalam jangka panjang dan berkelanjutan harus dilakukan melalui strategi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi pertanian di tingkat usaha tani secara terintegrasi dengan sumber air dari jaringan primer dan sekunder.

Pengukuran realisasi indikator tersebut diperoleh dengan cara membandingkan realisasi rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan, atau dengan rumus:

$$x = \frac{\text{Total rehabilitasi jaringan irigasi}}{\text{Total rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{\alpha}{\beta} \times 100\%$$

x = Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan

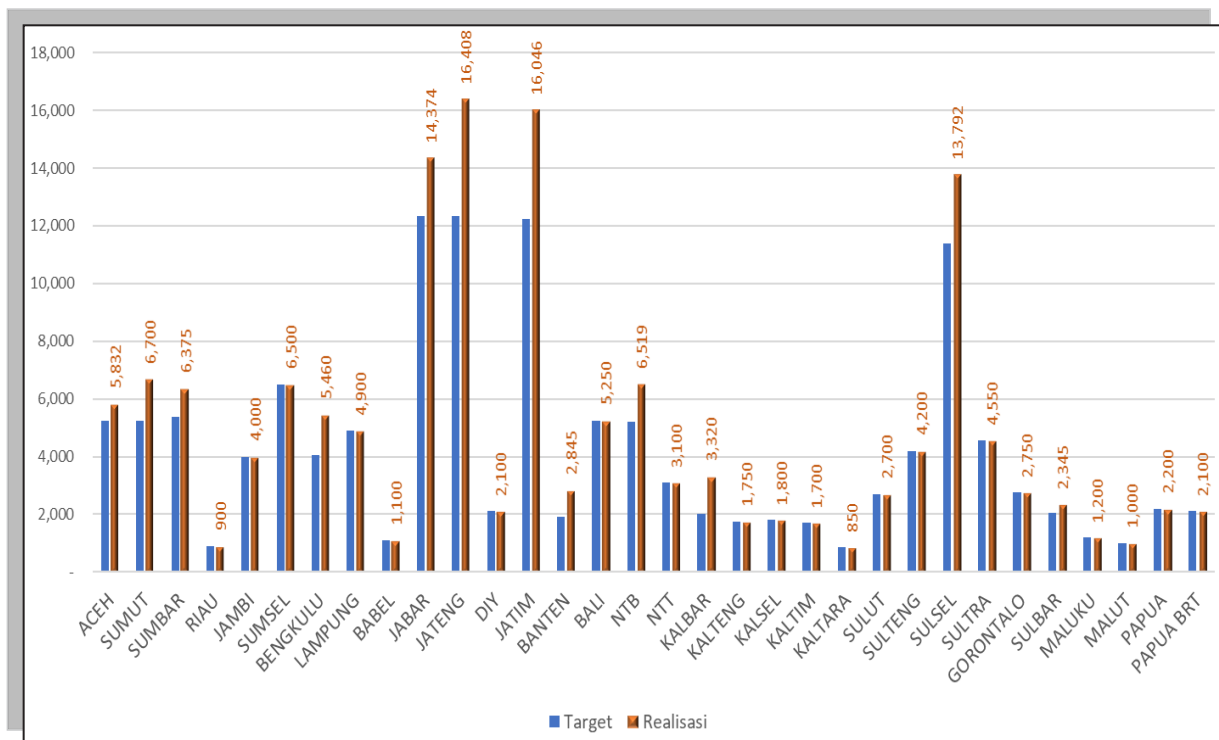
α = Realisasi rehabilitasi jaringan irigasi tersier (ha) tercapai

β = Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan/rusak

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah rehabilitasi irigasi tersier yang dilaksanakan pada tahun berjalan terhadap rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan. Jaringan tersier yaitu jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapannya. Rehabilitasi jaringan tersier merupakan kegiatan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula

sehingga dapat mempertahankan, menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP).

Pada tahun 2019, luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan di 32 Provinsi pada 340 kabupaten seluas 154.666 Ha (115,36%) dari target seluas 134.075 Ha. Capaian ini diperoleh dari kegiatan RJIT melalui Dana Tugas Pembantuan seluas 133.975 Ha dengan realisasi anggaran sebesar Rp 159.922.000.000,- dan dana Bantuan Pemerintah Pusat melalui kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur Irigasi seluas 20.691 Ha dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.944.734.000,- (sebaran atas pelaksanaan kegiatan RJIT dapat dilihat pada Gambar 21). Dengan demikian, capaian rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan, sebesar 37,89%. Pencapaian sebesar 37,89% diperoleh dari total pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian seluas 154.666 ha dibandingkan dengan jumlah jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan tahun 2019 sebesar 408.182 ha (mengacu pada data Direktorat Irigasi Pertanian dan KemenPUPR) sehingga bila dibandingkan dengan target sesuai Perjanjian Kerja sebesar 33%, pencapaian sasaran tahun 2019 sebesar 114,82%. Berdasarkan kriteria pengukuran keberhasilan capaian maka termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil". Keberhasilan pencapaian ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam periode selanjutnya.

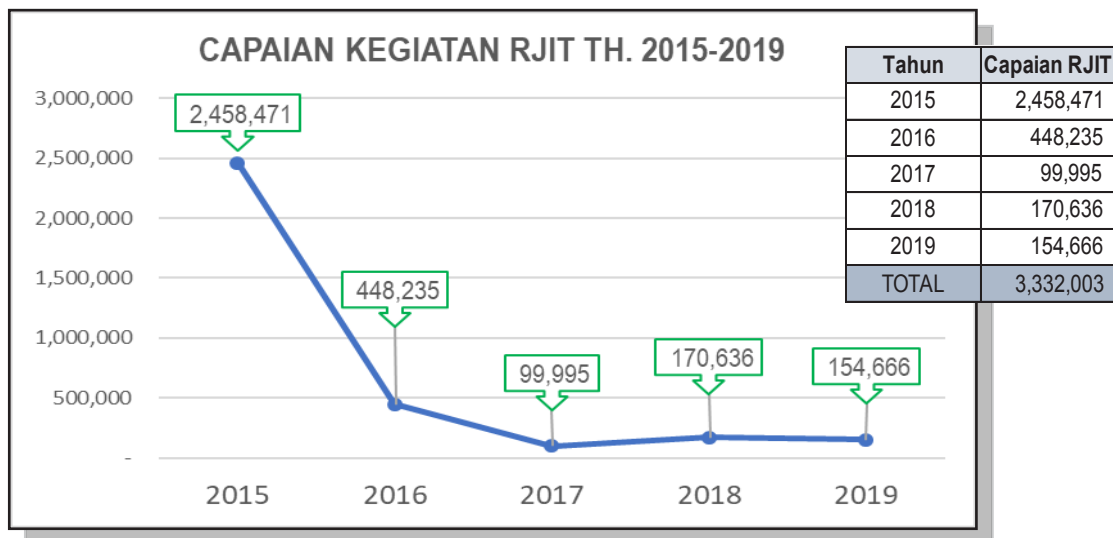


Gambar 21. Kegiatan RJIT Tahun 2019



Gambar 22. Kegiatan RJIT di Provinsi Sumatera Utara, Penerima Manfaat P3A Tirta Sari, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai seluas 300 Ha

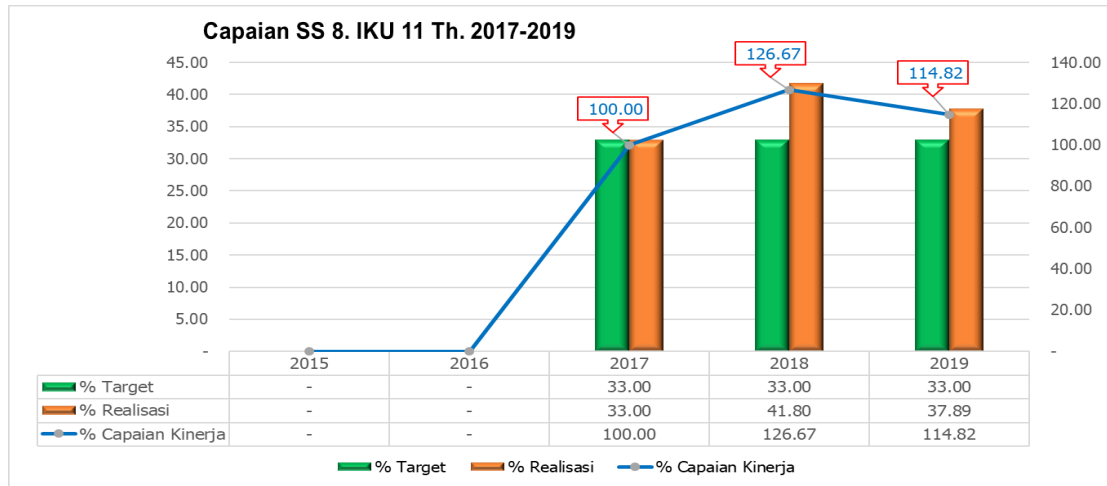
Dilihat dari pencapaian rehabilitasi jaringan irigasi tersier selama periode 2015-2019, maka sampai dengan Tahun 2019 telah dilaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi kegiatan seluas 3.332.003 Ha. Perkembangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier selama 5 (lima) tahun terlihat pada Gambar 23.



Gambar 23. Capaian Kegiatan dan Target RJIT Periode TA. 2015-2019

Apabila dibandingkan pencapaian rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan selama 5 tahun terakhir, maka dapat disampaikan bahwa yang dapat diukur adalah pencapaian tahun 2017 – 2019, hal ini dikarenakan perbedaan pengukuran indikator kinerja pada tahun 2015 dan 2016 dengan indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2017-2019 menyesuaikan revitalisasi Renstra Kementerian

Pertanian maupun Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dilakukan pada tahun 2017 dalam rangka perbaikan indikator kinerja sehingga diharapkan dapat memenuhi kriteria SMART (*specific*, measurable (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant*, dan *time-based* (tegang waktu) dimana pencapaian kinerja berada di atas 100%. Pencapaian rasio tersebut tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Gambar 24.



Gambar 24. Capaian Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Terhadap Total Irigasi Tersier yang Dibutuhkan 2015-2019

Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi (RJI) tidak lepas adanya peran kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di tingkat lapangan. Melalui partisipasi aktif kelembagaan petani pemakai air tersebut secara langsung atau tidak langsung, mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengelolaan irigasi. Selain itu, pelaksanaan program juga mampu meningkatkan rasa kebersamaan, gotong-royong dan rasa tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sarana irigasi yang dilakukan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan irigasi di tingkat usaha tani. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga berperan aktif untuk melakukan pembinaan kepada P3A dalam pengelolaan air irigasi, misalnya dalam bentuk fasilitasi pembelajaran untuk peningkatan kapasitas kelembagaan P3A yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pada TA. 2019, Direktorat Irigasi Pertanian, Ditjen PSP, Kementerian Pertanian telah melakukan pembinaan terhadap 50 P3A sesuai dengan tingkatannya, yaitu: P3A Belum Berkembang (Pemula); P3A Sedang Berkembang (Lanjut); dan P3A Sudah Berkembang (Madya dan Maju) yang bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan P3A yang kuat, mandiri, berkelanjutan, dan mengakar di masyarakat. Kegiatan pembinaan kelembagaan P3A pada TA 2019 dilaksanakan di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Probolinggo, Mojokerto dan Magelang. Dari hasil pembinaan tersebut, didapatkan data dan informasi sebanyak 50 profil kelembagaan P3A sesuai dengan klasifikasi P3Anya. Informasi profil P3A akan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan kegiatan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dipetak tersier, penentuan sasaran dan target produksi untuk pencapaian ketahanan pangan

nasional, dan peningkatan peran petani dalam Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) dalam kaitan pembinaan dan pemberdayaan P3A.

SS 8. IKU 12 Rasio Ketersediaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) Berdasarkan Kebutuhan (Pra Dan Pasca Panen)	
Target 68,4%	Realisasi 63,55%
% Capaian 92,90% Berhasil	

Pada era Pemerintahan Jokowi-JK, penerapan mekanisasi pertanian meningkat sangat banyak jumlahnya. Hal ini dapat terlihat dari terjadinya peningkatan indeks/level mekanisasi di Indonesia dari 0,22 hp/ha pada tahun 2015 menjadi 1,68 hp/ha pada tahun 2018. Penerapan mekanisasi pertanian dalam jumlah banyak ini telah memberikan hasil nyata dalam pertanian Indonesia saat ini. Dampaknya terjadi penghematan tenaga kerja sebanyak 70-80%, penghematan biaya produksi 30-40%, peningkatan produksi 10-20 %, dan penurunan kehilangan hasil saat panen dari 20% menjadi 10%.

Penggunaan mekanisasi pertanian dalam setiap aspek proses produksi merupakan bentuk transformasi pertanian modern dan mutlak harus dilakukan. Transformasi ke arah pertanian modern menjadi penting karena akan mendorong peningkatan produktivitas, efisien dalam penggunaan sumberdaya dan teknologi, serta mampu menghasilkan output yang berkualitas, bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Realisasi indikator Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Berdasarkan Kebutuhan (Pra dan Pasca Panen) diperoleh dengan cara membandingkan ketersediaan alat dan mesin pertanian terhadap total alat mesin pertanian yang dibutuhkan, atau dengan rumus:

$$x = \left[\frac{\sum \text{Alsintan Pra dan Pasca Panen yang tersedia}}{\sum \text{Alsintan Pra dan Pasca Panen yang dibutuhkan}} \right] \times 100\%$$

\sum Alsintan Pra dan Pasca Panen yang tersedia berasal dari:

- Data ketersediaan alsintan pra panen dari BB Mektan
- Jumlah alsintan pra dan pasca panen perkebunan serta hortikultura yang telah diberikan kepada petani pada tahun 2019.
- Jumlah alsintan pasca panen tanaman pangan yang sudah diadakan (dilakukan pengadaan, diedarkan/didistribusikan dan layak pakai).
- Jumlah alsintan pasca panen pangan hewani asal ternak yang dapat difasilitasi sampai dengan tahun 2019.

Σ Alsintan Pra dan Pasca Panen yang dibutuhkan berasal dari:

- Data pengajuan/target awal Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Tahun 2019 di Ditjen Hortikultura dan Ditjen Perkebunan.
- Data kebutuhan alsintan pra panen di Ditjen PSP (berasal dari BB Mektan) dan analisis kebutuhan alsintan pra panen di Ditjen TP.
- Data kebutuhan alsintan pasca panen pangan hewani asal ternak di Ditjen PKH.

Berdasarkan cara pengukuran di atas, realisasi indikator Rasio Ketersediaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) Berdasarkan Kebutuhan (Pra Dan Pasca Panen) adalah sebesar 63,56%. Capaian ini berasal dari ketersediaan alsintan sebesar 673.369 unit dibandingkan kebutuhan alsintan sebesar 1.059.641 unit. Jika dibandingkan target tahun 2019 sebesar 92,9% maka capaian indikator ini sebesar 92,92% atau berhasil.

Jenis alsintan yang dibutuhkan dan telah difasilitasi oleh Kementerian Pertanian antara lain traktor roda 2, pompa air, *rice transplanter*, traktor roda 4, *combine harvester*, *corn sheller*, *corn combine harvester*, *power thresher*, alat pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah serta alat pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya, alat pascapanen dan pengolahan produk perkebunan, serta Rumah Potong Hewan (RPH). Rincian jumlah ketersediaan dan kebutuhan alsintan pra dan pasca panen Tahun 2019 terlihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Alsintan Pra dan Pasca Panen Tahun 2017-2019

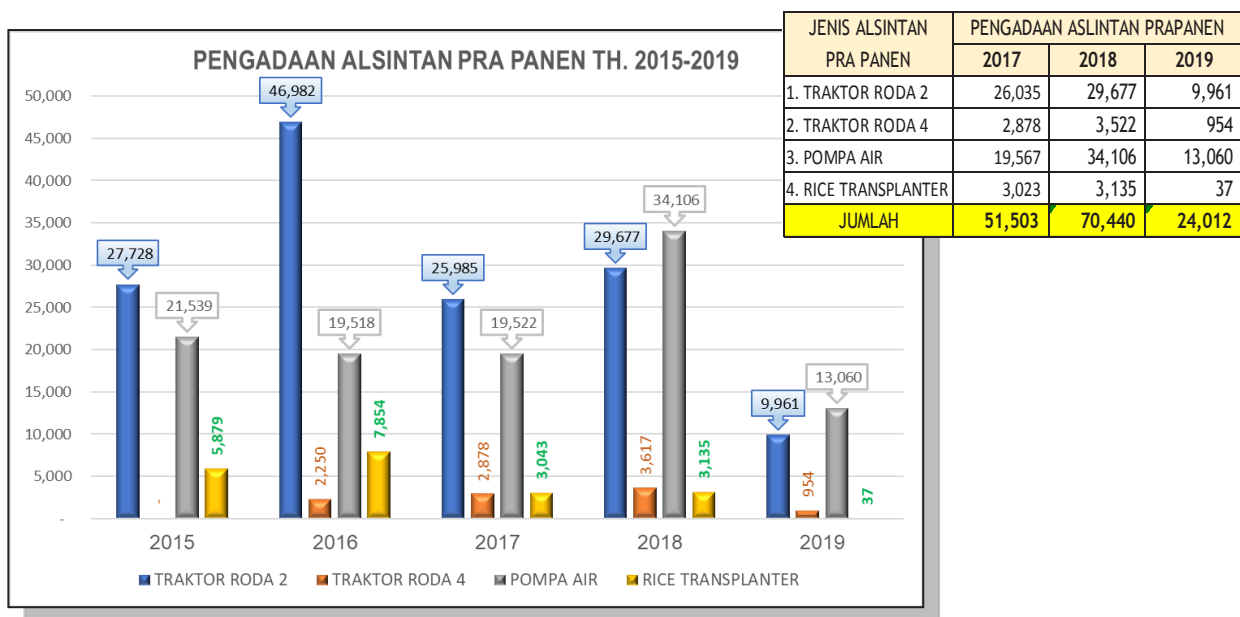
Jenis Alsintan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Kebutuhan (Unit)	Ketersediaan (Unit)	Kebutuhan (Unit)	Ketersediaan (Unit)	Kebutuhan (Unit)	Ketersediaan (Unit)
Alsintan Pra Panen						
Traktor Roda 2	449,590	288,125	456,163	293,077	463,358	274,678
Traktor Roda 4	9,366	6,166	9,503	6,817	9,653	4,262
Pompa Air	499,544	377,317	506,848	393,645	514,842	374,396
Rice Transplanter	49,954	11,624	50,685	11,779	51,484	8,687
Alsintan Pasca Panen						
Combine Harvester	449,590	4,276	54,316	18,323	1,626	907
Corn Sheller	9,366	2,258	75,439	13,027	5,534	3,087
Corn Combine Harvester Besar	499,544	126	39,389	1,216	583	325
Power Thresher Multiguna	49,954	868	133,672	18,759	11,428	6,375
Alat pasca panen horti	197	195	60	60	404	263
Alat pascapanen Kakao	3	3	4	3	0	0
Alat pascapanen Kopi	69	69	71	71	22	22
Alat pascapanen Lada	6	6	6	6	6	6
Alat pascapanen Pala	16	16	9	9	9	9
Alat pascapanen Cengkeh	14	14	15	15	6	6
Alat pascapanen Karet	96	96	42	42	39	39
Alat pascapanen Kelapa	15	15	16	16	20	20
Alat pascapanen Tembakau	0	0	0	0	4	4
Fasilitasi pengolahan Cokelat	2	2	5	5	3	3
Fasilitasi pengolahan Gula Tebu	8	8	2	2	0	0
Fasilitasi pengolahan Karet	21	21	24	24	19	19
Fasilitasi pengolahan Kelapa	25	23	18	18	33	33
Fasilitasi pengolahan Kopi	21	21	28	28	39	39
Fasilitasi pengolahan Sagu	-	-	6	6	6	6
Fasilitasi pengolahan Atsiri	3	3	1	1	3	3
Fasilitasi pengolahan Aren	-	-	2	2	1	1
Fasilitasi pengolahan Nilam	-	-	4	4	1	1
Fasilitasi tempat pemotongan hewan kurban dan untuk RPH	519	170	519	176	519	178
TOTAL PERTANIAN	2,017,923	691,422	1,326,847	757,131	1,059,641	673,369
Rasio Ketersediaan Alsintan	34.26		57.06		63.55	

Sumber: BB Mektan Pertanian, Ditjen PSP, Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen PKH, 2019

Keberhasilan pencapaian indikator Rasio Ketersediaan Alat Dan Mesin Pertanian (Alsintan) Berdasarkan Kebutuhan (Pra Dan Pasca Panen) didukung oleh pelaksanaan fasilitasi bantuan alsintan, antara lain:

1. Fasilitasi Alsintan Pra Panen

Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan atau penyaluran bantuan alsintan berupa traktor roda 2, pompa air, *rice transplanter*, traktor roda 4 dan jenis alsintan lainnya sesuai kebutuhan di lapangan (Gambar 25). Alokasi alsintan pada tahun 2019 adalah sebanyak 24.012 unit alsintan senilai Rp814.590.374.000,-



Gambar 25. Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Tahun 2015-2019



Gambar 26. Pemberian Bantuan Alsintan Traktor Roda 2 kepada Poktan Tana Tanre Kabupaten Bone, Prov. Sulawesi Selatan dan Pompa Air kepada Brigade, Kabupaten Bone, Prov. Sulawesi Selatan

Penyediaan Alsintan Pra panen sebagaimana pada Gambar 26, adalah pengadaan alsintan yang dilakukan melalui Dana APBN yang disediakan melalui Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Penyediaan Alsintan tahun 2019 menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan anggaran APBN, sedangkan ketersediaan sesuai SS. 8 IKU 12 (Alsintan Pra Panen) adalah Alsintan Pra Panen sesuai data yang tersedia di BB Mektan (Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian) dan Penyediaan oleh Direktorat Jenderal PSP.

Ketersediaan Alsintan pra panen di lapangan dari tahun 2017 sd tahun 2019 mengalami peningkatan dan penurunan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : kondisi alsintan yang sudah tidak bisa digunakan atau mengalami kerusakan akibat pemanfaatan dan keterbatasan pendataan oleh unit kerja yang melakukan pendataan alsintan pra panen.

2. Fasilitas Alsintan Pasca Panen Produk Tanaman Pangan

Alsintan yang disediakan dari tahun ke tahun secara umum mengalami peningkatan. Jenis alsintan yang tersedia dan paling banyak dibutuhkan antara lain *Power Thresher* dan *Power Thresher Multiguna*, *Corn Sheller*, dan *Combine Harvester*. Rincian alsintan yang tersedia Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Rincian Alsintan yang Tersedia Tahun 2015-2019

NO.	JENIS ALSINTAN	TAHUN					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Combine Harvester Kecil	3,060	6,294	789	130	100	10,373
2	Combine Harvester Sedang	-	2,884	853	178	130	4,045
3	Combine Harvester Besar	125	428	2,634	834	611	4,632
4	Vertical Dryer Padi	166	5	17	650	107	945
5	Vertical Dryer Jagung	236	1	5	65	18	325
6	Power Thresher	-	3,103	319	3,428	3,616	10,466
7	Power Thresher Multiguna	1,655	6,500	868	2,269	2,759	14,051
8	Corn Sheller	2,220	6,276	2,258	2,205	3,087	16,046
9	Corn Combine Harvester	25	177	126	535	325	1,188
10	Combine Harvester Multiguna				265	66	331
11	Rice Milling Unit	1,142	-	31	115	199	1,487
12	Dryer					136	136
13	Color Sorter					3	3
TOTAL		8,629	25,668	7,900	10,674	11,157	63,889

Sumber: Ditjen TP, 2019

Alokasi Fasilitas Alsintan Pasca Panen Tanaman Pangan Tahun 2019 sebanyak 11.139 unit dengan pagu Rp842.352.542.000,- dengan realisasi fisik penyaluran adalah 11.157 unit (100,16%) dan serapan anggaran sebesar Rp773.399.177.196 (91,77%).

3. Fasilitas Alsintan Pasca Panen Produk Hortikultura

Alat dan mesin pertanian pasca panen hortikultura yang difasilitasi pada tahun 2019 adalah bangsal pasca panen dan alat mesin pasca panen untuk komoditas cabai dan bawang merah serta komoditas hortikultura lainnya, seperti gerobak motor roda tiga, timbangan, gerobak dorong, troli, *blower*, terpal plastik, keranjang panen, palet kayu atau alat *packing*.

Target alat dan mesin pasca panen yang difasilitasi adalah sejumlah 263 unit yang terdiri dari alat pasca panen untuk cabai dan bawang merah sebanyak 150 unit dan untuk hortikultura lainnya sebanyak 113 unit. Seluruh alat dan mesin pasca panen telah didistribusikan dan dimanfaatkan oleh penerima sesuai target awal yang telah ditetapkan.

Kebijakan mendorong penanganan pasca panen diarahkan pada pembinaan dan bimbingan teknis serta dukungan fasilitasi bangsal pasca panen atau gudang pengering dan peralatan

pasca panen lainnya pada pengembangan kawasan, komoditas utama terutama cabai dan bawang dan jeruk serta komoditas yang potensi dan berorientasi ekspor maupun komoditas yang masif. Langkah operasional yang telah dilakukan antara lain fasilitasi peralatan pasca panen, pengadaan bangsal pasca panen, dan bimbingan teknis pasca panen.

4. Fasilitasi Alsintan Pasca Panen Produk Perkebunan

Untuk mendukung kinerja pencapaian target dari sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan melakukan kegiatan utama Dukungan Pengolahan dan Pemasaran melalui kegiatan : (i) pengembangan pasca panen komoditas perkebunan; (ii) pengembangan pengolahan hasil perkebunan; (iii) pengembangan penerapan standardisasi, mutu dan pembinaan usaha perkebunan; (iv) pengembangan pemasaran hasil perkebunan; dan (v) fasilitasi teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Fasilitasi alsintan pengolahan dan pasca panen komoditas perkebunan tahun 2019 dialokasikan sebanyak 211 unit dan terealisasi 100%.

5. Fasilitasi Alsintan Pasca Panen Pangan Hewani Asal Ternak

Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) merupakan salah satu mata rantai dalam penyediaan daging bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Namun keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitasi di daerah menyebabkan terbatasnya penyediaan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang diterima oleh suatu daerah, sehingga penjaminan daging ASUH belum optimal. Dalam rangka upaya penjaminan keamanan daging ASUH tersebut, maka diberikan bantuan anggaran pada RPH-R berupa pembangunan, renovasi dan fasilitasi peralatan. Bantuan tersebut juga digunakan untuk memfasilitasi tempat pemotongan hewan kurban.

Total kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) sebanyak 519 unit. Pada tahun 2019 bantuan penyediaan sarana prasarana Pemotongan Hewan Kurban diperuntukkan di 3 (tiga) lokasi yaitu Kota Tangerang Provinsi Banten, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun, yang dapat terealisasi sebanyak 2 (dua) unit di Masjid Uswatuh Khasanah Kota Tangerang Provinsi Banten dan Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Fasilitasi pemotongan hewan kurban di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terealisasi karena terkendala izin dari Pemerintah Daerah. Jadi total alat dan mesin pertanian (pasca panen pangan hewani asal ternak) yang terealisasi hingga 2019 sebanyak 178 unit.

Kondisi saat ini menunjukkan masih banyak sarana prasana di RPH maupun lokasi pemotongan hewan kurban belum memenuhi syarat, sehingga tidak ada jaminan terhadap keamanan dan kelayakan daging yang akan dikonsumsi. Dalam penyediaan sarana dan prasarana tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, namun adanya keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitasi di daerah menyebabkan terbatasnya penyediaan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang diterima oleh suatu daerah, sehingga penjaminan daging ASUH belum optimal. Di satu sisi keberadaan RPH merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sementara kemampuan daerah untuk fasilitasi RPH tersebut masih sangat terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mengalokasikan bantuan pembiayaan untuk pelaksanaan fungsi tersebut melalui

alokasi dana Fasilitasi RPH berupa fasilitasi peralatan dan fasilitasi bangunan melalui sumber dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus. Alokasi Tugas Pembantuan sendiri telah dihilangkan sejak tahun 2018 dan DAK RPH juga sudah dihapus sejak tahun 2019. Oleh karena itu, perlu kembali dibahas bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari alternatif lain sumber pembiayaan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana RPH.

Berbagai upaya strategis yang dilakukan dalam rangka perbaikan atas kinerja penyediaan alsin antara lain:

- a. Melaksanakan manajemen penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Melaksanakan pengembangan alsintan melalui optimalisasi penggunaan alsintan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kualitas semua sumber daya termasuk sumber daya tenaga kerja.
- c. Memberdayakan petugas pengawas melalui peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penyediaan sarana pendukung.
- d. Memberdayakan kelembagaan UPJA dan bengkel Alsintan melalui peningkatan kompetensi SDM, organisasi dan bisnis serta penerapan inovasi teknologi di bidang alat dan mesin pertanian

SS 8. IKU 13 Rasio Luas Baku Lahan Pertanian yang Tersedia Terhadap Kebutuhan	
Target 96,83%	Realisasi 105,81%
% Capaian 109,27% Sangat Berhasil	

Dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting mengingat pertumbuhan pembangunan di segala bidang terutama industri dan pemukiman telah memberikan pengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi karena alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Realisasi indikator Rasio Luas Baku Lahan Pertanian yang Tersedia Terhadap Kebutuhan diperoleh dengan cara membandingkan luas baku lahan pertanian dengan kebutuhan luas baku, atau dengan rumus:

$$x = \left[\frac{\text{Luas baku lahan pertanian}}{\text{Luas baku lahan sesuai kebutuhan}} \right] \times 100\%$$

x = rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan

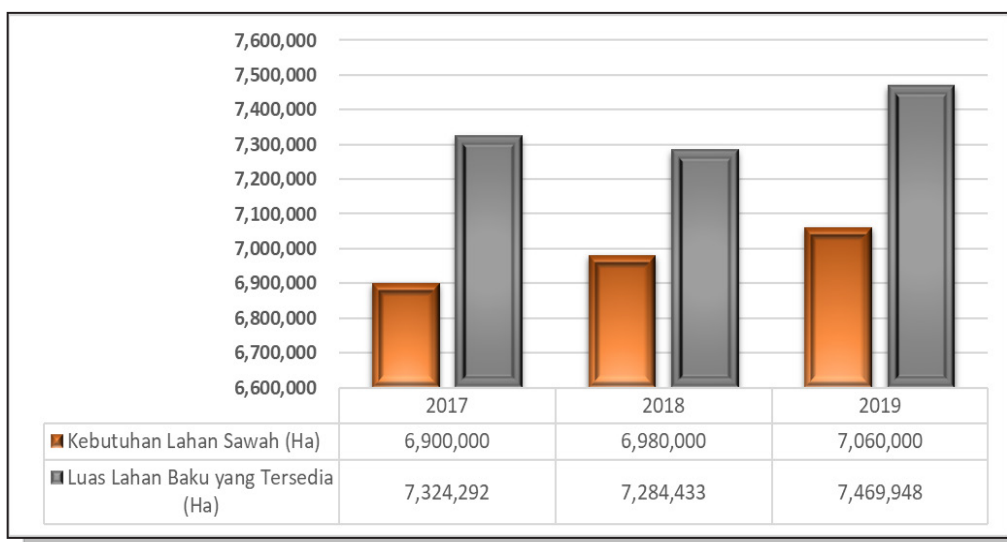
Lahan pertanian sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

Pengukuran atas lahan pertanian dibatasi pada lahan sawah karena lahan sawah merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan yang sangat strategis dan merupakan sumber daya utama untuk memproduksi pangan pokok utama bagi masyarakat Indonesia.

Mengacu pada dasar pemikiran diatas, Luas baku lahan pertanian yang digunakan sebagai dasar penghitungan IKU 13 adalah Luas Baku Lahan Sawah, yang diperoleh berdasarkan data Luas Baku Sawah (LBS) 2019 dan kegiatan cetak sawah tahun 2019.

Luas baku lahan sawah berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 339/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 menetapkan luas lahan baku sawah sebesar 7,1 juta Ha, pada tahun 2019 Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN menyepakati satu data lahan baku sawah sehingga perbaikan data luas baku lahan sawah menjadi salah satu fokus Kementerian Pertanian. Usulan atas pemutakhiran data luas baku lahan sawah telah disampaikan Kementerian Pertanian untuk mendapatkan validasi pihak Kementerian ATR/BPN selaku wali data dan sebagaimana hasil sinergi data pertanian tersebut, sesuai Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 koreksi atas luas baku lahan sawah menjadi sebesar 7.463.948 Ha.

Dengan memperhitungan luas baku lahan sawah sebesar 7.469.948 Ha dan realisasi kegiatan perluasan sawah sebesar 6.000 Ha maka total luas baku lahan sawah menjadi sebesar 7.469.948. Bila dibandingkan dengan Luas baku lahan sesuai kebutuhan berdasarkan asumsi yang dikeluarkan oleh Pusdatin sebesar 7.060.000 Ha maka berdasarkan rumus perhitungan, pencapaian indikator Rasio Luas Baku Lahan Pertanian yang Tersedia Terhadap Kebutuhan adalah 105,81% dan bila dibandingkan dengan target 2019 yang telah ditetapkan sebesar 96,83% maka pencapaian kinerja atas IKU 13 tersebut adalah sebesar 109,27%. Pengukuran SS 8 IKU 13 "Rasio Luas Baku Lahan Pertanian yang Tersedia Terhadap Kebutuhan" dapat disimpulkan termasuk kategori "**Sangat Berhasil**".



Gambar 27. Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Luas Baku Lahan Tahun 2018-2019

Berbagai upaya strategis yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja SS 8. IKU 13 “Rasio Luas Baku Lahan Pertanian yang Tersedia Terhadap Kebutuhan” adalah dengan arah kebijakan berikut:

1. Kebijakan yang terkait dengan Penyediaan Data Lahan yang dilakukan melalui koordinasi dengan Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional, serta Unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
2. Kebijakan yang terkait Perluasan Areal, dengan memperhatikan berbagai kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Sektor dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
3. Kebijakan yang terkait dengan Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan yang mengacu dan memperhatikan pada berbagai kebijakan lingkup Kementerian Pertanian, kebijakan subsektor Sumberdaya Air, kebijakan sektor Lingkungan Hidup serta kebijakan sektor Kehutanan, terutama dalam Konservasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Masyarakat.
4. Kebijakan yang terkait dengan Perlindungan Lahan meliputi berbagai kebijakan yang terkait dan terintegrasi dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian perencanaan lahan pertanian dalam kawasan peruntukan pertanian, mengacu pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta peraturan perundang-undangan sektor pertanian yang terkait.
5. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan serta otonomi daerah dalam rangka pembangunan perluasan dan pengelolaan lahan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Otonomi Daerah, sehingga semua rencana kegiatan

pembangunan dapat diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan perluasan dan perlindungan lahan, antara lain:

1. Perluasan Sawah

Perluasan areal sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Sasaran kegiatan cetak sawah tahun 2019 adalah sebesar 6.000 Ha yang dilaksanakan di 8 Provinsi dan 27 Kabupaten. (Gambar 28).



Gambar 28. Kegiatan Perluasan Sawah di Prov. Aceh, Penerima Manfaat Poktan Semangat Meugo, Ds. Sumber Harapan, Kec. Cot Glie, Kab. Merauke Seluas 14,8 Ha

2. Optimalisasi Lahan Rawa Tahun 2019

Dalam upaya memenuhi ambang baku kebutuhan lahan untuk produksi pangan, pilihan yang tersedia adalah membuka sawah di lahan rawa, baik di rawa pasang surut maupun rawa lebak, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan pengembangan kawasan pertanian sesuai Permentan Nomor 36 Tahun 2016 yang didasarkan pada: (1) kondisi biofisik wilayah, (2) kondisi sosial budaya masyarakat, (3) faktor produksi, dan (4) infrastruktur penunjang menjadi bagian dalam perencanaan pengembangan lahan rawa sebagai lumbung pangan.

Potensi lahan rawa yang cocok untuk pertanian lahan basah sekitar 14,18 juta hektar, dan sebagian besar sudah digunakan. Menurut BBSDLP (2015) lahan rawa pasang surut dan lebak yang berpotensi untuk perluasan lahan pertanian khususnya lahan sawah adalah sekitar 5,12 juta hektar. Dari luasan tersebut 1,19 juta hektar berada di kawasan APL, sekitar 1,18 juta hektar di kawasan HPK, dan 2,75 juta hektar berada di kawasan HP. Lahan berpotensi tersebut tersebar terutama di 3 pulau besar, yakni Kalimantan, Papua, dan Sumatera, serta beberapa di Sulawesi.

Sesuai dengan pedoman teknis optimasi rawa, maka target pengembangan pertanian lahan rawa adalah pada: (1) wilayah pasang surut maupun lebak yang sudah dibuka dan sudah dibudidayakan; (2) wilayah pasang surut dan yang sudah dibuka, tetapi terlantar (bongkor), dan (3) wilayah pasang surut dan lebak yang belum dibuka, tetapi direncanakan sebagai wilayah pengembangan baru. Pada tahun 2019 telah ditargetkan optimalisasi lahan rawa seluas 404.109 ha, dengan realisasi seluas 337.024,94 ha atau 81,50%.



Gambar 29. Kondisi Lahan Rawa Sebelum dan Setelah Dikelola

Semua komoditas disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lahan yang merupakan lahan rawa. Basis penataan kawasan pada pertanian di lahan rawa adalah pengendalian tata air, pola tanam yang tepat, dan penggunaan varietas unggul yang adaptif. Penataan air dilakukan dengan pola mini polder. Konsep mini polder merupakan pembagian polder besar (lebih luas dari 1.000 hektar) menjadi polder yang lebih kecil (50-100 hektar). Pembagian itu memudahkan pengelolaan air dan menekan biaya perawatan. Untuk pola tanam yang dilakukan adalah memanfaatkan amelioran yang tepat untuk mengatasi kemasaman lahan yang biasa terjadi pada lahan rawa. Amelioran yang digunakan dapat berupa kapur pertanian atau dolomit. Lahan yang telah diatasi kemasamannya akan membuat pemupukan menjadi lebih efektif, sehingga problem kesuburan yang biasa terjadi di lahan rawa dapat diatasi.



Gambar 30. Pekerjaan Normalisasi Saluran di Desa Lepinggeng, Kecamatan Belawa, Kab. Wajo seluas 626 Ha.



Gambar 31. Pekerjaan Normalisasi Saluran di Desa Lepinggeng, Kecamatan Belawa, Kab. Wajo seluas 626 Ha.

Optimalisasi lahan rawa pada tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka mendukung program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) dan menjadi salah satu kegiatan strategis Kementerian Pertanian yang diprioritaskan pada Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan dan dikembangkan juga di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Lampung. Keberhasilan program ini juga tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah (Pemda) yang cukup besar dalam mendukung kegiatan ini.

Sasaran Strategis 9 (SS 9) RASIO SERANGAN OPT DAN DPI TERHADAP LUAS TANAM

Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan diperlukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Keberadaan OPT di lapangan dan kondisi iklim harus selalu dipantau. Hasil pemantauan/pengamatan lapangan selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta langkah-langkah operasional di lapangan.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu: (1) Rasio Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam; dan (2) Rasio Wilayah yang Terbebas Dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis.

SS 9. IKU 14 Rasio Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam	
Target 11,05%	Realisasi 5,3% (<i>Minimize Target</i>)
% Capaian 151% Sangat Berhasil	

Realisasi indikator Rasio Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam diperoleh dengan cara membandingkan serangan OPT/DPI pada tahun berjalan terhadap luas tanam tahun berjalan, atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Luas serangan OPT dan DPI tahun berjalan}}{\sum \text{Luas tanam tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Luas serangan OPT dan DPI tahun berjalan diperoleh berdasarkan data luas serangan OPT dan DPI pada tahun berjalan yang menyebabkan gagal panen pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Permen No 6 tahun 1995). Perubahan Iklim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usaha pertanian, seperti banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Luas tanam tahun berjalan diperoleh berdasarkan luas tanam seluruh komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan pada tahun berjalan.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam adalah 5,3%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 11,05% maka tercapai 151% atau sangat berhasil. Rincian jumlah luas serangan OPT/DPI dan luas tanam sektor pertanian Tahun 2019 terlihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Rasio Luas Serangan OPT/DPI Sektor Pertanian Tahun 2019

Serangan OPT/DPI	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Luas Serangan (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Serangan yang dikendalikan (Ha)	Luas Serangan (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Serangan yang dikendalikan (Ha)	Luas Serangan (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Serangan yang dikendalikan (Ha)	Luas Serangan (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Serangan yang dikendalikan (Ha)	Luas Serangan (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Serangan yang dikendalikan (Ha)
Serangan OPT dan DPI Tanaman Pangan	1.236.367	20.389.367	1.236.367	997.159	23.744.648	997.159	905.228	23.440.349	905.228	713.482	24.231.750	713.482	958.764	17.966.765	1.096.539
Serangan OPT dan DPI Hortikultura	22.971	1.248.053	249.553	20.362	885.913	425.807	41.706	1.033.288	263.824	36.124	1.086.287	478.133	56.603	1.415.620	291.254
Serangan OPT dan DPI Perkebunan	681.379	11.995.208	36.413	670.529	12.124.539	7.584	109.265	11.945.184	1.000	544.155	11.999.063	8.525	621.003	11.505.902	7490
TOTAL PERTANIAN	1.940.718	33.632.628	1.522.333	1.688.050	36.755.100	1.430.550	1.056.199	36.418.821	1.170.052	1.293.761	37.317.100	1.200.140	1.636.370	30.888.287	1.387.793
RASTO LUAS SERANGAN OPT/DPI		5,77			4,59			2,90			3,47			5,30	

Sumber: Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, dan Ditjen Perkebunan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

1. Kegiatan perlindungan tanaman pangan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019, antara lain:
 - a. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)
Target kegiatan kegiatan PPHT padi, jagung, kedelai adalah 2.325 ha dan terealisasi sebesar 2.315 ha (99,57%).
 - b. Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI)
Target kegiatan kegiatan PPDPI adalah 500 ha dan terlaksana 100%.
 - c. Gerakan Pengendalian OPT
Target kegiatan Gerakan Pengendalian OPT adalah 21.705 ha dengan realisasi mencapai 21.277 ha (98,03%).
 - d. Dem Area Budi Daya Tanaman Sehat dan DPI
Target kegiatan Dem Area Budi daya Tanaman Sehat dan DPI adalah 100.000 ha dan terealisasi 99.823 ha (99,82%).
 - e. Sarana Pengendalian OPT
Target pengadaan pengendalian OPT adalah 3 paket (*Handsprayer*, Herbisida, Pestisida) dan terlaksana 100%.
 - f. Petani Pengamat
Target perekrutan petani pengamat adalah 726 orang dan terealisasi 100%.
 - g. Sarana Penanganan DPI (Bantuan Pompa)
Target Sarana Penanganan DPI adalah 800 unit pompa dan terealisasi 100%.
 - h. Bahan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)/Refugia
Kegiatan bahan perbanyak APH/refugia sebanyak 87 unit dengan realisasi 100%.
 - i. Perbanyak rumah burung hantu
Target dari kegiatan perbanyak rumah burung hantu sebanyak 225 unit dan terealisasi 100%.
2. Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Tahun 2019, telah berkontribusi terhadap pengamanan produksi hortikultura utama, melalui pengendalian

OPT, serta adaptasi atau mitigasi DPI dan Bencana Alam. Di samping itu produk hortikultura yang dihasilkan aman konsumsi dan berdaya saing baik di pasar domestik maupun internasional. Kegiatan perlindungan hortikultura yang dilakukan sepanjang tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Melakukan bimbingan teknis teknologi pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan sesuai dengan sistem PHT;
 - b. Melaksanakan Gerakan Pengendalian OPT cabai dan bawang merah dilaksanakan dengan menggunakan bahan dan cara pengendalian OPT yang ramah lingkungan, dengan melibatkan petani/keompok tani/PPAH dan Klinik PHT secara langsung;
 - c. Penguatan kelembagaan sistem perlindungan hortikultura khususnya pada Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) dan Klinik Pengendalian hama terpadu (PHT) yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam hal menyediakan teknologi pengendalian OPT yang spesifik lokasi, serta sebagai pusat pengembangan Agens Hayati;
 - d. Penerapan PHT (PPHT): Kegiatan PPHT merupakan salah satu metode penyebarluasan teknologi pengendalian OPT yang bersifat lokal dan ramah lingkungan. Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu (PHT) diawali melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT). Kegiatan PPHT dilaksanakan dalam siklus kegiatan mengalami, menganalisis, mengumpulkan, dan menerapkan. Prinsip PPHT adalah mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pengelolaan OPT berdasarkan prinsip-prinsip PHT / pengelolaan lingkungan. Pelaksanaannya dilakukan di lokasi pertanaman yang dibudi dayakan oleh kelompok tani atau peserta, selama satu siklus atau periode waktu budi daya hortikultura; dan
 - e. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam
Dalam rangka mengantisipasi penurunan ketersediaan hortikultura, diupayakan secara sistematis dan menyeluruh, menyangkut inventarisasi dan identifikasi wilayah rawan (banjir dan kekeringan) serta langkah antisipasi dan mitigasinya. Untuk itu, diperlukan fasilitasi sarana prasarana penanganan DPI yang dibutuhkan petani dalam mengantisipasi DPI;
 - f. Peningkatan kompetensi petugas perlindungan tanaman melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan petugas, magang, mengikuti seminar, lokakarya, gelar teknologi dan lain-lain.
3. Pengendalian OPT tanaman perkebunan diarahkan pada pusat-pusat serangan atau lahan perkebunan yang memiliki potensi sebagai sumber serangan dengan sasaran dapat terkendalinya serangan OPT dengan mendorong/membantu petani melakukan sendiri melakukan gerakan massal. Upaya yang dilakukan adalah melalui pendampingan dan bimbingan oleh petugas lapangan, sosialisasi tentang gerakan pengendalian OPT mandiri dan gerakan massal pengendalian OPT. Bahan yang digunakan dalam pengendalian OPT berupa APH/pupuk hayati, pestisida sintetis dan feromon. Serangan OPT yang masuk dalam gerakan masal adalah *oryctes* sp kelapa, PBKo kopi, hama uret

tebu, JAP karet & jambu mete, PBK & BBK kakao. Penerapan teknologi pengendalian OPT tanaman perkebunan dengan memadukan cara biologis, kimiawi dan mekanis.

- a. Luas areal tanaman perkebunan yang terserang OPT dan potensial terkena DPI 469.003 hektar dari luas areal tanaman perkebunan non kelapa sawit 12.684.082 hektar.
- b. Luas serangan OPT terkendali dan area DPI tertanggulangi 7.490 hektar yang terdiri tanaman kopi 2.300 hektar, kakao 2.000 hektar, kelapa 400 hektar, karet 150 hektar, tebu 400 hektar, pala 500 hektar, cengkeh 1.200 hektar dan lada 400 hektar.
- c. Kelompok tani penerima manfaat penanganan serangan OPT sejumlah 279.
- d. Pembangunan Demplot Mitigasi dan Adaptasi Rawan Kekeringan sebagai upaya dalam Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (DPI) dalam bentuk bantuan pembuatan rorak, embung, biopori, kambing, kandang dan rumah kompos berlokasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, DIY, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat.

Keberhasilan pengamanan produksi tersebut tidak terlepas dari peran Pengamat Hama Penyakit-Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PHP-POPT). PHP-POPT adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengamatan dan pengendalian OPT di wilayah pengamatannya. Wilayah kerja pengamatan PHP-POPT yaitu 1 (satu) kecamatan, namun saat ini mengingat keterbatasan jumlah PHP-POPT, menyebabkan 1 (satu) orang PHP-POPT merangkap 2 (dua) atau 3 (tiga) kecamatan.

Pengamatan bertujuan untuk mengetahui jenis dan kepadatan populasi OPT, luas dan intensitas serangan OPT, luas kerusakan akibat DPI, daerah penyebaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil pengamatan dianalisis untuk menentukan langkah-langkah penanggulangan OPT/DPI yang tepat. Pengamatan dan pengendalian secara dini oleh PHP-POPT inilah yang mendukung keberhasilan pengamanan OPT dan DPI.

SS 9. IKU 15 Rasio Wilayah Yang Terbebas Dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah Yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis	
Target 80,00%	Realisasi 78,07%
% Capaian 97,59% Berhasil	

Status kesehatan hewan dapat meningkatkan produksi pangan asal ternak serta peningkatan daya saing peternakan melalui kegiatan pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ). Status kesehatan hewan merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di masing-masing provinsi. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan

pembebasan PHMSZ khususnya lebih difokuskan pada penyakit Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza dan Hog Cholera atau yang sering dikenal dengan RABAH.

Realisasi indikator ini diperoleh dengan cara membandingkan wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis, atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Luas wilayah terbebas dari penyakit hewan menular strategis}}{\sum \text{total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} \right) \times 100\%$$

Penetapan daerah Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada tahun 2019 antara lain:

- Pembebasan *Rabies* di Pulau Makalehi, Buhias, Pahapa, Tagulandang, Ruang, Biaro Kepulauan Sitaro melalui SK Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/PK.320/M/7/2019 tanggal 2 Juli 2019.
- Pembebasan *Rabies* Provinsi Papua melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 600/Kpts/PK.320/M/7/2018 tanggal 2 Juli 2019.
- Pembebasan *Brucellosis* di Kabupaten Simeulue melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 438/Kpts/PK.320/M/07/2019 Tanggal 17 Juli 2019
- Pembebasan *Brucellosis* Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/PK.320/M/07/2019 Tanggal 17 Juli 2019.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis adalah 78,07%. Bila dibandingkan dengan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2019 sebesar 80% maka tercapai 97,50% atau berhasil.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang capaiannya sebesar 77,6% maka capaian tahun 2019 meningkat sebesar 0,64%. Perkembangan wilayah yang terbebas penyakit menular strategis tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Perkembangan Wilayah yang Terbebas Penyakit Menular Strategis Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah Wilayah yang Terbebas dari PHMS (lokasi)	394	436	470	474	477
Jumlah Wilayah yang Terdampak PHMS (lokasi)	611	611	611	611	611
Rasio (%)	64,48	71,36	76,92	77,58	78,07

Sumber: Ditjen PKH, 2019

Keberhasilan peningkatan capaian indikator ini didukung beberapa kegiatan antara lain: kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih difokuskan pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza* dan *Hog Cholera* atau yang sering dikenal dengan RABAH.

Meskipun demikian, kinerja rasio wilayah yang terbebas penyakit menular strategis ini belum mencapai target yang diharapkan. Wabah *Rabies* di Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, dan Kab. Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan penurunan jumlah provinsi bebas *Rabies* yang semula 9 (sembilan) provinsi menjadi 8 (delapan) provinsi. Berdasarkan fenomena tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan adalah melakukan investigasi dan meningkatkan surveilans dan monitoring Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), pemberian bantuan vaksin PHMS, pelaksanaan bimbingan teknis bagi petugas lapangan (petugas pusat layanan kesehatan hewan).

Sasaran Strategis 10 (SS 10)

MENINGKATNYA PENERAPAN PENGELOLAAN PERTANIAN TERPADU DI PEDESAAN

Sistem Pertanian Terpadu (SPT) merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktivitas lahan, program pembangunan dan konservasi lingkungan, serta pengembangan desa secara terpadu dan berkelanjutan. Penerapan sistem pertanian terpadu diperlukan suatu upaya untuk mendorong para petani dan kelembagaan petani melalui praktek bertani yang produktif, kompetitif, dan efisien serta mampu mempertahankan kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha sehingga mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok/kelembagaan petani.

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan petani lainnya.

Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian kesepuluh (SS.10) adalah Meningkatnya Penerapan Pengelolaan Pertanian Terpadu di Pedesaan yang keberhasilannya dapat diukur melalui

indikator kinerja Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional.

Cara mencapai target indikator kinerja SS.10 antara lain melalui kegiatan: (a) Sekolah Lapangan (SL) yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Daerah Irigasi melalui *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP), melalui Proyek *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative* (READSI); (b) Adaptasi Teknologi yang dilaksanakan di BPP, Pelatihan Pejabat Fungsional dan Pelatihan Non Aparatur, Pelatihan Penyuluh melalui Proyek IPDMIP, Pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen, dan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan oleh Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan); (c) Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya yang dilaksanakan di Pos Penyuluhan Pertanian Pedesaan (Posluhdes), pelatihan dan pemagangan di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), *Agrosociopreneur* dengan Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP).

SS 10. IKU 16 Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional	
Target 15%	Realisasi 15,09%
% Capaian 100,62% Sangat Berhasil	

Pencapaian indikator kinerja ini diukur melalui perbandingan kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Kelembagaan petani yang telah menerapkan sistem pertanian terpadu}}{\sum \text{total kelembagaan petani di Indonesia}} \right) \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut bahwa jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu diperoleh dari jumlah poktan yang telah mengikuti kegiatan Sekolah Lapangan (SL), Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita, Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya. Sedangkan jumlah total kelembagaan petani merupakan jumlah poktan nasional pada tahun 2018 yang terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Perhitungan capaian indikator Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional adalah:

$$x = \frac{92.092}{588.637} \times 100\% = 15,64\%$$

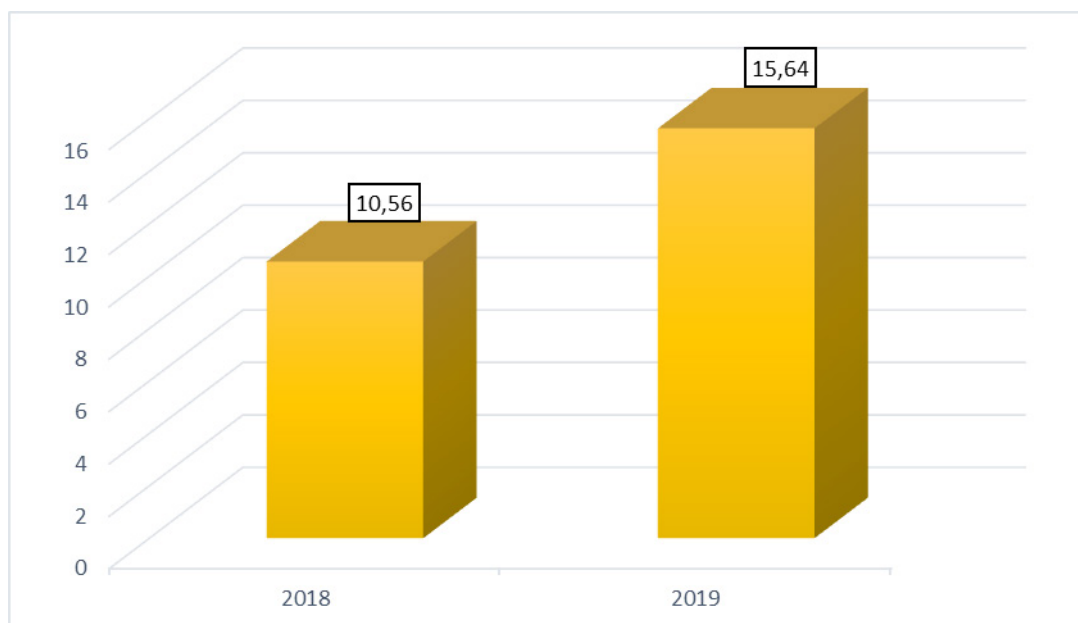
Secara rinci jumlah poktan yang menerapkan sistem pertanian terpadu terlihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Jumlah Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Tahun 2019

URAIAN		JUMLAH
Jumlah Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu (Poktan)		92.092
a.	Σ poktan yang mengikuti kegiatan SL	62.090
-	Sekolah Lapangan	46.500
-	IPDMIP	14.589
-	READSI	1.001
b.	Σ poktan yang mengikuti kegiatan adaptasi teknologi spesifik lokalita	14.566
-	Pusluh	1.700
-	Pelatihan pejabat fungsional	5.432
-	IPDMIP	3.560
-	Pelatihan teknis non aparatur	1.804
-	Pengabdian kepada masyarakat	860
-	PKL mahasiswa polbangtan	1.210
c.	Σ Tumbuh kembang penyuluh swadaya	15.436
-	Posluhdes	14.000
-	P4S	936
-	Agrosociopreneur (PWMP)	500
Jumlah Poktan Nasional (berdasarkan SIMLUHTAN)		588.637
RASIO (%)		15,64

Sumber: BPPSDMP, 2019

Berdasarkan tabel 24, pada tahun 2019 capaian rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional adalah 15,64% dari target sebesar 15%, maka persentase capaiannya sebesar 104,30% atau dengan kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 10,56% maka hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah poktan yang menerapkan sistem pertanian terpadu, seperti pada grafik dibawah ini



Gambar 32. Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Tahun 2018-2019

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Kemampuan penyuluh pertanian sudah optimal dalam memahami dan menyampaikan materi teknologi pertanian yang merupakan bagian dari sistem pertanian terpadu kepada petani di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP);
2. Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan oleh Penyuluh Pertanian Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan untuk melaksanakan program-program yang dialokasikan kepada kelembagaan petani yang memiliki perilaku dan sikap terbuka dan merupakan keluaran dari sistem pertanian terpadu;
3. Adanya dukungan program pembangunan pertanian berupa kegiatan penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya, Sekolah Lapangan, dan Adaptasi Spesifik Teknologi Lokalita. Adapun mekanisme pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan tersebut sebagai berikut :
 - a. Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya
 Dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian diperlukan adanya mitra bagi penyuluh PNS dan THL-TBPP yaitu Penyuluh Pertanian Swadaya. Penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya merupakan upaya untuk memberikan kesempatan bagi para petani ahli untuk memotivasi petani lainnya dalam menerapkan teknologi terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional. Tujuan dari kegiatan ini adalah:
 - 1) Meningkatkan peran dan motivasi penyuluh pertanian swadaya dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP dalam pendampingan kelompok tani;

- 2) Meningkatkan wawasan dan kemampuan penyuluh pertanian swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan pertanian.

Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya melalui kegiatan demplot sebagai sarana pembelajaran bagi kelompok tani dalam penerapan sistem pertanian terpadu. Masing-masing kegiatan demplot melibatkan 4 (empat) poktan peserta SL yang terdiri dari 1 (satu) poktan sebagai pelaksana utama dan 3 (tiga) poktan sebagai pendamping/terdampak. Masing-masing penyuluh swadaya wajib mengawal, mendampingi dan memotivasi minimal 4 (empat) poktan tersebut dalam penerapan sistem pertanian terpadu.

b) Sekolah Lapang

Gerakan Pemberdayaan Petani Mendukung UPSUS dengan Metode SL adalah salah satu proses pembelajaran non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usaha, identifikasi dan mengatasi permasalahan, mengambil keputusan serta menerapkan teknologi yang sesuai dengan sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatani lebih efisien, memiliki produktivitas tinggi dan berkelanjutan. Sekolah Lapang dapat dipandang sebagai salah satu metode dalam proses belajar mengajar yang cukup efektif, karena sangat cocok sebagai metode pembelajaran bagi orang dewasa (*Andragogi*) karena sifatnya tidak formal. Proses belajar dilakukan di lapangan dimana tersedia obyek nyata yang dijadikan materi pelajaran. Sekolah Lapangan ini dirancang untuk menjawab agar penerapan sistem pertanian terpadu dapat diwujudkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha tani;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani dalam memanfaatkan lahan usaha taninya agar lebih produktif;
- 3) Menggerakkan dan memberdayakan kelompok tani dalam menerapkan Sistem Pertanian Terpadu (SPT);

Pelaksanaan sekolah lapang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, dimana wilayah kerja tersebut dipilih 5 (lima) wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). Dengan demikian dalam setiap wilayah kerja BPP terdapat 5 (lima) WKPP sebagai pelaksana sekolah lapang. Fasilitator pelaksanaan sekolah lapang di WKPP adalah penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah kerja tersebut.

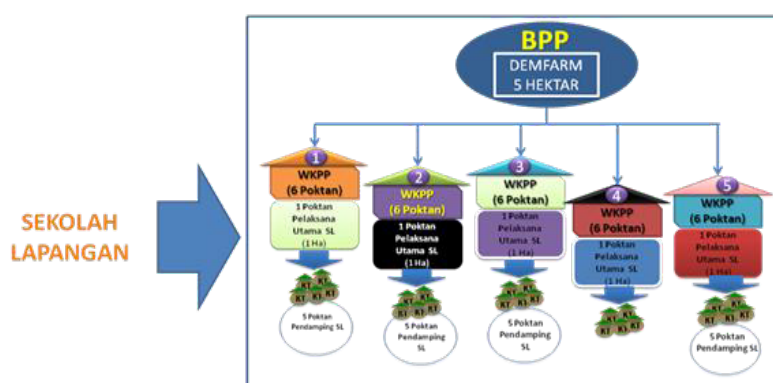
Durasi pelaksanaan sekolah lapangan selama 1 (satu) musim tanam yang disesuaikan dengan musim di lokasi tersebut. BPP dapat memilih musim tanam periode April–September atau Oktober–Maret, pilihan ini diterapkan dengan mempertimbangkan jenis komoditi dan musim pada lokasi. Jumlah peserta sekolah lapang di setiap WKPP sebanyak 15 orang yang berasal dari 6 kelompok tani di dalam WKPP, dengan rincian 1 (satu) kelompok utama (5 orang) berasal dari lokasi pelaksanaan dan 5 (lima) kelompok pendamping (masing-masing diwakili 2 orang).

Metode pembelajaran dalam pelaksanaan sekolah lapangan menggunakan prinsip-prinsip belajar sambil berbuat (*learning by doing*) sehingga peserta memahami cara pengambilan keputusan dalam mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

Tahapan pelaksanaan sekolah lapangan sebagai berikut:

- 1) Rembug Tani Desa
- 2) Pertemuan Sekolah Lapangan
- 3) Bahan Pembelajaran dengan materi terkait penerapan Sistem Pertanian Terpadu
- 4) Bantuan Transport Penyuluh Pertanian
- 5) Penyampaian laporan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Secara grafis pelaksanaan sekolah lapangan disajikan pada Gambar 33, sedangkan pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada lokasi yang telah disinergikan dengan kegiatan dinas teknis di 34 Provinsi.



Gambar 33. Alur Pelaksanaan Sekolah Lapangan

c) Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita

Pelaksanaan kegiatan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita merupakan tindaklanjut dari hasil kegiatan penelitian teknologi yang bersumber dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan diujicobakan pada kawasan tertentu oleh Balai Penyuluhan Pertanian.

Penelitian dan penyuluhan pertanian merupakan komponen yang berperan penting dalam mewujudkan peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan menuju kedaulatan pangan. Penelitian bertanggung jawab untuk menghasilkan dan meningkatkan kualitas teknologi dalam rangka menghasilkan komoditas pertanian yang berdaya saing. Tujuan kegiatan ini adalah:

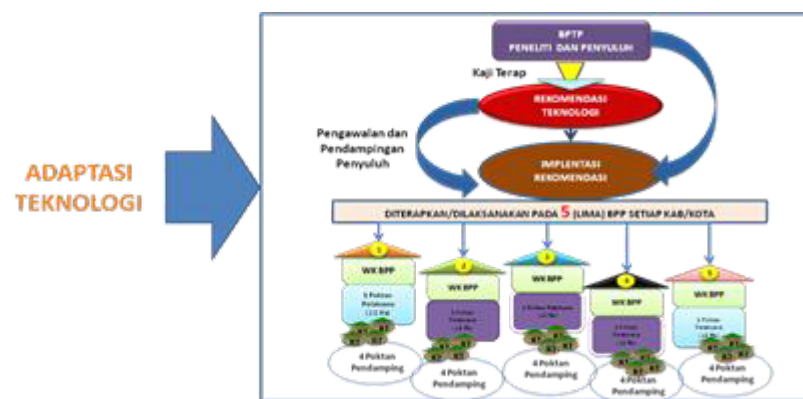
- 1) Mempercepat penyebaran teknologi spesifik lokalita yang telah direkomendasikan sesuai agro ekosistem.
- 2) Meyakinkan kesesuaian paket teknologi usahatani dengan kebutuhan dan kemampuan serta kondisi agroekosistem.

Kegiatan adaptasi teknologi spesifik lokalita dilaksanakan di salah satu desa wilayah kabupaten, dimana setiap kabupaten melakukan adaptasi teknologi di 5 wilayah kerja

BPP. Adapun penanggungjawab pelaksanaan kegiatan ini adalah lembaga penyuluhan tingkat provinsi. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga penyuluhan tingkat provinsi melakukan koordinasi dengan BPTP untuk melakukan penelahaan terhadap teknologi padi, jagung dan kedelai yang telah di rekomendasikan hasil kaji terap (*technology assement*). Lembaga penyuluhan tingkat provinsi melakukan persiapan lokasi adaptasi di wilayah kabupaten dan wilayah kerja BPP.
- 2) Pelaksanaan adaptasi teknologi spesifik lokalita difasilitasi oleh penyuluh dan peneliti BPTP dalam 1 (satu) musim tanam.
- 3) Jumlah peserta pelaksanaan adaptasi teknologi spesifik lokalita sebanyak 20 orang yang berasal dari 5 (lima) kelompok tani (poktan) di Wilayah Kerja BPP (WKBPP)
- 4) Dalam proses pelaksanaan kegiatan terdiri dari: (a) rebug tani, (b) pengamatan dan pertemuan dan (c) *Farmer Field Day* (FFD).

Secara rinci proses pelaksanaan adaptasi teknologi spesifik lokalita disajikan pada Gambar 34.



Gambar 34. Alur Pelaksanaan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita

Sasaran Strategis 11 (SS 11) **MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN PETANI** **NASIONAL**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani. Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan

komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan petani lainnya.

Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui pemberdayaan petani dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal untuk mengubah pola pikir dan sikap petani serta meningkatkan usaha tani serta kemampuan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri dalam melaksanakan fungsinya.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian sehingga dapat terbentuk kelembagaan petani yang memiliki kemampuan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya serta berjiwa kewirausahaan dan mandiri guna mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Salah satu indikator peningkatan kapasitas kelembagaan petani adalah peningkatan skor dan kelas kemampuan poktan.

Kegiatan peningkatan kapasitas poktan diawali dengan melakukan pemetaan atas keberadaan dan keragaan dari masing-masing kelompok tani oleh penyuluh pertanian untuk mengetahui kemampuan dari aspek manajemen teknis maupun manajemen administrasi mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi usaha tani, dan mengembangkan usaha tani itu sendiri. Adapun hasil pemetaan keragaan kelembagaan petani ditindaklanjuti dengan pembagian kelas kemampuan khususnya kelas kemampuan kelompok tani. Untuk mendukung kinerja penyuluh pertanian dalam pengawalan dan pendampingan kepada kelompok tani dan kelembagaan tani lainnya diberikan fasilitas berupa Biaya operasional penyuluh (BOP) yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas poktan dengan peningkatan skor dan kelas masing-masing poktan. Penilaian kelas kemampuan kelompok tani merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk memberikan motivasi kepada kelompok tani agar lebih berprestasi dalam hal mencapai kelas kemampuan yang lebih tinggi. Selain itu dapat diketahui kelemahan-kelemahan kelompok yang dinilai sehingga memudahkan untuk melakukan pembinaan.

Penilaian dilakukan setiap tahun pada bulan November. Kegiatan penilaian dilakukan oleh masing-masing penyuluh pertanian wilayah kerja binaannya. Kelas kemampuan kelompok tani dibagi dalam 4 (empat) kelas yaitu:

1. Kelas pemula dengan skor 0-245
2. Kelas lanjut dengan skor 246-455
3. Kelas madya dengan skor 456-700
4. Kelas utama dengan skor 701-1000

Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian kesebelas adalah Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Petani Nasional yang keberhasilannya dapat diukur melalui indikator kinerja Rasio Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional.

SS 10. IKU 17 Rasio Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional	
Target 30%	Realisasi 30%
% Capaian 100% Berhasil	

Pencapaian indikator kinerja ini diukur melalui perbandingan kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya}}{\sum \text{total kelembagaan petani di Indonesia}} \right) \times 100\%$$

Jumlah kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya berasal dari kelompok tani binaan Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP yang meningkatkan skor dan kelasnya. Masing-masing penyuluh diwajibkan untuk meningkatkan kapasitas minimal 5 (lima) poktan di wilayah kerjanya. Jumlah total kelembagaan petani merupakan jumlah poktan nasional tahun 2018 yang terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut, maka capaian indikator Rasio Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional =

$$x = \frac{176.591}{588.637} \times 100\% = 30\%$$

Pada tahun 2019 capaian rasio kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional sebesar 30% dari target 30% maka persentase capaiannya sebesar 100% atau dengan kategori berhasil. Secara rinci jumlah poktan yang meningkatkan kapasitasnya terlihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani pada Tahun 2019

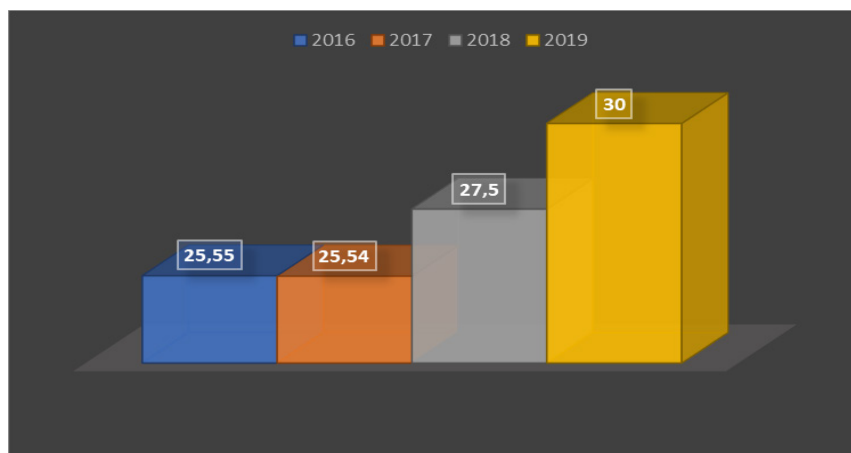
No	Uraian	Kelas Kelompok				Jumlah
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1.	Peningkatan Kelas	-	12.177	2.536	288	15.001
2.	Peningkatan Skor	33.297	111.449	15.745	1.099	161.590
	TOTAL	33.297	123.626	18.281	1.387	176.591

Sumber: SIMLUHTAN dan SILUHTAN BPPSDMP, 2019

Pada tabel 25 terlihat bahwa jumlah poktan yang meningkatkan kapasitasnya sebanyak 176.591 poktan yang berasal dari peningkatan kelas dan peningkatan skor poktan. Untuk peningkatan kelas poktan dari kelas Pemula ke Lanjut sebanyak 12.177 poktan, dari Lanjut ke Madya

sebanyak 2.536 poktan, dari Madya ke Utama sebanyak 288 poktan sehingga total peningkatan kelas sebanyak 15.001 poktan. Peningkatan Skor di kelas Pemula sebanyak 33.297 poktan, di kelas Lanjut sebanyak 111.449 poktan, di kelas Madya sebanyak 15.745 poktan dan kelas Utama sebanyak 1.099 poktan, sehingga total Peningkatan Skor sebanyak 161.590 poktan.

Perkembangan Rasio Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional selama 4 (empat) tahun dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 35. Perkembangan Rasio Kelembagaan Petani Nasional yang Meningkatkan Kapasitasnya Tahun 2016-2019

Perkembangan Rasio Kelembagaan Petani Nasional yang Meningkatkan Kapasitasnya Tahun 2016-2019 secara umum menunjukkan peningkatan. Capaian rasio pada tahun 2016 sebesar 25,55%, tahun 2017 sebesar 25,54%, tahun 2018 sebesar 27,50% dan tahun 2019 sebesar 30%. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Pemberian dukungan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS dan BOP bagi THL-TBPP dalam kegiatan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian di masing-masing Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP).
2. Pengawasan dan Pendampingan Penyuluhan Pertanian bagi Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP terhadap kelembagaan petani dilaksanakan secara optimal baik melalui metode Sistem Kerja LAKUSUSI (Latihan Kunjungan dan Supervisi), Sekolah Lapangan, Adaptasi Spesifik Teknologi Lokalita, dukungan penyediaan materi-materi dan informasi penyuluhan pertanian yang disebarluaskan melalui berbagai media cetak (tabloid, brosur, *leaflet*, juknis/juklak, pedoman dll), media elektronik (tv, radio, aplikasi berbasis web (*Cyber Extension*, dll), media sosial (Whatsapp, Facebook, Instagram) Pemutaran Film, Video Grafis, Info Grafis, *Video Conference*.
3. Peningkatan kapasitas bagi penyuluh PNS dan THLTBPP melalui pertemuan yang dilaksanakan secara rutin di WKBPP/Satminkal penyuluh pertanian, sosialisasi, bimtek dan lain lain.

Sasaran Strategis 12 (SS 12)

TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian merupakan upaya yang dilakukan secara nasional dalam meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih. RB Kementan merupakan rangkaian Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah dilakukan semenjak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti. Nilai RB Kementerian Pertanian merupakan gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kerangka RBN. Pengukuran nilai RB Kementerian Pertanian baru dilakukan dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2014. Nilai RB dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria, yaitu kriteria pengungkit dengan bobot 60% serta kriteria hasil dengan nilai 40%. Detail komponen nilai RB untuk masing-masing kriteria dapat dijabarkan sebagai berikut (Gambar 36).



Gambar 36. Komponen Penilaian RB Kementerian/Lembaga

Kriteria pengungkit terdiri dari 8 (delapan) komponen yang merepresentasikan 8 (delapan) area perubahan dalam RB Kementerian Pertanian. Komponen penataan peraturan perundang-undangan, komponen penataan tata laksana serta komponen manajemen perubahan memiliki bobot terendah yaitu masing-masing sebesar 5%. Kemudian komponen penataan dan penguatan organisasi, peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pelayanan publik memiliki bobot masing-masing sebesar 6%. Komponen penguatan pengawasan memiliki bobot cukup besar dalam penilaian RB yaitu sebesar 12% serta komponen penataan sistem manajemen SDM memiliki bobot terbesar yaitu 15%. Sedangkan untuk kriteria hasil memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu kapasitas dan akuntabilitas organisasi dengan bobot 20%, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan bobot sebesar 10% serta kualitas pelayanan publik dengan bobot sebesar 10%.

Sasaran Strategis nomor 12 (duabelas) ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian.

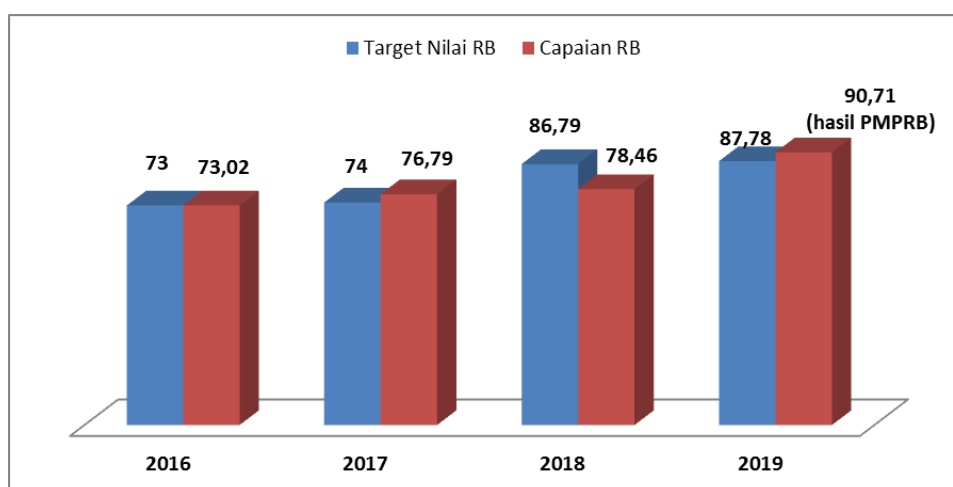
SS 12. IKU 18 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	
Target 87,78	Realisasi *)
% Capaian *)	

Keterangan: *) Nilai Reformasi Birokrasi Kementan tahun 2019 masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB

Kinerja capaian atas indikator nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2019 belum dapat dihitung dikarenakan masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB. Meskipun demikian proses evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian tahun 2019 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Kemenpan RB, dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 November 2019. Kegiatan evaluasi RB tersebut meliputi;

1. Survei Reformasi Birokrasi
2. Evaluasi Reformasi Birokrasi
3. Penyusunan lembar hasil penilaian RB dan eviden RB
4. Tindak lanjut evaluasi RB
5. Kunjungan lapangan ke beberapa UPT Kementan
6. *Mystery Shopper* ke kantor pusat dan UPT Kementan
7. *Entry Meeting*
8. *Exit Meeting*

Sebagai perbandingan, Kementerian Pertanian telah melakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Tim RB Kementan dan Inspektorat Jenderal Kementan. Pencapaian indikator nilai RB telah menunjukkan progres positif. Target dan realisasi indikator nilai RB Kementerian Pertanian dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 37. Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2016-2019

Gambar 37 memperlihatkan Nilai PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2019 melampaui target nilai RB yang telah ditetapkan dalam PK Kementerian Pertanian yaitu sebesar 87,78. (103,34%) Tabel 26 menyajikan secara detail hasil PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2016-2019.

Tabel 26. Perkembangan Hasil PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2016 -2019

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	2016	2017	2018	2019
			Nilai Capaian	Nilai Capaian	Nilai Capaian	Nilai Capaian
1	2	3	4	5	6	7
A	PENGUNGKIT					
1	Manajemen Perubahan	5	4,26	3,99	4,86	4,86
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5	3,75	3,75	5	5,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	4,84	6	6	6,00
4	Penataan Tata Laksana	5	4,46	4,75	4,88	4,88
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	14,32	14,34	14,81	14,81
6	Penguatan Akuntabilitas	6	4,07	5,14	5,78	5,78
7	Penguatan Pengawasan	12	10,39	11,14	11,17	11,17
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	5,63	5,79	5,90	5,90
	Sub Total Komponen Pengungkit	60	51,72	54,91	58,39	58,39
B	HASIL					
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	9,94	9,96	10,15	
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	5,26	5,32	5,4	
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,25	5,32	5,46	
4	Opini BPK	3	2	2	3	
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8,05	8,27	8,31	
	Sub Total Komponen Hasil	40	30,5	30,87	32,32	
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	82,21	85,77	90,72	90,71

Sumber: Inspektorat Jenderal, 2019

Tabel 26 di atas menunjukkan bahwa Hasil Capaian PMPRB Kementerian Pertanian Tahun 2019 sebesar 90,71 dan jika dibandingkan dengan Capaian PMPRB Tahun 2018 sebesar 90,72 terdapat penurunan sebesar 0,01%. Seluruh komponen penilaian PMPRB tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen (*evidence*) sesuai area perubahan Reformasi Birokrasi terkait. Peningkatan hasil capaian PMPRB Kementerian Pertanian tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam upaya membangun pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Proses evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian oleh KemenPAN-RB telah sampai pada tahap *Exit Meeting* yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PAN-RB menyampaikan beberapa hasil evaluasi sementara sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan

- 1) Belum seluruh unit memiliki rencana aksi sebagai jabaran dari rencana aksi level instansi;

- 2) Belum melakukan pengukuran terhadap perubahan budaya kerja akibat pelaksanaan RB, sehingga belum diketahui hal-hal apa yang masih berpengaruh terhadap belum berubahnya budaya kerja ke arah yang lebih positif;
 - 3) Internalisasi RB belum dilakukan secara efektif merata ke seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Unit Eselon I.
- b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 1) Di lingkungan internal instansi, peraturan yang ada sudah dilakukan harmonisasi tetapi untuk peraturan yang berkaitan dengan instansi lain secara nasional belum seluruhnya harmonis.
- c. Penataan Tata Laksana
- 1) Bisnis proses telah diperbaiki, namun dalam pelaksanaannya belum diterapkan sepenuhnya dan menggambarkan kolaborasi dan sinergi antar unit sesuai perannya dalam mencapai kinerja instansi;
 - 2) Kementerian Pertanian sudah banyak membangun sistem informasi baik untuk pelayanan internal maupun eksternal, namun belum semua aplikasi terintegrasi satu sama lain. Hal ini menyebabkan aplikasi tersebut belum memberikan dampak optimal dalam efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaksanaannya.
- d. Penataan dan Penguatan Organisasi
- 1) Evaluasi organisasi sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya dikaitkan dengan proses mewujudkan kinerja organisasi, agar terbentuk organisasi yang lebih efektif.
- e. Manajemen SDM
- 1) Perencanaan kebutuhan pegawai per tahun belum dikaitkan dengan rencana kinerja per tahun sehingga kemungkinan terjadinya bias dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
 - 2) Manajemen kinerja individu masih belum dapat memberikan informasi yang akurat mengenai profil kinerja pegawai yang riil karena:
 - a) Perjanjian kinerja individu sebagian masih berupa uraian tugas ;
 - b) Pimpinan unit kerja pada umumnya belum memberikan umpan balik atas kinerja pegawai baik berupa kelebihan maupun kekurangan yang berpengaruh kepada kinerja.
 - 3) Pengembangan pegawai yang berorientasi kepada peningkatan kompetensi belum sepenuhnya didasarkan pada hasil penilaian kinerja yang diolah untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan;
 - 4) Belum dirintis pembentukan kelompok pegawai potensial yang nanti dapat dimanfaatkan untuk kader pimpinan ke depan yang didasarkan pada: Hasil kinerja; kompetensi; dan integritas.
- f. Penguatan Akuntabilitas
- 1) Upaya perbaikan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Strategis Instansi telah dilakukan, dengan melakukan identifikasi IKU yang akan dituangkan dalam RENSTRA Instansi 2020-2024, dan telah dikonsultasikan pada tim. Hasil reviu Tim Evaluator KemenPAN pada draft IKU 2020-2024 masih belum seluruhnya sesuai dengan level instansi;

- 2) Mekanisme pemantauan dan pengukuran capaian kinerja instansi dan unit kerja sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif memberikan perbaikan kinerja yang diperlukan;
 - 3) Kementan telah membangun sistem penghitungan capaian kinerja individu (e-kinerja). Aplikasi ini juga telah menjadi salah satu alat ukur penilaian dalam pemberian tunjangan kinerja. Namun, penerapan aplikasi e-kinerja ini belum merata berlaku di seluruh satker. Terbukti masih terdapat beberapa satker yang belum melengkapi data kinerja sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - 4) Cascading kinerja dari level eselon I sampai dengan unit organisasi paling bawah belum sepenuhnya sesuai dengan proses bisnis dalam mewujudkan kinerja instansi dan belum disusun berdasarkan keterkaitan hasil proses
- g. Pelayanan Publik
- 1) Belum seluruh sistem pelayanan publik pada satuan kerja di Kementerian Pertanian memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi, utamanya pada satuan kerja di daerah. Hal ini mengakibatkan pemantauan mekanisme pelaksanaan pelayanan dan hasil pelayanan menjadi kurang optimal.
 - 2) Kementerian Pertanian sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan hasil survei telah ditindaklanjuti untuk perbaikan layanan. Perbaikan layanan belum diinformasikan secara masif keseluruh stakeholder, sehingga sebagian stakeholder belum sepenuhnya meyakini perubahan pelayanan Kementerian Pertanian.

Beberapa upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan nilai RB sebagai berikut:

- a. Manajemen Perubahan
- 1) Pembentukan Surat Keputusan (SK) No. 431 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Agen Penggerak Perubahan Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2019;
 - 2) Deklarasi Agen Penggerak perubahan Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019.
- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 1) Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan (PUU);
 - 2) Melakukan revisi terhadap PUU yang tidak harmonis;
 - 3) Melakukan deregulasi kebijakan dan perijinan yang meliputi kegiatan:
 - a) Pencabutan 291 Permentan yang sudah tidak sesuai;
 - b) Penyesuaian 241 Permentan/Kepmentan;
 - c) Penyederhanaan 15 Permentan menjadi 1 Permentan;
 - d) Membentuk Tim percepatan investasi.
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi
- 1) Melakukan penataan organisasi Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal dengan melakukan identifikasi dan analisis tugas/fungsi jabatan administrasi, jabatan fungsional dan menghitung beban kerja;
 - 2) Pembentukan Museum Tanah dan Pertanian di bawah Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka) sehingga mengoptimalkan tugas dan fungsi Pustaka dalam menyebarluaskan inovasi dan teknologi pertanian;

- 3) Menghitung beban kerja organisasi melalui aplikasi ABK *online*;
 - 4) Pembentukan organisasi UPT Museum Tanah dan Pertanian.
- d. Penataan Tatalaksana
- 1) Penguatan Proses Bisnis dan SOP AP Sekretariat Jenderal dengan melakukan revitalisasi dan integrasi SOP AP dari semula 852 menjadi 293 dan pengelolaan proses bisnis dari SOP Kementan berbasis teknologi informasi melalui eprobis.pertanian.go.id;
 - 2) Melakukan integrasi aplikasi. Saat ini sudah dilaksanakan integrasi pada aplikasi *ePersonal, ePlanning, Database* dan data spasial;
 - 3) Kementerian Pertanian melalui PPID Utama telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekaligus Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019;
 - 4) Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Internal Kementerian Pertanian oleh Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian 80,68 dengan kategori Memuaskan sesuai dengan Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM
- 1) Penerapan penilaian kinerja pegawai berbasis sistem merit sebagaimana diatur dalam Permentan 12 tahun 2019 melalui aplikasi e-kinerja;
 - 2) *e-Talenta* sudah terintegrasi dengan SIM ASN sebagai sebuah *Big Data* Kementerian Pertanian yang digunakan dalam mendukung Penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Pertanian.
- f. Penguatan Akuntabilitas
- 1) Keterlibatan pimpinan dalam Perencanaan, antara lain:
 - a) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dalam forum Rapim, 4 Maret 2019;
 - b) Pembahasan Rancangan Renstra Teknokratik bersama Sekretaris Jenderal, September 2019.
 - 2) Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik (esakip.pertanian.go.id);
 - 3) Peningkatan Kapasitas SDM
 - a) *Workshop* Penyusunan Perjanjian Kinerja (e-PK) 23 Juli 2019;
 - b) *Workshop* Pengukuran Kinerja Berbasis Elektronik (e-SAKIP) Juli-Agt 2019;
 - c) *Workshop* Penyusunan dan *Cascading* IKU lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019.
- g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Pelayanan Perizinan Berusaha telah terintegrasi secara elektronik;
 - 2) Survei Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Kementerian Pertanian dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Survei dilakukan setiap per jenis layanan yang terdapat pada seluruh unit kerja pelayanan publik lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- h. Penguatan Pengawasan
- Paradigma pengawasan telah berubah dari pola *watchdog* menjadi *quality assurance* melalui layanan konsultasi (*advisory services*) dalam bentuk rekomendasi hasil

pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan seluruh satker lingkup Kementerian Pertanian. Peningkatan pemanfaatan rekomendasi pengawasan meningkat 19,77% dari nilai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tahun 2018 sebesar 67,34% menjadi 87,11% pada tahun 2019. Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal memperlihatkan bahwa kerugian Negara menurun dari Rp113,53 milyar di tahun 2018 menjadi Rp38,71 milyar di tahun 2019

Dalam mengawal perwujudan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, Inspektorat Jenderal menetapkan 3 (tiga) misi strategis, yaitu: (1) melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian, (2) mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif, dan (3) meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2019 Kementerian Pertanian mendapatkan beberapa capaian dan penghargaan, yaitu:

1) Penghargaan Anti Gratifikasi Terbaik



Gambar 38. Menteri Pertanian Menerima Penghargaan K/L Anti Gratifikasi Terbaik dari KPK

Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai kementerian terbaik dalam pencegahan dan pengelolaan gratifikasi selama 2 tahun berturut-turut oleh KPK-RI, yaitu pada tahun 2017 dan 2018. Kementerian Pertanian meraih penghargaan ini karena berdasar penilaian evaluasi KPK, Kementerian Pertanian termasuk yang konsisten dan patuh dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara, mencegah gratifikasi, dan telah membuat unit pencegahan (Gambar 38).

2) Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 39. Menteri Pertanian menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019

Pada 2017 dan 2018 Kementerian Pertanian memperoleh "Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik" dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP-RI). Pada 2017, Kementerian Pertanian menduduki peringkat 4 dari 10 peringkat yang ada. Pada 2019 Kementerian Pertanian masuk dalam kategori Badan Publik (BP) menuju informatif dari lima kategori yang ada yaitu BP Informatif, BP Menuju Informatif, BP Cukup Informatif dan BP Kurang Informatif dan BP Tidak

Informatif. Kemudian di tahun 2019 Kementerian Pertanian menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) atas capaian sebagai "Badan Publik Informatif" yang diserahkan langsung oleh Wapres Ma'ruf Amin (Gambar 39).

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pemenuhan hak atas informasi yang dijamin UU nomor 14 tahun 2008. Bentuk komitmen tersebut telah dilakukan dalam bentuk pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi seluruh unit kerja yang ada di pusat maupun di daerah. Selain itu juga pengalokasian anggaran khusus bagi pengelola informasi publik.

Dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian telah menyusun langkah, strategi dan capaian dalam menjamin dan mempromosikan keterbukaan informasi publik. Saat ini masyarakat dapat datang langsung di bagian layanan PPID ataupun cukup melalui *website* Kementerian Pertanian. Permohonan informasi meningkat, dan sampai saat ini Kementerian Pertanian mampu memenuhi harapan masyarakat, yang makin tinggi terhadap keterbukaan informasi pertanian.

3) Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tiga Tahun Berturut-turut oleh BPK

Pada tahun 2016 hingga 2018 Kementerian Pertanian mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan Keuangan yang akuntabel, dan merupakan capaian yang sangat luar biasa mengingat baru pertama dalam sejarah, Kementerian Pertanian meraih opini WTP secara berturut-turut (Gambar 40).



Gambar 40. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian 2006-2018

Opini laporan keuangan dari BPK tersebut merupakan salah satu penilaian reformasi birokrasi yang akan berdampak pada remunerasi dan tunjangan kinerja Kementerian Pertanian. Ada dua komponen yang dinilai dalam reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, yaitu: (i) Komponen pengungkit yang meliputi: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan, dan (ii) Komponen hasil yang meliputi nilai akuntabilitas kinerja, survei internal integritas organisasi, survei eksternal persepsi korupsi, opini BPK, dan survei eksternal pelayanan publik.

Opini WTP yang diraih Kementerian Pertanian mendapat apresiasi pemerintah melalui peningkatan tunjangan kinerja (tunkin) Aparat Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertanian, yang semula pada 2015 hanya 45% naik menjadi 70% pada 2016, dan naik kembali pada tahun 2018 menjadi 80%. Kenaikan tunjangan kinerja ini harus diimbangi dengan kinerja yang semakin meningkat di masa yang akan datang.

4) Penghargaan TOP Digital Implementation on Ministry 2019



TOP DIGITAL AWARDS 2019 dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi kepada instansi pemerintahan dan perusahaan swasta yang dinilai berhasil mengimplementasikan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program.

Penghargaan ini diperoleh karena adanya komitmen Menteri

Pertanian dalam mendukung secara penuh pengembangan dan implementasi Teknologi, Informasi dan Komputer (TIK) di Kementerian Pertanian.

Dalam program 100 hari pertama dari Bapak Menteri Pertanian, selain membenahi dan mensinkronkan akurasi data-data pertanian serta mengacu pada data BPS, beliau juga

mendorong semua aktivitas pertanian harus dipantu dan dilakukan dengan menggunakan IT yang canggih.

Terkait dengan harapan ini, Kementerian Pertanian sedang membangun *Agriculture War Room* (AWR) untuk dapat memantau secara langsung kegiatan dan kondisi pertanian terkini di semua lokasi. Tujuannya agar semua kegiatan di lokasi bisa terpantau secara baik.

Kementerian Pertanian pada saat yang sama juga sedang membangun Komando Strategis Pertanian (Kostra Tani) pada tingkat kecamatan, Salah satu fungsi Kostra Tani ini adalah sebagai penyedia data dan informasi riil di lapangan yang langsung dilinkkan ke AWR di Kementan, sehingga kalau ada masalah penanganannya menjadi tepat sasaran. Melalui terobosan-terobosan yang dilakukan tersebut, diyakini kebijakan dan program pembangunan pertanian bisa dibuat secara tepat sehingga bermuara kepada peningkatan kesejahteraan petani, serta upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan dan berdaulat bagi 267 juta penduduk bisa dilakukan secara baik.

5) Penghargaan Inisiatif Agriculture 4.0



Tanggal 18 Juli 2019 Kementerian Pertanian dan sektor pertanian Indonesia kembali menorehkan prestasi tinggi di kancah internasional. Kementan diberi apresiasi oleh Organisasi OpenGov Asia yang memberikan penghargaan atas inisiatif pemanfaatan teknologi yang inovatif di sektor publik dalam rangka optimalisasi kerja pemerintah, memberikan peningkatan pelayanan masyarakat, serta memberikan inovasi terobosan yang baru.

Tanggal 18 Juli 2019 Kementerian Pertanian dan sektor pertanian Indonesia kembali menorehkan prestasi tinggi di kancah internasional. Kementan diberi apresiasi oleh Organisasi OpenGov Asia yang memberikan penghargaan atas inisiatif pemanfaatan teknologi yang inovatif di sektor publik dalam rangka optimalisasi kerja pemerintah, memberikan peningkatan pelayanan masyarakat, serta memberikan inovasi terobosan yang baru.

Kementerian Pertanian dinilai telah secara konsisten dan luar biasa dalam upaya menerapkan inovasi teknologi dalam pembangunan pertanian. Kementerian Pertanian dinyatakan sangat layak mendapatkan penghargaan dalam kategori inisiatif Agriculture 4.0.

Tim teknis menilai Kementan telah berinisiatif untuk memanfaatkan teknologi secara masif dan konsisten dalam percepatan pembangunan pertanian modern, yaitu dengan menggunakan sensor canggih, *robotic* atau mekanisasi, pemetaan berbasis informasi geospasial dan teknologi cuaca. Implementasi dari teknologi ini dinilai telah mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat petani.

Regenerasi pertanian dinilai penting lantaran kebutuhan pangan di masa depan akan semakin besar seiring laju pertumbuhan penduduk. Digitalisasi pertanian juga dilakukan untuk merespon keterbatasan tenaga kerja, peningkatan efisiensi dan produktivitas,

serta membangun bisnis proses baru, value baru, konsumen baru, untuk menghasilkan produk baru yang mampu men-disruptive teknologi budi daya konvensional.

- 6) Penghargaan SNI Award dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam Ajang Standar Nasional Indonesia (SNI) Award 2019



Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang dan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari memperoleh Peringkat Perak untuk kategori Perusahaan/Organisasi Kecil Barang dan Perusahaan/Organisasi Menengah Barang sektor pangan, pertanian dan kesehatan.

- 7) Predikat "Sangat Memuaskan" dalam Pengawasan Kearsipan

Arsip Nasional RI (ANRI) melakukan monitoring tindaklanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Pertanian pada tahun 2019. Nilai hasil pengawasan adalah 97,79 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) atau mengalami kenaikan sebesar 11,28 dari hasil pengawasan tahun 2018 sebesar 86,51 dengan kategori "Baik".

Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan berbagai *tools* untuk menjawab perubahan di era industri 4.0. Selain mengembangkan program aplikasi pengelolaan arsip, kementerian juga telah menyiapkan kebijakan pengelolaan kearsipan seperti tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, klasifikasi keamanan dan akses arsip yang merupakan instrumen wajib sebagai dasar pengelolaan arsip.

- 8) Anugerah Parahita Ekapraya



Gambar 41. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menerima Anugerah Parahita Ekapraya

Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih Penghargaan Tertinggi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 Kategori Mentor, tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri Pertanian yang diwakili oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri di Istana Wakil Presiden di Jakarta pada bulan (Gambar 41).

Penganugerahan ini diberikan oleh pemerintah kepada Kementerian atau Lembaga yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga, serta memiliki inovasi dalam penerapan kesetaraan gender, serta melakukan pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada K/L lainnya dan pemerintah daerah. Penghargaan ini diberikan 2 (dua) tahun sekali.

9) Penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik 2019



Berdasarkan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi mewajibkan setiap penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan. Biro Organisasi dan Kepegawaian terus mendorong dan mengkoordinasi setiap pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki kewajiban melaporkan LHKPN untuk menyampaikan laporan sesuai dengan jadwal yang telah di keluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyampaian pelaporan LHKPN ini mendapat Apresiasi oleh KPK dengan diterimanya penghargaan sebagai Instansi dengan pengelolaan LHKPN terbaik tahun 2019 kategori lembaga eksekutif pusat. Penghargaan yang diberikan kepada Kementerian Pertanian di tingkat Pusat, karena masuk kriteria penilaian yaitu jumlah total wajib lapor, tingkat Kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan dan jumlah wajib lapor secara online. Penghargaan tersebut diberikan tepat pada saat hari anti korupsi sedunia (Harkodia) tahun 2019.

10) Peningkatan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Maturitas penyelenggaraan SPI merupakan ukuran kualitas bagi kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan SPI dalam unit kerja/program/kegiatan. Semakin tinggi level maturitasnya, sebagai representasi bagi instansi dalam melakukan pengendalian risiko dan tatakelolanya serta menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga hasil penilaian maturitas dapat digunakan sebagai strategi bagi pimpinan untuk *area of*

improvement (AOI) yang harus diperbaiki.

Berdasarkan hasil penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019 oleh BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Quality Assurance Atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian Nomor SP-136/D1/12/2019 Tanggal 31 Desember 2019, Kementerian Pertanian memperoleh nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,112 dengan kategori "Terdefinisi". Nilai maturitas SPIP tahun 2019 ini meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 3,037.

- 11) Peningkatan *Internal Audit Capability Model (IACM)* Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP



Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut mampu menjadi katalisator dalam mewujudkan *good government* dan *clean governance* serta mampu mendeteksi secara dini berbagai upaya praktik-praktik korupsi. Untuk mengukur kemampuan/kapabilitas pengawasan di sektor publik dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, *Institute of Internal Auditor (IIA) Research*

Foundation mengembangkan model pengukuran kapabilitas pengawasan intern dengan IACM (*Internal Audit Capability Model*). Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian Pertanian telah melakukan penilaian Mandiri (Self Assessment) untuk menilai infrastruktur yang telah dibangun atas tata kelola pengawasan dalam melaksanakan peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, Akuntabilitas dan manajemen kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi serta struktur tata kelola.

Untuk memberikan *Quality Assurance* atas *Self Assessment* peningkatan kapabilitas dan untuk mengetahui level Inspektorat Jenderal selaku APIP lingkup Kementan berdasarkan IACM, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Validasi Self Assessment yang telah dilakukan Itjentan. Pada tahun 2019, Inspektorat Jenderal Pertanian mendapatkan nilai 3 untuk level kapabilitas APIP.

- 12) Penghargaan Zona Integritas Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi



Gambar 41. Sekretaris Itjen, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Perwakilan 5 UPT Penerima Penghargaan ZI WBK/WBBM Tahun 2019

Sebagai wujud keberhasilan pembinaan Anti Korupsi melalui kegiatan Protani, Kementerian Pertanian berhasil meraih penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB Tahun 2019 kepada 5 unit pelaksana teknis lingkup

Kementerian Pertanian yaitu Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden, dan Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Lampung.

C. Akuntabilitas Keuangan Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2019, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu APBN senilai Rp21.831.606.427.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 12 (dua belas) program. Sampai dengan 31 Desember 2019, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai Rp19.424.318.074.575,- atau 88,97%. Perkembangan pagu APBN Kementan dan realisasinya selama 5 tahun (2015-2019) disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2014-2019

NO	TAHUN	PAGU (Rp000)	REALISASI (Rp000)	%
1	2015	32.725.568.426	28.675.810.207	87,63
2	2016	27.726.630.187	27.039.325.731	97,52
3	2017	24.226.137.776	21.909.385.622	90,44
4	2018	24.038.534.197	21.834.454.275	90,84
5	2019	21.831.606.427	19.424.318.074	88,97

Sumber: Sekretaris Jenderal, 2019

Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Adanya kebijakan penghematan anggaran dan perubahan kode mata anggaran yang membutuhkan waktu proses revisi sehingga berdampak terhadap realisasi anggaran, (2) Penghematan biaya pada rapat-rapat/pertemuan, akomodasi, perjalanan dinas, dan belanja perkantoran, dan (3) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. APBN Kementan TA 2019 sebagian besar atau lebih dari 80% dialokasikan di Daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT Pusat di Daerah) dan 20% dialokasikan di Pusat. Kinerja serapan anggaran secara keseluruhan ditanggung oleh 12 program Kementerian Pertanian. Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan bulan 31 Desember 2019 disajikan pada **Lampiran 5**.

Selain perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kementerian Pertanian, sebagai bentuk akuntabilitas keuangan, Laporan Kinerja juga menyajikan pagu dan realisasi anggaran per Sasaran Strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Dukungan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dukungan Anggaran per Indikator Kinerja (Rp)			Total Anggaran per Sasaran Strategis (Rp)		
			Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya pendapatan keluarga petani	1 PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian (RP Juta)	Merupakan impact dari pencapaian SS lainnya, tidak diturunkan (cascading) ke Eselon I sehingga tidak memiliki alokasi anggaran					
2	Meningkatnya ketahanan pangan nasional	2 Indeks Ketahanan Pangan (Peringkat)	Merupakan impact dari pencapaian SS lainnya, tidak diturunkan (cascading) ke Eselon I sehingga tidak memiliki alokasi anggaran					
3	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	3 Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional (%)	266.137.328.000	249.409.212.947	93,71	1.522.090.436.000	1.445.387.320.584	94,96
		4 Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional (%)	316.644.702.000	264.383.774.833	83,50			
		5 Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian (%)	939.308.406.000	931.594.332.804	99,18			
4	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional	6 Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional (%)	4.494.415.706.780	3.436.249.253.700	76,46	4.494.415.706.780	3.436.249.253.700	76,46
5	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	7 Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia (kasus)	26.781.000.000	25.145.288.824	93,89	825.375.820.000	816.821.820.572	98,96
		8 Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor (%)	798.594.820.000	791.676.531.748	99,13			
6	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis	9 Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional	148.300.000.000	146.734.513.884	98,94	148.300.000.000	146.734.513.884	98,94
7	Dimanfaatkannya inovasi teknologi	10 Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir) (%)	599.001.610.617	574.906.945.724	95,98	599.001.610.617	574.906.945.724	95,98
8	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan	11 Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan (%)	183.944.734.000	183.824.734.000	99,93	3.617.766.298.000	3.199.239.607.239	88,43
		12 Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen) (%)	1.597.152.864.000	1.488.887.455.939	93,22			
		13 Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan (%)	1.836.668.700.000	1.526.527.417.300	83,11			
9	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	14 Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam (%)	335.669.081.000	331.868.619.050	98,8678	535.057.438.000	516.433.663.644	96,52
		15 Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (%)	199.388.357.000	184.565.044.594	92,57			
10	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	16 Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	30.850.000.000	30.484.619.614	98,82	30.850.000.000	30.484.619.614	98,82
11	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	17 Rasio kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	417.186.932.000	390.749.328.928	93,66	417.186.932.000	390.749.328.928	93,66
12	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	18 Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	321.724.027.000	308.578.727.771	95,91	321.724.027.000	308.578.727.771	95,91

Sumber: Kementerian Pertanian, 2019

Anggaran per Sasaran Strategis merupakan penjumlahan anggaran dari Indikator-Indikator Kinerja yang mendukung masing-masing Sasaran Strategis. Anggaran tersebut tersebar di

seluruh Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Sasaran strategis yang memiliki anggaran terbesar adalah Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Strategis Nasional dengan total anggaran Rp4.494.415.706.780,- yang tersebar di 4 (empat) Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, yaitu: Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan Sasaran Strategis yang memiliki anggaran terkecil adalah Sasaran Strategis Meningkatkan Penerapan Pengelolaan Pertanian Terpadu di Pedesaan dengan total anggaran Rp30.850.000.000,-.

Realisasi anggaran per Sasaran Strategis berkisar dari 76,46%-98,96%, sedangkan realisasi anggaran per Indikator Kinerja Sasaran Strategis berkisar antara 76,46%-99,93%. Rincian kegiatan dan anggaran per Indikator Kinerja dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

BAB IV

PENUTUP

Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban oleh Kementerian Pertanian kepada masyarakat (publik).

Dari 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, sebagian besar indikator kinerja masuk kategori sangat berhasil (12 indikator). Dari hasil evaluasi terdapat 5 (lima) indikator yang berhasil dan 1 (satu) indikator belum diketahui hasilnya.

Indikator kinerja yang masuk kategori **sangat berhasil** yaitu: (1) PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian; (2) Indeks Ketahanan Pangan; (3) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional; (4) Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian; (5) Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia; (6) Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor; (7) Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional; (8) Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir); (9) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan; (10) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan; (11) Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam; dan (12) Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional.

Indikator kinerja yang masuk kategori **berhasil** yaitu: (1) Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional; (2) Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional; (3) Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen); (4) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis; dan (5) Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional

Sedangkan indikator yang belum diperoleh hasilnya adalah nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pertanian, karena sampai dengan bulan Februari 2019 belum diumumkan oleh Tim Evaluasi RB Kementerian PAN dan RB.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian tahun 2019 khususnya perkembangan capaian 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis tersebut tidak

terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di lingkup Kementerian Pertanian baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara khusus mempengaruhi capaian 18 (delapan belas) indikator kinerja sasaran strategis, dan dukungan tidak langsung antara lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Selain itu, juga dukungan pengawasan internal yang berperan dalam menciptakan iklim kerja lingkup Kementerian Pertanian yang bersih, transparan dan akuntabel.

Selain berbagai keberhasilan telah dicapai pada tahun 2019, pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa permasalahan terutama kendala dalam pencapaian produksi atas target untuk beberapa komoditas seperti padi, jagung, kedelai, gula tebu, daging sapi dan kerbau, dan cabai rawit. Permasalahan tersebut mencakup: (1) keterbatasan ketersediaan lahan baku untuk masing-masing komoditas, (2) keterbatasan luas kepemilikan lahan petani, (3) terbatasnya penggunaan bibit/benih unggul, (4) gangguan reproduksi ternak, (5) terbatasnya populasi ternak sapi/kerbau, (6) musim kemarau yang panjang, (7) serangan hama dan penyakit, (8) terbatasnya pendampingan dan bimbingan penyuluh di lapangan, (9) meningkatnya impor produk pertanian, (10) keterbatasan anggaran dalam alokasi alsintan pasca panen, dan (11) keterbatasan produksi vaksin rabies di Pusat Veteriner Farma.

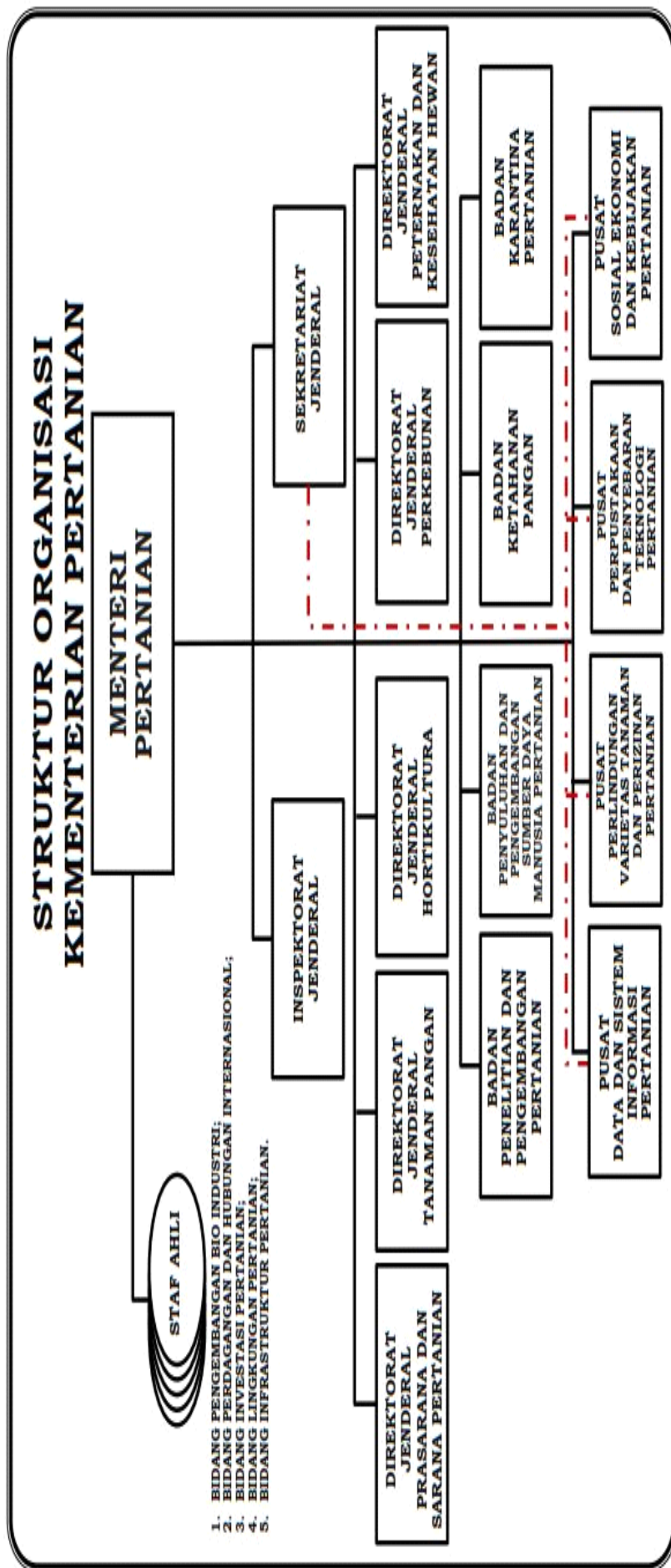
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, untuk tahun 2019 Kementerian Pertanian telah mulai melakukan berbagai upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan pertanian ke depan, seperti: pengembangan korporasi petani; pemanfaatan dan perluasan areal tanam baik di lahan kering maupun di lahan milik subsektor/instansi lain (perkebunan/perhutani/ subsektor lain); meningkatkan produksi komoditas ekspor dan substitusi impor; meningkatkan penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat; Pengendalian Pemotongan Betina produktif Hijauan Pakan Ternak; Optimalisasi Reproduksi; mendorong peningkatan peran kelembagaan petani; meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petani; meningkatkan peran penyuluh; serta mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan alsintan pasca panen dan produksi obat hewan. Rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2019 secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Tahun 2019 Kementerian Pertanian mengelola APBN Rp21.831.606.427.000,- yang dipergunakan untuk membiayai 11 program. Sampai dengan 31 Desember 2019, realisasi serapan APBN Kementerian Pertanian mencapai Rp19.424.318.074.575,- atau 88,97%.

Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, Kinerja Pembangunan Pertanian 2019 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERTANIAN



Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pertanian

**LAMPIRAN 2. DISTRIBUSI MENURUT GOLONGAN/ RUANG DAN JENIS KELAMIN
BERDASARKAN ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN**

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV				JENIS KELAMIN				TOTAL				
		A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D		E	JML	L	P
1	SEKRETARIAT JENDERAL	-	-	-	2	2	9	-	32	56	97	140	322	226	249	937	104	57	22	22	14	17	214	737	513	1,250
	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	-	-	-	-	-	1	-	5	16	22	53	45	89	64	251	36	18	3	1	-	-	58	186	145	331
3	TANAMAN PANGAN	-	-	-	-	-	10	16	28	55	109	91	114	130	115	450	40	19	7	2	-	-	68	344	283	627
4	HORTIKULTURA	-	-	-	-	-	7	4	14	16	41	51	54	79	70	254	35	16	4	2	-	-	57	180	172	352
5	PERKEBUNAN	-	-	2	-	2	12	8	41	56	117	215	162	188	162	727	77	27	10	2	1	1	117	541	422	963
	DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	6	3	20	29	61	64	175	147	447	222	437	244	405	1,308	168	52	15	5	-	-	240	1,237	787	2,024
7	INSPEKTORAT JENDERAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	-	-	-	-	-	1	2	5	9	17	46	54	49	32	181	43	14	34	7	7	7	105	171	132	303
8	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	2	24	35	132	193	163	237	406	638	1,444	560	1,340	762	809	3,471	336	213	117	96	108	870	3,676	2,302	5,978	
	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN	-	-	17	26	43	62	48	122	119	351	229	416	341	323	1,309	157	83	47	27	13	13	327	1,263	767	2,030
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	-	-	-	1	1	-	2	5	10	17	39	69	50	58	216	31	13	3	2	1	1	50	138	146	284
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN	-	1	2	3	6	37	209	452	404	1,102	589	600	476	668	2,333	228	109	38	3	1	379	2,193	1,627	3,820	
	TOTAL PEGAWAI	2	31	59	184	276	363	590	1,285	1,526	3,764	2,235	3,613	2,634	2,955	11,437	1,255	621	300	161	148	2,485	10,666	7,296	17,962	

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian, 2019

LAMPIRAN 3a. REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN / NOTIFICATION OF NON COMPLIANCE (NNC) TERHADAP KOMODITAS EKSPOR UNTUK ISU FITOSANITARI TAHUN 2019

No	Komoditas	Negara Tujuan	Alasan NNC	Tindakan	UPT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Hygrophila</i> sp.	Belanda	ditemukan Organisme Pengganggu Tumbuhan yaitu <i>Bemisia tabaci</i>	Ditolak	BBKP Soekarno	<ul style="list-style-type: none"> Nama Pemilik: PT Aquatic Plant Centre Indonesia PC No: -- No NNC EU: 129005 (06/09/19)
2.	<i>Philodendron</i> sp.	Polandia	ditemukan Organisme Pengganggu Tumbuhan yaitu Pseudococcidae	Ditolak	BBKP Tanjung Priok	<ul style="list-style-type: none"> Nama Pemilik: CV. Jojo and Nursery PC No: -- No NNC EU: 128910 (06/09/19)
3.	<i>Wodyetia bifurcata</i>	Mesir	ditemukan Organisme Pengganggu Tumbuhan yaitu <i>Fusarium oxysporum</i> dan <i>Thielaviopsis paradoxa</i>	Ditolak atau dimusnahkan	BBKP Soekarno	<ul style="list-style-type: none"> Nama Pemilik: CV. Bahari Energy PC No: 1184630 Tgl NNC Egypt: (08/09/19)
4.	bibit tanaman akuarium	Korea Selatan	ditemukan Organisme Pengganggu Tumbuhan yaitu <i>Helicotylenchus erythrinae</i> dan <i>Meloidogyne</i> sp.	Dimusnahkan	BBKP Soekarno	<ul style="list-style-type: none"> Nama Pemilik: PT Project Team Work PC No: 0482652 Tgl NNC Korsel: (12/08/19)
5.	bibit tanaman akuarium	Korea Selatan	ditemukan Organisme Pengganggu Tumbuhan yaitu <i>Helicotylenchus erythrinae</i> dan <i>Meloidogyne</i> sp.	Dimusnahkan	BBKP Soekarno	<ul style="list-style-type: none"> Nama Pemilik: PT Project Team Work PC No: 0482652 Tgl NNC Korsel: (12/08/19)

No	Komoditas	Negara Tujuan	Alasan NNC	Tindakan	UPT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
6.	Bonsai	Belanda	ditemukan Organisme Pengganggu Tumbuhan yaitu <i>Scirtothrips dorsalis</i>	Ditolak	BKP Kelas I Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Nama Pemilik: CV. Exotic Bonsai Indonesia PC No: 130173 Tgl NNC Jerman: (29/10/19)
7.	<i>Ornamental plant</i>	Polandia	ditemukan Organisme Pengganggu Tumbuhan yaitu <i>Diaspididae</i>	Ditolak	BBKP Soekarno-Hatta	<ul style="list-style-type: none"> Nama Pemilik: CV. Kebun Maju Bersama PC No: 130001 Tgl NNC Polandia: (27/09/19)
8.	Intsia spp	India	Hama hidup kegagalan fumigasi	Ditolak setelah itu difumigasi	Surabaya	Phytosanitary Certificate 2018.2.0401.0.K..10.E.027074,Notifcation No: PQSB/02/2019 Date 11.01.2019 PT. Iswar Timber SURABAYA.
9.	Intsia spp	India	Hama hidup kegagalan fumigasi	Ditolak setelah itu difumigasi	Surabaya	Phytosanitary Certificate 2018.2.0401.0.K..10.E.021556,Notifcation No: PQSB/65/2018 Date 16.11.2018 PT. ANEKA RIMBA INDONESIA GRESIK..
10.	Kemasan Kayu, wood packaging material	Switzerland (CH), Uni Erpoa	Kemasan kayu terinfestasi serangga hidup dan mati, kemungkinan Scolytus sp. Dan larva	PemusnahanTidak memenuhi persyaratan kemasan kayu (ISPM. No. 15)	Jawa Timur	PT. Nagaart Collection Ref NNC. 125102

No	Komoditas	Negara Tujuan	Alasan NNC	Tindakan	UPT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
11.	Kelapa, Cocos nucifera L, 26,5 ton	Thailand	Kelapa berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit	Pemusnahan	Batam	PT. Sempurna Pratama Indonesia 1195641
12.	Citrus maxima, 0,504 ton.	Switzerland (CH), Uni Erpoa	Infestasi lalat buah, Bactrocera spp.	Pemusnahan	-	Garden-GRW; 1210619.; 2019.2.1201.0.K10.E.0; Ref. NNC; 126651. GB/DEFRA/2019/117546/5385/1
13.	Elaeis guineensis (Nypa stick, Broom stick), 50 ton.	India	Media Pembawa yang dikirim broom stick Elaeis guineensis , akan tetapi yang diperbolehkan masuk ke India adalah Elaeis guineensis dalam bentuk <i>seeds/sprout/planting & oil cakes/mengacu Schedule VI & Schedule VII dan PQ Order 2003</i>	Pemeriksaan Visual pada 29 April 2019 dan penolakan /pemusnahan pada 1 Mei 2019	Belawan	CV. Agung Makmur Jaya, difumigasi oleh PT. Abdi Jasa Karya Nusantara (ID.0030MB). 2019.2.0100.0.K10.E.002541 Ref NNC. Kol/23/2019
14.	Nypha fruticans (Nypa Stick, Broom stick), 25.000 ton	India	Media Pembawa dilarang masuk berdasarkan daftar pada Schedule VI & Sechedule VII of PQ Order, 2003	Penolakan/ Pemusnahan pada 7 Mei 2019 setelah sebelumnya dilakukan Pemeriksaan visual, 3 Mei 2019	Belawan	PT. Nuansa Dua Warna; 2019.2.0100.0.K10.E.002796; Ref NNC.; Kol/22/2019

No	Komoditas	Negara Tujuan	Alasan NNC	Tindakan	UPT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
15.	Broom Sticks (Nypa fruticans) 26.500 ton.	India	Media Pembawa yang dikirim Nypa broom stick, akan tetapi yang diperbolehkan masuk ke India adalah Nypa broom stick dalam bentuk <i>seeds/sprout/planting & oil cakesmengacu Schedule VI & Schedule VII dan PQ Order 2003</i>	Pemeriksaan Visual pada 24 Mei 2019 dan penolakan /pemusnahan pada 27 Mei 2019	Pontianak	PT. Nuasa Dua Warna; 2019.2.1500.0.K10.E.000575.; Ref. NNC. GLDU9345621
16.	Elaeis guineensis (Nypa stick, Broom stick), 11500.000 Kg.	India	Media Pembawa yang dikirim broom stick Elaeis guineensis , akan tetapi yang diperbolehkan masuk ke India adalah Elaeis guineensis dalam bentuk <i>seeds/sprout/planting & oil cakesmengacu Schedule VI & Schedule VII dan PQ Order 2003</i>	Pemeriksaan Visual pada 21 Mei 2019 dan penolakan /pemusnahan pada 27 Mei 2019	Belawan	CV. ANUGERAH SEMESTA RAYA 2019.2.0100.0.K10.E.003645. SSLBWCCUCAAA1545 Ref NNC. SIKU3060940
17.	Cocos nucifera 28,700 kgs	Bangkok, Thailand	Kelapa berkecambah dan bertunas	Di kembalikan	Palembang	PT. TASINDO ANUGERAH MANDIRI RAYA, 2019.2.0200.0.K10.E.000927 SEGU4539746

No	Komoditas	Negara Tujuan	Alasan NNC	Tindakan	UPT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
18.	Cocos nucifera 26.000 kgs	Bangkok, Thailand	Kelapa berkecambah dan bertunas	Di Hancurkan	Jambi	CV . SC COCO MAS INDO, 2019.2.100 6 0.K.10.E.000639 TCNU9449195
19.	Cocos Nucifera 28000 Kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan bertunas	Dimusnakan	Palembang	PT. Agri Tirta Lestari Phytosanitary Certificate No. 2019. 2.0200.0.K.10 E. 000975.
20.	Cocos Nucifera 24510 Kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan bertunas	Dimusnakan	Surabaya	PT. Starindo Anugerah Abadi. Phytosanitary Certificate No. 2019. 2.0401.0.K.10 E. 010698.
21.	Cocos Nucifera 26000 Kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan bertunas	Dimusnakan	Palembang	PT. Starindo Anugerah Abadi. Phytosanitary Certificate No. 2019. 2.0200.0.K.10 E. 000971.
22.	Cocos Nucifera 25.940 Kg	Thailand	Berkecambah dan pertumbuhan bibit	Dimusnakan	Palembang	PT. Wahyu Jaya Sukses

No	Komoditas	Negara Tujuan	Alasan NNC	Tindakan	UPT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
23.	Wood (Pallet, Plates, Plates in Bundle, Bunch, Truss)	Germany	Ditemuka organisme yang berbahaya	Dimusnahkan	Tanjung Priok	PT. Asia Pacific Fibers TBK
24.	Bahan Serat Pisang	Costa Rica	Prinsip Kehati-hatian dengan keyakinan masuknya <i>Fusarium oxysporum f.sp.cubense</i> raza 4	Ditolak	-	-
25.	Lada 35 Pcs	Japanese	Ditemukan Nematoda <i>Radophulus similis</i>	Dimusnahkan	Soekarno-Hatta	Phytosanitary Certificate No. 2019.2.1201.0.K10E004894. tanggal 2019/07/29 CV. HI Abadi Jaya
26.	Bougainvillea spectabilis 1554 Pcs (Benih)	Netherland	Adanya Organisme yang berbahaya	Ditolak	Semarang	Document Number 2019.2.1401.0.K10.E.007230. tanggal 27 September 2019 CV. Exotic Bonsai Indonesia.
27.	Ornamental Plant (Benih)	Poland	Organisme berbahaya	Ditolak	Soekarno-Hatta	. Notification EU. Interception NR. 130001 Document Number : 2019.21200.0.K10.E.005840 CV. Kebun Maju Bersama..

No	Komoditas	Negara Tujuan	Alasan NNC	Tindakan	UPT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
28.	Ornamental Plant (Benih)	Germany	Organisme berbahaya	Ditolak	Bandung	. Notification EU. Interception NR. 130144 Document Number : 0609883 CV Berkah Bunda Abadi
29.	Wood Pallet	Poland	Ketidak patuhan dengan persyaratan khusus.	Ditolak	Tanjung Priok	. Eu Interception Nr 130470 Type of Document: OGGA.7140.1848.2019 PT. Indo Deli Pulpnpaper Mills.
30.	Cocos nucifera 27.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 122/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.001932 PT Agri Tirta Lestari
31.	Cocos nucifera 27.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 131/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.001954 PT Tasindo Anugerah Mandiri Indonesia
32.	Cocos nucifera 52.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 132/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.001971 PT Tasindo Anugerah Mandiri Indonesia

No	Komoditas	Negara Tujuan	Alasan NNC	Tindakan	UPT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
33.	Cocos nucifera 40.500 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 137/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.001913 CV. Sus Kelapa Indo
34.	Cocos nucifera 13.500 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 138/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.001862 PT. Agri Tirta Lestari
35.	Cocos nucifera 85.200 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 139/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.001829 CV. Sus Kelapa Indo
36.	Cocos nucifera 27.450 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 140/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.001979 PT Tasindo Anugerah Mandiri Indonesia
37.	Cocos nucifera 81.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 117/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.001696 PT. Agri Tirta Lestari

No	Komoditas	Negara Tujuan	Alasan NNC	Tindakan	UPT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
38.	Cocos nucifera 49.500 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 118/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.0001784 PT. Indo Agro Kelapa
39.	Cocos nucifera 54.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 121/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.0001934 PT. Agri Tirta Lestari
40.	Cocos nucifera 67.500 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 133/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.0001921 CV. Sus Kelapa Indo
41.	Cocos nucifera 26.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 134/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.0001998 PT. Agri Tirta Lestari
42.	Cocos nucifera 26.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 135/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.0001969 PT. Agri Tirta Lestari

No	Komoditas	Negara Tujuan	Alasan NNC	Tindakan	UPT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
43.	Cocos nucifera 78.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 136/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.0001997 PT. Agri Tirta Lestari
44.	Cocos nucifera 54.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 123/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.0001933 PT. Agri Tirta Lestari
45.	Cocos nucifera 27.200 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 124/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.001841 PT. Surya Indo Cocos
46.	Cocos nucifera 26.500 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 125/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0401.0.K.10..E.020041 PT. Surya Indo Cocos
47.	Cocos nucifera 26.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 126/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0300.0.K.10..E.007563 PT. Surya Indo Cocos

No	Komoditas	Negara Tujuan	Alasan NNC	Tindakan	UPT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
48.	Cocos nucifera 98.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 127/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.001939 PT. Surya Indo Cocos
49.	Cocos nucifera 28.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 128/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.001847 PT. Maju Terus Berjaya
50.	Cocos nucifera 112.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 129/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.001964 PT. Maju Terus Berjaya
51.	Cocos nucifera 54.000 kg	Thailand	Kelapa Berkecambah dan terdapat pertumbuhan bibit.	Ditolak	Palembang	Reference No. 130/2019 Phytosanitary Certificate No. 2019.2.0200.0.K.10..E.001940 PT. Coconesia Makmur Sejahtera

LAMPIRAN 3b. REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN/ NOTIFICATION OF NON COMPLIANCE (NNC) TERHADAP KOMODITAS EKSPOR UNTUK ISU KEAMANAN PANGAN TAHUN 2019

No	Nama Produk	Negara Tujuan / Importir	Alasan	Status	Hasil Uji	Standar	Asal Perusahaan
1	Pala	Jerman	Aflatoxins in nutmegs from IND	Ditolak	Aflatoxin B1 : 16,4 ± 4,9 µg/kg (ppb)	10 µg/kg (ppb), EU Legislation 1881/2006 setting maximum leves for certain contaminants in foodstuffs.	CV. Indospice, Jl. Tikala Ares No. 43 Manado, Sulut No HC: 167/I/HC/OKKPD-029/12/2018
2	Pala biji	Belanda	Aflatoxins in nutmegs from Indonesia	Ditahan dan ditolak	Aflatoxin total 48,9 ± 14,7 ppb	Max. permetted level : 10 ppb; EU Legislation 1881/2006. Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs	CV. Indospice, Jl. Tikala Ares No. 43 Manado, Sulut No HC : 010/I/HC/OKKPD-029/01/2019
3	Pala biji	Italia	Aflatoxins in whole nutmeg from Indonesia (high content of	Ditahan dan ditolak	Aflatoxin B1 75,0 µg/kg - ppb Aflatoxin	aflatoxin B1 5, Total aflatoxin 10 µg/kg - ppb. Regulasi : 1881/2006 setting maximum levels	Indoharvest Spice Jl. Joko Kendil, By Pass Mojokerto, Jawa Timur 61363

4	Grated Coconut	Italia		aflatoxin B1 dan Total)	Ditolak	Total 82,5 µg/kg - ppb	for certain contaminants in foodstuffs; Reg.UE 165/2010	No HC : 031/1/HC/OKKPD-003/02/1019 PT. Global Coconut Jl. Jaga IV, Redey, Tenga - Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara
5	Pala biji (Siauw nutmeg broken & cleaned	Belanda		Aflatoxins in nutmeg from Indonesia	Ditolak	Aflatoxin B1 = 12 ppb (µg/kg)	EU Legislation 1881/2006 Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuff. Max permitted level = 5 ppb (µg/kg)	PT. Gunung Intan Permata, Jl. Arie Lasut No. 28 Kombos Manado
6	Organic MD Nutmeg Whole ABCD	United Kingdom		Aflatoxins in organic whole nutmeg from Indonesia	Ditolak	13.8 ± 5.5 µg/kg - ppb	1881/2006 Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuff. Max permitted level = 5 ppb (µg/kg)	PT East Indian Agency Products

LAMPIRAN 4. KASUS KOMODITAS PERTANIAN IMPOR YANG DAPAT DISELESAIKAN

No	Waktu Kejadian	Kasus Pelanggaran	UPT	STATUS
1	07 Agustus 2019	Pemasukan 88 ekor unggas dari luar negeri	BBKP Belawan	P21, tanggal 27 Agustus 2019
2	04 Februari 2019	Pemasukan 2.500 kg bawang merah dari Malaysia.	BKP Kelas I Pekanbaru	P21, tanggal 29 Januari 2019
3	30 Agustus 2018	Pemasukan 6.930 kg bawang merah dan 1700 kg jahe dari Malaysia.	BKP Kelas I Pekanbaru	P21, tanggal 18 April 2019
4	20 Juli 19	Pemasukan 107 ekor burung Love bird dari Filipina	BBKP Soekarno Hatta	P21, tanggal 17 November 19
5	05 Juli 2019	Pengeluaran 1 ekor kucing (masuk dari luar negeri) yang masih dalam masa karantina di IKH	BBKP Soekarno Hatta	P21, tanggal 6 November 2019
6	26 Desember 2018	Pemasukan 17 ikat telur ayam konsumsi dari Malaysia.	SKP Kelas I Entikong	P21, tanggal 25 Februari 19
7	25 Januari 2019	Pemasukan 25 ikat telur ayam konsumsi dari Malaysia.	SKP Kelas I Entikong	P21, tanggal 02 Mei 19
8	20 Jan 19	Pemasukan 561 batang bibit lada dan 1 kg umbi jahe dari LN	BBKP Soekarno Hatta	PROSES
9	20 Feb 19	Pemasukan 68 ekor Love bird dari Filipina	BBKP Soekarno Hatta	PROSES

10	27 Feb 19	Pemasukan 32 batang bibit tanaman dari LN	BBKP Soekarno Hatta	PROSES
11	25 Juli 19	Pemasukan 216 ekor Love bird dari Filipina	BBKP Soekarno Hatta	PROSES
12	28 Mei 19	Pemasukan 1,960 ton daging kerbau dari Malaysia	BKP Kelas II Tarakan	PROSES
13	7 Maret 18	Pemasukan Sosis 62 karung/2976 kg, nugget 108 kg, bakso 120 kg, kentang beku 80 kg, bawang Bombay 12 karung/120 kg, beras ketan 52 karung/2,600 kg, daging iris (hamburger) 51,6 kg dari tawau-Malaysia	BKP Kelas II Tarakan	PROSES

LAMPIRAN 5. REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2019

No	ESELON I	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
1	SEKRETARIAT JENDERAL	1.787.690.530.000	1.757.651.582.618	98,32
2	INSPEKTORAT JENDERAL	94.136.261.000	89.993.615.373	95,60
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	5.928.348.242.000	4.697.449.049.191	79,24
4	DITJEN HORTIKULTURA	1.040.063.787.000	944.676.148.736	90,83
5	DITJEN PERKEBUNAN	1.116.345.160.000	1.072.741.473.213	96,09
6	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.089.592.037.000	1.961.635.163.170	93,88
7	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	4.646.356.942.000	4.008.589.282.139	86,27
8	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	1.907.162.394.000	1.816.990.102.160	95,27
9	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.602.896.004.000	1.483.334.907.529	92,54
10	BADAN KETAHANAN PANGAN	679.706.664.000	659.662.417.614	97,05
11	BADAN KARANTINA PERTANIAN	939.308.406.000	931.594.332.804	99,18
	JUMLAH	21.831.606.427.000	19.424.318.074.547	88,97

Sumber: OM SPAN Kemenkeu, 2019

LAMPIRAN 6. DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Matriks Kegiatan Pendukung Tahun 2019

3. Indikator Kinerja : Pertumbuhan Volume Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian/Realisasi	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Ditjen Tanaman Pangan (Produksi Ubi Jalar dan Aneka Kacang dan Umbi Lainnya)								
	Kegiatan Budidaya Ubi Jalar	Ha	1.100	1.100	100	6.600.000.000	6.574.672.000	99,62
	Kegiatan Budidaya Kacang Tanah	Ha	6.500	5.014	77,14	16.380.000.000	12.376.020.000	75,56
	Kegiatan Perbanyak Benih Sumber Palawija	Ha	2.000	3.200	160	40.000.000	40.000.000	100,00
	Pertemuan dalam Upaya Peningkatan Ekspor TP	Pertemuan	5	5	100,00	549.575.000	481.969.086	
Program Ditjen Hortikultura (Produksi Mangga, Manggis, Pisang untuk komoditas Ekspor)								
	Kawasan Mangga	Ha	1.800	1.800	100,00	12.102.600.000	11.749.294.479	97,08
	Kawasan Manggis	Ha	1.560	1.560	100,00	12.933.500.000	11.846.719.213	94,07
	Kawasan Pisang	Ha	1.500	1.475	98,33	29.647.400.000	27.306.114.647	92,10
	Kawasan Buah lainnya (Nenas)	Ha	95	95	100,00	2.028.250.000	2.028.250.000	100,00
	Kawasan florikultura (Krisan)	m2	12.000	12.000	100,00	1.247.000.000	1.210.621.237	97,08
	Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	Unit	167	165	98,80	19.220.000.000	18.116.917.813	94,26
	Benih Buah lainnya	Batang	1.475.000	1.360.362	92,23	10.926.000.000	9.112.416.691	83,40
	Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Unit	27	27	100,00	6.605.600.000	6.464.121.155	97,86
	Sertifikasi Benih Hortikultura	Unit	1.400	6.606	471,86	14.000.000.000	13.568.444.982	96,92
	Pengembangan Mutu dan Standarisasi	unit	162	150	92,59	5.917.100.000	5.019.787.796	84,84
	Pemasaran Produk Hortikultura	Unit	235	223	94,89	5.005.000.000	4.531.963.940	90,55
	Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Buah dan Florikultura	Bulan	12	12	100,00	9.002.791.000	8.734.668.640	97,02
	Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Bulan	12	12	100,00	8.865.121.000	8.684.365.336	97,96
Program Ditjen Perkebunan (Produksi Karet, Kelapa, Kopi, Kakao)								
	Fasilitas pascapanen komoditas perkebunan	KT	106	106	100	21.233.772.000	20.375.460.111	95,96
	Fasilitas pengolahan hasil perkebunan	Unit	142	142	100	47.868.622.000	46.185.616.285	97,50
	Pengembangan pemasaran hasil perkebunan	Keg	1	1	100	11.980.000	11.980.000	100,00
	Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan	KT	36	36	100	1.321.000.000	1.283.613.400	97,17
	Fasilitas teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	Bln	12	12	100	12.076.493.000	11.758.594.151	97,37
Program Ditjen PKH								
	Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Dokumen	68	68	100	18.740.274.000	17.506.632.176	93,42
	Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Unit	17	17	100	3.400.000.000	3.216.828.411	94,61
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN (PVP/TPP)								
	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran SDG Tanaman	Layanan Surat Izin	175	159	91			
	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan	Layanan Surat Izin	80	76	95			
	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman Panga	Layanan Surat Izin	60	38	63	471.300.000	460.171.848	93,42
	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Hortikultura dan RIPH	Layanan Surat Izin	1.050	2.758	263			
	Permohonan Izin Usaha Dan Pemasukan Obat Hewan	Layanan Surat Izin	450	229	51	280.000.000	274.515.650.000	98,04
	Permohonan Pemasukan KarkasDagingJeroan Dan Olahannya (KDJO)	Layanan Rekomendasi	855	1.206	141	503.950.000	489.453.900.000	97,12
TOTAL						266.137,328.000	249.409,212,947	93,71

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2019
4. Indikator Kinerja : Penurunan Volume Impor Untuk Produk Pertanian Nasional

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian/ Realisasi	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Ditjen Tanaman Pangan								
	Kegiatan Budidaya Kacang Hijau	Ha	6500	5,320	81.85	3,412,500,000	2,755,772,000	80.76
	Kegiatan Budidaya Ubi Kayu	Ha	1500	1,500	100	7,500,000,000	7,198,500,000	95.98
	Pertemuan dalam upaya penurunan impor tanaman pangan	Pertemuan	2	2	100	394,303,000	303,504,000	76.97
Program Ditjen Hortikultura (Cabe, Bawang Merah)								
	Benih Jeruk	Batang	692,000	689,500	99.64	4,778,500,000	4,580,874,296	95.86
	Benih sayuran lainnya	kg	100,000	95,000	95	2,600,000,000	2,380,546,370	91.56
	Kawasan Jeruk	Ha	3,250	3,185	98	31,008,875,000	28,968,976,182	93.42
	Kawasan sayuran lainnya (bawang Putih)	Ha	6,245	5,032	80.58	243,555,000,000	196,248,000,000	80.58
Program Ditjen PKH (Daging sapi dan kerbau)								
	Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Dokumen	68.00	68	100	18,740,274,000	17,506,632,176	93.42
	Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Unit	17.00	17	100	3,400,000,000	3,216,828,411	94.61
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN (PPVTPP)								
	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran SDG Tanaman	Layanan Surat Izin	175	159	91			
	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan	Layanan Surat Izin	80	76	95	471,300,000	460,171,848	93.42
	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman Panga	Layanan Surat Izin	60	38	63			
	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Hortikultura dan R.IPH	Layanan Surat Izin	1,050	2,758	263			
	Permohonan Izin Usaha Dan Pemasukan Obat Hewan	Layanan Surat Izin	450	229	51	280,000,000	274,515,650.00	98.04
	Permohonan Pemasukan KarkasDagingJeroan Dan Olahannya (KDJO)	Layanan Rekomendasi	855	1,206	141	503,950,000	489,453,900.00	97.12
TOTAL						316,644,702,000.00	264,383,774,833.00	83.50

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2019
5. Indikator Kinerja : Rasio Komoditas Ekspor Pertanian Yang Ditolak Negara Tujuan Terhadap Komoditas Ekspor Pertanian

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan								
	Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan	DOKUMEN	12	12	100	7,868,242,000	7,852,199,019	99.80
Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani								
	Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	DOKUMEN	41	41	100	7,841,325,000	7,684,047,078	97.99
	Kebijakan Pulau Karantina	DOKUMEN	1	1	100	122,436,000	119,296,000	97.44
Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati								
	Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	DOKUMEN	43	43	100	10,628,824,000	10,408,102,047	97.92
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian								
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	LAYANAN	1	1	100	43,301,312,000	43,154,663,660	99.66
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	LAYANAN	1	1	100	2,100,922,000	2,087,207,315	99.35
	Layanan Perkantoran	LAYANAN	1	1	100	28,574,042,000	28,487,059,710	99.70
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian								
	1822.101 Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati	DOKUMEN	21	21	100	10,736,461,000	10,725,717,336	99.90
	Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	DOKUMEN	13	13	100	5,054,401,000	5,043,871,147	99.79
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	LAYANAN	2	2	100	4,618,657,000	4,606,089,288	99.73
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	LAYANAN	2	2	100	7,932,677,000	7,891,322,213	99.48
	Layanan Perkantoran	LAYANAN	2	2	100	19,802,529,000	19,710,425,262	99.53
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati								
	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	SERTIFIKAT	1,024,433	1,206,938	117.82	77,962,194,000	76,602,771,125	98.26
	Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaaan	TAHUN	1	1	100	38,403,780,000	37,719,329,359	98.22
	Pengawasan dan Penindakan	DOKUMEN	50	90	180	7,243,104,000	7,029,743,664	97.05
	Prasarana Wilker, sentra produksi, distribusi dan Importasi/Pengembangan Sapi	M2	2968	2968	100	8,550,704,000	8,540,716,848	99.88
	Sarana PLBN	UNIT	328	332	101.22	4,795,672,000	4,776,575,912	99.60
	Prasarana Infrastruktur PLBN	M2	1,394	1,665	119.44	8,820,049,000	8,811,822,750	99.91
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	LAYANAN	128	483	377.34	158,303,625,000	157,776,269,802	99.67
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	LAYANAN	94	219	232.98	48,446,961,000	47,868,054,601	98.81
	Layanan Perkantoran	LAYANAN	127	409	322.05	438,200,489,000	434,699,048,668	99.20
TOTAL						939,308,406,000	931,594,332,804	99.18

Matriks Kegiatan Pendukung Tahun 2019

6. Indikator Kinerja : Rata-rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian/Realisasi	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Ditjen Tanaman Pangan (Padi, jagung, kedelai)								
	Budidaya Padi	Ha	1,380,390	975,915	70.70	1,314,361,550,000	678,522,026,993	51.62
	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Unit	500	495	99.00	100,000,000,000	90,383,925,000	90.38
	Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Padi	Ha	231	175	75.54	5,177,170,000	4,627,693,657	89.39
	Bantuan Benih Pusat (Padi Lahan Kering)	Ha	216,463	199,207	92.03	53,758,012,685	48,550,215,710	90.31
	Bantuan Benih Pusat (Padi Inbrida)	Ha	626,220	606,481	96.85	150,974,666,095	139,776,790,395	92.58
	Bantuan Benih Pusat (Padi Hibrida)	Ha	36,153	36,153	100.00	32,039,058,000	31,305,641,450	97.71
	P3BP	Ha	2,600	2,575	99.04	4,472,000,000	4,286,675,000	95.86
	Sertifikasi, Pengawasan Peredaran Benih	Ha	118,500	84,455	71.27	39,428,000,000	38,421,572,083	97.45
	Kegiatan Budidaya Jagung	Ha	814,975	601,129	73.76	586,670,200,000	410,168,246,378	69.91
	Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Jagung	ha	2	2	100.00	36,000,000	36,000,000	100.00
	Bantuan Benih Jagung	ha	1,704,000	1,542,274	90.51	1,043,580,000,000	990,405,344,504	94.90
	Pilot Project Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani	ha	1075	1,073	99.81	5,788,875,000	5,740,705,000	99.17
	Kegiatan Budidaya Kedelai	ha	600,000	482,257	80.38	375,999,552,000	249,257,420,169	66.29
	Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Kedelai	ha	136	59	43.38	950,200,000	593,371,300	62.45
	P3BK	ha	1,966	1,523	77.47	4,001,040,000	3,985,930,700	99.62
Program Ditjen Hortikultura (Cabe, Bawang Merah)								
	Benih Bawang Merah	kg	800,000	793,000	99.13	17,600,000,000	16,098,172,859	91.47
	Benih Cabai	Batang	400,000	390,000	97.50	1,200,000,000	1,147,774,030	95.65
	Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah	Ha	900	888	98.67	16,206,200,000	15,705,566,275	96.91
	Kawasan Aneka Cabai	Ha	10,100	10,100	100.00	132,000,000,000	125,736,823,095	95.26
	Kawasan Bawang Merah	Ha	5,200	5,200	100.00	98,900,000,000	94,653,277,133	95.71
	Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	bulan	12	12	100.00	11,522,322,000	10,985,882,864	95.34
Program Ditjen Perkebunan (Gula Tebu)								
	Perluasan Tanaman tebu	Ha	1,045	945	90.43	8,764,127,000	7,489,707,701	85.46
	Intensifikasi Tanaman tebu	Ha	14,055	14,000	99.61	60,940,627,000	59,513,928,299	97.66
	Pembangunan KBD	Ha	150	103	68.67	374,500,000	2,680,287,000	71.57
	Pengawalan dan pendampingan Tanaman Tebu	Keg	13	13	100.00	3,860,207,000	3,698,022,692	95.80
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Keg	106	106	100.00	4,716,351,000	4,667,425,050	98.96
	Peningkatan Kapabilitas	Pkt	2	2	100.00	791,840,000	764,488,963	96.55
	Penyusunan Masterplan	Pkt	1	1	100.00	346,000,000	339,957,800	98.25
	Peningkatan Penerapan tebu Adaptif	Keg	2	2	100.00	687,500,000	500,479,250	72.80
Program Ditjen PKH (daging sapi dan kerbau)								
	Optimalisasi Produksi	ekor	3,000,000	3,586,374	119.55	356,514,905,000	340,612,567,907	95.54
	Penanggulangan Gangguan Reproduksi	ekor	67,780	61,859	91.26	18,380,169,000	16,565,091,963	90.12
	Hijauan Pakan Ternak	ha	1,752	1,893.00	108.05	31,414,054,000	29,652,282,376	94.39
	Pengendalian Pemotongan Betina produktif	lokasi	80	80	100.00	9,590,081,000	9,375,960,104	97.77
TOTAL						4,494,415,706,780	3,436,249,253,700	76.46

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2019
7. Indikator Kinerja : Jumlah Kasus Pangan Segar Nasional yang Membahayakan Kesehatan Manusia

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Badan Ketahanan Pangan								
	Sertifikasi keamanan PSAT atau Sertifikasi Prima	Sertifikat		570		26,781,000,000	25,145,288,824	93.89
	sertifikasi kesehatan PSAT tujuan ekspor (health certificate/ HC)	Sertifikat		527				
	Pendaftaran/registrasi PSAT maupun pendaftaran rumah kemas (packing house)	Registrasi		1,448				
	Monitoring Keamanan PSAT	Rekomendasi		35				
TOTAL						26,781,000,000	25,145,288,824	93.89

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2019
8. Indikator Kinerja : Rasio Kasus Komoditas yang Diselesaikan Terhadap Total Kasus Komoditas Pertanian Impor

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan								
	Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan, Kerjasama dan Informasi Pel DOKUMEN		12	12	100.00	7,868,242,000	7,852,199,019	99.80
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati								
	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	SERTIFIKAT	1,024,433	1,206,938	117.82	77,962,194,000	76,602,771,125	98.26
	Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaaan	TAHUN	1	1	100.00	38,403,780,000	37,719,329,359	98.22
	Pengawasan dan Penindakan	DOKUMEN	50	90	180.00	7,243,104,000	7,029,743,664	97.05
	Prasarana Wilker, sentra produksi, distribusi dan Importasi/Pengembangan S	M2	2968	2968	100.00	8,550,704,000	8,540,716,848	99.88
	Sarana PLBN	UNIT	328	332	101.22	4,795,672,000	4,776,575,912	99.60
	Prasarana Infrastruktur PLBN	M2	1394	1665	119.44	8,820,049,000	8,811,822,750	99.91
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	LAYANAN	128	483	377.34	158,303,625,000	157,776,269,802	99.67
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	LAYANAN	94	219	232.98	48,446,961,000	47,868,054,601	98.81
	Layanan Perkantoran	LAYANAN	127	409	322.05	438,200,489,000	434,699,048,668	99.20
TOTAL						798,594,820,000	791,676,531,748	99.13

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2019

9. Indikator Kinerja : Koefisien Variasi Harga Komoditas Pertanian Strategis Nasional

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Badan Ketahanan Pangan								
	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia	Gapoktan	1,325	1,321	99.70	148,300,000,000	146,734,513,884	98.94
TOTAL						148,300,000,000	146,734,513,884	98.94

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN UTAMA
BADAN LITBANG PERTANIAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2019

No.	KEGIATAN	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT	VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN Rp. (000)	REALISASI		ANGGARAN Rp. (000)	%
						FISIK VOLUME	PROGRESS (%)		
1	Dukungan Manajemen, Fasilitas Dan Instrumen Teknis Dalam Pelaksanaan	Jumlah kerja sama kemitraan, sinergi penelitian pertanian, dan pemanfaatan hasil dengan Perguruan Tinggi	40	kerjasama	30,300,993	387,50		26,031,144	85,91
		Jumlah SDM yang mengikuti S3, S2, S1, Training dan Scientific Exchange	1,200	orang	50,357,745	146,69		45,560,127	90,47
		Jumlah Invensi yang didaftarkan perlindungan HKI, promosi teknologi, dan maskan pernjangan kerja sama lisensi	45	Invensi lisensi	1,520,000	1,08		1,432,651	94,25
			10		1,453,650	53		1,385,059	95,28
			232		3,237,630	339,04		3,233,357	99,87
			100		1,960,380	112,25		1,958,572	99,91
			81		2,888,400	83,73		2,883,661	99,16
			15		300,000	103,07		293,328	97,78
			7		814,000	108,08		809,207	99,41
			2		10,354,753	80,00		10,230,301	98,80
2	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	Benih sumber padi	2	Ton	2,313,800	500,00		2,296,805	99,27
		Benih sumber kedelai	100	Ton	700,000	400,00		699,386	99,91
		Benih sumber bawang	81	Ton	1,386,000	154,46		1,372,028	99,21
		Benih sumber tanaman Pangan Lainnya	15	Ton	1,386,000	166,67		1,372,028	99,21
		Benih sumber kacang kedelai dan disubstitusi benih terintegrasi dengan 1000 desa	12	Properti	2,450,000	100,00		2,415,346	98,99
		Diseminasi	7	Teknologi	10,354,753	80,00		10,230,301	98,80
		Varietas unggul baru tanaman padi	2	VIB	2,313,800	500,00		2,296,805	99,27
		Varietas unggul baru kedelai	100	VIB	700,000	400,00		699,386	99,91
		Varietas unggul baru bawang	81	VIB	1,386,000	154,46		1,372,028	99,21
		Varietas unggul baru kacang kedelai dan disubstitusi benih terintegrasi dengan 1000 desa	12	VIB	2,450,000	100,00		2,415,346	98,99
3	Penelitian dan Pengembangan Hortikultura	Teknologi budidaya, panen, dan pascapanen primer tanaman padi	6	Paket Teknologi	2,450,000	100,00		2,415,346	98,99
		Teknologi budidaya, panen, dan pascapanen primer tanaman kedelai	1	Paket Teknologi	255,000	100,00		254,994	100,00
		Teknologi budidaya, panen, dan pascapanen primer tanaman jagung	2	Paket Teknologi	950,000	100,00		946,141	99,59
		Teknologi Tanaman Pangan Lainnya	3	Prodi	650,000	88,00		647,533	99,62
		Rekomendasi kebijakan dan kelayakan sosial ekonomi pengembangan tanaman pangan	5	Rekomendasi	1,700,000	87,00		1,511,848	88,93
		Dukungan penelitian	12	Bulan	118,017,925	91,67		120,205,570	102,35
		Jumlah VIB Hortikultura	12	VIB	3,450,000,000	100,00		3,661,335,538	106,13
		Jumlah Benih Hortikultura							
		a. Benih sumber Sawuran	50,200	Kg	2,238,251,000	350,27		2,220,974,194	99,98
		b. Benih sumber bawang merah	12,500	Kg	1,445,295,000	100,00		1,440,451,354	99,96
c. Benih sumber kacang	40,000	Kg	1,166,450,000	100,00		1,162,662,211	99,70		
d. Benih sumber sayuran lainnya	500	Kg	652,240,000	100,00		655,661,271	99,76		
Jumlah Benih Sebar Sawuran	17,000	Kg	425,000,000	0		424,676,442	99,92		
a. Benih sebar bawang merah	12,500	Kg	450,000,000	0		449,865,985	99,97		
b. Benih sebar bawang putih	15,000	Kg	450,000,000	0		449,865,985	99,97		
c. Benih sebar kacang	15,000	Kg	450,000,000	0		449,865,985	99,97		
d. Benih sebar sayuran lainnya	15,000	Kg	450,000,000	0		449,865,985	99,97		
Jumlah Benih Sebar Buah Tropika	24,350	Balok	400,000,000	0		398,886,495	99,65		
Benih sumber Anonok	5,000	Plakat	175,000,000	0		174,792,400	99,88		
Benih sumber Kean	360,000	Stek	360,000,000	0		359,451,000	99,85		
Benih Buah Tropika dan Sub Tropika	37,000	batuan	895,000,000	29,25		891,700,000	99,58		
Jumlah Rekomendasi	11	Rekomendasi teknologi	8,300,000,000	0		8,288,027,393	99,86		
Jumlah Teknologi Produk dan Perbaikan Mutu Benih Tanaman Hortikultura	10	teknologi	7,043,150,000	0		7,038,027,000	99,64		
Jumlah Diseminasi Teknologi	10	teknologi	7,043,150,000	0		7,038,027,000	99,64		
Dukungan Penelitian dan Pengembangan	10	teknologi	7,043,150,000	0		7,038,027,000	99,64		
4	Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	Varietas Unggul Tanaman Perkebunan	5	Varietas	1,954,900,000	26		1,946,148,919	99,15
		Teknologi Tanaman Perkebunan	14	Teknologi	3,239,804,000	14		3,211,888,272	99,25
		Benih Unggul Tebu Mendukung Kemandirian Benih	3,190,000	Budget	886,500,000	3,917,044		881,097,672	99,39
		Taman Sains Pertanian	1	Provinsi	4,000,000,000	1		3,975,207,435	99,38
		Bekomendasi Kebijakan Perkebunan	2	Rekomendasi	500,000,000	4		491,547,730	98,31
		Diseminasi Inovasi teknologi Komoditas Tanaman Perkebunan	14	Teknologi	6,238,490,000	20		6,165,030,532	98,82
		Plasma Nutra Tanaman Perkebunan	5,802	Akresi	1,533,075,000	5,926		1,529,697,105	99,78
		Taman Teknologi Pertanian	2	Provinsi	6,000,000,000	2		5,962,081,941	99,37
		Benih Komoditas perkebunan non strategis	1,136,800	Polon	6,383,060,000	1,136,800		6,335,964,814	99,26
		Jaringan kerjasama library perkebunan	5	Dokumen kerjasama	1,667,590,000	30		1,619,146,394	97,07
Model Inovasi perenihan untuk pengembangan Benih VUB	3	Model	6,784,791,000	3		6,779,181,197	99,92		
Varietas Unggul Tebu	3	Varietas	720,000,000	3		716,123,670	99,46		
Teknologi Produktif Tebu	3	Teknologi	660,000,000	3		671,231,270	98,78		
Layanan Humas Perkebunan	1	Layanan	250,000,000	1		246,481,975	98,59		
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan	7,476,364,000	1		7,094,990,494	94,94		
Layanan Sarana dan Prasarana Eksternal	1	Layanan	6,000,000,000	1		5,980,000,000	99,67		
Dukungan manajemen sektor tanaman perkebunan	12	Bulan	67,384,161,000	100,00		66,694,884,455	98,98		

No.	KEGIATAN	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT	VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN Rp. (000)	REALISASI		ANGGARAN Rp. (000)	%
						FISIK VOLUME	PROGRESS (%)		
5	Penelitian dan Pengembangan Peternakan	Uji coba veteriner terkonsepasi dan terakreditasi	100	Jenis	229.571.000	100,00	100,00	224.036.450	97,53
		Bibit sumber unggunan (Non Strategic)	55.837	Ekor	708.776.000	90,00	90,00	683.756.500	96,47
		Galur unggul harapan temak dan tanaman pakan temak	18	Galur	4.599.945.000	100,00	100,00	4.337.761.398	94,30
		Teknologi peternakan dan veteriner	16	Teknologi	2.783.435.000	100,00	100,00	2.766.687.098	99,43
		Bibit sumber ternak	400	Ekor	1.180.529.000	100,00	100,00	1.180.473.061	100,00
		Kebijakan pembangunan peternakan, kesehatan hewan dan kelayakan ekonomi lektokoli	5	Rekomendasi	400.000.000	100,00	100,00	366.889.752	91,72
		Galur unggul harapan temak komoditas strategis	2	Galur	1.500.000.000	100,00	100,00	1.496.553.880	99,77
		Bibit ternak komoditas strategis	50	Ekor	3.120.000.000	100,00	100,00	2.916.526.669	93,47
		Teknologi peternakan dan veteriner komoditas strategis	15	Teknologi	5.052.741.000	100,00	100,00	4.959.750.686	98,16
		Inovasi perbibitan komoditas unggulan	84.800	Ekor	1.950.700.000	100,00	100,00	1.786.546.700	91,58
6	Penelitian/Perkayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	Jejring dan atau kerjasama penelitian, pengembangan peternakan dan veteriner yang terbentuk	4	MOU	3.941.039.000	100,00	100,00	2.914.605.754	73,96
		Diseminasi dan penyajian teknologi peternakan untuk dimanfaatkan secara luas	5	Kegiatan	4.656.481.000	100,00	100,00	4.379.240.992	94,05
		SDG ternak tanaman pakan serta mikro peternakan dan veteriner	10	Galur	860.000.000	100,00	100,00	824.862.634	95,93
		Layanan humas Liband Peternakan dan Veteriner	5	Layanan	3.582.054.000	100,00	100,00	2.781.111.242	77,04
		Peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengendalian zoonosis	2.163.200	Ekor	159.135.525.000	100,00	100,00	146.306.119.967	91,94
		Layanan sarana dan prasarana internal	5	Layanan	14.112.219.000	100,00	100,00	13.483.669.506	95,51
		Layanan dukungan manajemen salker	5	Layanan	9.491.066.000	100,00	100,00	9.154.250.544	96,46
		Layanan perikanan	12	Bulan	58.112.493.000	100,00	100,00	57.096.607.878	98,25
		Rumusan Kebijakan Pengembangan Mekanisasi	2	Rekomendasi	250.000	100,00	100,00	241.725.3	96,71
		Teknologi Mekanisasi Pertanian	8	Teknologi	5.524.820	100,00	100,00	5.431.104.9	98,13
7	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Dan Sumberdaya Genetik Pertanian	Prototipe Alas Peternakan	30	Unit	700.000	100,00	100,00	642.642.8	91,81
		Alat dan Mesin pertanian yang diuji	127	Unit	450.000	100,00	100,00	429.473.3	95,44
		Sumberdaya Genetik yang Terkonservasi dan Terekumentasi	17	galur akses	1.823.889.000	100,00	100,00	1.800.860.150.000	93,61
		Salur Burayak Unggul Ternakan	3.100	akses	435.000.000	100,00	100,00	429.245.696.000	98,68
		Teknologi Pascapanenan Komoditas Unggulan Lainnya	9	Teknologi	1.300.000	100,00	100,00	1.291.862	99,37
		Diseminasi Teknologi Liband Pascapanenan	3	Teknologi	2.121.590	100,00	100,00	2.077.354	97,90
		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pascapanenan	3	Rekomendasi	300.000	100,00	100,00	267.495	89,13
		Perbaikan Pascapanenan Komoditas Strategis	8	Teknologi	2.750.000	156,00	100,00	2.714.033	98,69
		Layanan Hubungan Masyarakat BB Pascapanenan	1	Layanan	1.129.590	100,00	100,00	1.389.551	99,03
		Layanan Kerjasama dan pendayagunaan Hasil Liband	1	Layanan	1.025.000	100,00	100,00	1.014.592	99,48
8	Penelitian dan pengembangan Pascapanenan Pertanian	Model Pengembangan Komoditas Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi	1	model	9.254.781	100,00	100,00	9.227.261	99,70
		Peningkatan produksi Ternak Unggas melalui Diseminasi Inovasi dan Pengembangan Inovasi Hasil Penelitian bibit ternak unggas lokal	17	galur akses	45.774.575	100,00	100,00	42.693.832	93,20
		Teknologi Pascapanenan Komoditas Unggulan Lainnya	9	Teknologi	1.300.000	100,00	100,00	1.291.862	99,37
		Diseminasi Teknologi Liband Pascapanenan	3	Teknologi	2.121.590	100,00	100,00	2.077.354	97,90
		Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pascapanenan	3	Rekomendasi	300.000	100,00	100,00	267.495	89,13
		Perbaikan Pascapanenan Komoditas Strategis	8	Teknologi	2.750.000	156,00	100,00	2.714.033	98,69
		Layanan Hubungan Masyarakat BB Pascapanenan	1	Layanan	1.129.590	100,00	100,00	1.389.551	99,03
		Layanan Kerjasama dan pendayagunaan Hasil Liband	1	Layanan	1.025.000	100,00	100,00	1.014.592	99,48
		Model Pengembangan Komoditas Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi	1	model	9.254.781	100,00	100,00	9.227.261	99,70
		Peningkatan produksi Ternak Unggas melalui Diseminasi Inovasi dan Pengembangan Inovasi Hasil Penelitian bibit ternak unggas lokal	17	galur akses	45.774.575	100,00	100,00	42.693.832	93,20
9	Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	682.350	ekor	3.253.000	100,00	100,00	3.051.054	93,29
		Layanan Dukungan Manajemen Salker	1	Layanan	1.780.000	100,00	100,00	1.763.885	99,09
		Agaritas Perikanan	1	Layanan	16.588.175	100,00	100,00	16.038.477	97,87
		Jumlah Informasi Geospasial Sumber Daya Lahan Pertanian	53	Peta	6.633.337	100%	100%	6.633.337	97,78
		Jumlah teknologi baru pengelolaan lahan, air, iklim, dan lingkungan pertanian mendukung sistem pertanian bioindustri berkelanjutan	16	Tek	29.693.715	100%	100%	29.693.715	97,46
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian	2	Rek	674.547	100%	100%	674.547	98,02
		Jumlah teknologi Untuk Lahan Eks Perombangan dan Pemetaan	2	Tekn	988.884	100%	100%	988.884	99,82
		Jumlah Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim	1	Tekn	489.293	100%	100%	489.293	97,88
		Jumlah Teknologi Inovasi	1	Tekn	1.389.293	100%	100%	1.389.293	97,88
		Diseminasi Inovasi Teknologi Penelelahan SDP	9	Tekn	8.310.467	100%	100%	8.310.467	98,87
10	Pengujian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi	Dukungan	12	Bulan	71.530.688	100%	100%	71.530.688	95,99
		Teknologi Spesifik Lokasi	105	Teknologi	17.256.994	100,00	100,00	16.544.038	95,87
		Diseminasi dan Penyajian Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna	125	Paket teknologi	1.123.919.998	100,00	100,00	1.082.264.357	95,86
		Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian	34	Rekomendasi Kebijakan	2.514.310	100,00	100,00	2.356.363	93,80
		Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi	66	Model	5.964.458	100,00	100,00	5.835.817	97,84
		Bibit Babi (ton)	406	ton	6.205.270	100,00	100,00	5.146.098	82,95
		Bibit Ayam (ton)	138	ton	3.426.669	100,00	100,00	3.434.114	98,78
		Bibit Kambing (ton)	138	ton	3.426.669	100,00	100,00	3.434.114	98,78
		Bibit Kuda (ton)	306	ton	5.488.268	100,00	100,00	4.800.168	87,33

No.	KEGIATAN	KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT	VOLUME	SATJAN	PAGU ANGGARAN Rp. (000)	REALISASI				
						VOLUME	FISIK	PROGRESS (%)	ANGGARAN Rp. (000)	%
		Jumlah Timah Sains Pertanian (TSP)	5	Provinsi	29.611,484		5	90,00	25.603,587	86,47
		Jumlah Timah Teknologi Pertanian (TTP)	4	Kabupaten	8.650,000		4	100,00	8.169,716	94,43
		Jumlah Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bondustri di Kabupaten	13	Provinsi	5,452,927		13	100,00	5,146,087	94,41
		Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Disemasi Inovasi mendukung Peningkatan Kemiskinan	1,939,200	Ekor	139,187,550		1,863,100	100,00	127,486,431	91,59
		Dukungan pengkajian dan percepatan disemasi inovasi teknologi pertanian.	12	Bulan	374,515,659		12	100,00	359,726,193	96,05
		TOTAL			599,001,610,617				574,906,945,724	95,98

MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2019

1.1. Indikator Kinerja : Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Terhadap Total Irigasi Tersier yang Dibutuhkan

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	Pagu	Realisasi (Rp)	%	
Program Ditjen Prasarana Sarana Pertanian								
1	Rehab Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Ha	154,766	154,666	100.06	183,944,734,000	183,824,734,000	99.93

Matriks Kegiatan Pendukung Tahun 2019

12. Indikator Kinerja : Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Berdasarkan Kebutuhan (Pra Pasca Panen)

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
	Program Ditjen Tanaman Pangan							
	Fasilitasi Alsintan Pasca Panen	Unit	11,139	11,157	100.16	842,352,542,000	773,399,177,196	91.81
	Program Ditjen Hortikultura (Cabe, Bawang Merah)							
	Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	Unit	237	232	97.89	37,580,000,000	36,050,230,552	95.93
	Fasilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Bulan	12	12	100.00	8,865,121,000	8,684,365,336	97.96
	Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	Unit	167	165	98.80	19,220,000,000	18,116,917,813	94.26
	Program Ditjen Perkebunan (Gula Tebu)							
	Pengembangan pascapanen komoditas perkebunan	KT	106	106	100.00	21,233,772,000	20,375,424,111	95.96
	Pengembangan pengolahan perkebunan	Unit	136	136	100.00	44,466,772,000	43,323,766,285	97.43
	Program Ditjen PKH (daging sapi dan kerbau)							
	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Serifikat	135	191	141.48	13,756,657,000	11,865,366,374	86.25
	Program Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian							
	Alokasi Fasilitas Alsintan Pra Panen	Unit	15,056	15,0520	100	609,678,000,000	577,072,208,272	94.65
	TOTAL					1,597,152,864,000	1,488,887,455,939	93.22

Matriks Kegiatan Pendukung Tahun 2019

13. Indikator Kinerja : Rasio Luas Bahan Baku Pertanian yang Tersedia Terhadap Kebutuhan

No	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
	Program Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian							
1	Cetak sawah	Ha	6,000	6,000	100	99,000,000,000	98,999,000,000	100.00
2	Optimasi Lahan rawa	Ha	404,109			1,737,668,700,000	1,427,528,417,300	82.15
	TOTAL					1,836,668,700,000	1,526,527,417,300	83.11

Matriks Kegiatan Pendukung Tahun 2019

14. Indikator Kinerja : Rasio Serangan OPT dan DPI Terhadap Luas Tanam

No	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Ditjen Tanaman Pangan								
1	Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)	Ha	2,325	2,315	99.57	3,753,540,000	3,705,870,000	98.73
2	Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI)	Ha	500	500	100.00	2,518,856,000	2,494,988,360	99.05
3	Gerakan Pengendalian OPT	Ha	21,395	21,395	98.57	4,558,357,000	4,264,466,000	93.55
4	Dem Area Budidaya Tanaman Sehat dan DPI	Ha	100,000	99,823	99.82	191,170,000,000	190,158,154,874	99.47
5	Sarana Pengendalian OPT	paket	3	3	100.00	53,940,000,000	52,996,787,150	98.25
6	Petani Pengamat	orang	726	726	100.00	2,178,000,000	2,178,000,000	100.00
7	Sarana Penanganan DPI (Pompa)	unit	800	800	100.00	8,000,000,000	7,797,577,250	97.47
8	Bahan Perbanyak APH/Refugia	unit	87	87	100.00	1,649,550,000	1,630,845,000	98.87
9	Perbanyak Rumah Burung Hantu	unit	225	225	100.00	450,000,000	450,000,000	100.00
Program Ditjen Hortikultura (Cabe, Bawang Merah)								
1	Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura	Bulan	12	12	100.00	6,187,543,000	5,920,335,322	95.68
2	Desa Pertanian Organik	Desa	250	250	100.00	13,000,000,000	12,755,551,459	98.12
Program Ditjen Perkebunan (Gula Tebu)								
1	Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	Ha	7,350	7,350	100.00	15,156,405,000	14,834,639,320	97.88
2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan/Kebun	KT	7	7	100.00	2,161,825,000	2,121,820,326	98.15
3	Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa	100	100	100.00	21,203,305,000	20,884,498,465	98.50
4	Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan	Bulan	12	12	100.00	9,741,700,000	9,675,085,524	99.32
TOTAL						335,669,081,000	331,868,619,050	98.87

Matriks Kegiatan Pendukung Tahun 2019

15. Indikator Kinerja : Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis Terhadap Total Wilayah yang Berdampak Penyakit Hewan Menular Strategis

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Ditjen PKH (daging sapi dan kerbau)								
	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	sampel	142,632	264,371	185.35	50,512,113,000	48,291,551,372	95.60
	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	dosis	3,526,450	3,529,546	100.09	64,571,017,000	59,932,514,594	92.82
	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	dok	135	191	141.48	13,756,657,000	11,865,366,374	86.25
	Kelengkapan Veteriner	unit	381	381	100.00	70,548,570,000	64,475,612,254	91.39
TOTAL						199,388,357,000	184,565,044,594	92.57

Matriks Kegiatan Pendukung Tahun 2019

16. Indikator Kinerja : Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional.

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya								
1	Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Sawadaya	Poktan	20,190	20,190	100.00	4,200,000,000	4,109,445,524	97.84
2	Sekolah Lapang	Poktan	54,106	54,160	100.10	23,250,000,000	23,031,728,780	99.06
3	Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi	Poktan	14,000	14,000	100.00	3,400,000,000	3,343,445,310	98.34
TOTAL						30,850,000,000	30,484,619,614	98.82

Matriks Kegiatan Pendukung Tahun 2019

17. Indikator Kinerja : Rasio Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya								
1	Pemberian dukungan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	127,942,080,000	114,698,344,800	89.65
2	Pemberian Honorarium bagi THL-TBPP untuk memenuhi kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian	-	-	-	-	289,244,852,000	276,050,984,128	95.44
TOTAL						417,186,932,000	390,749,328,928	93.66

Matriks Kegiatan Pendukung Tahun 2019

18. Indikator Kinerja : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

NO.	RENCANA AKSI	SATUAN	TARGET	REALISASI OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Program Sekretariat Jenderal							
Biro Hukum							
1	Pelaksanaan Prolektan	laporan	1	1	162,300,000	162,075,000	99.86
2	Evaluasi Pencapaian Prolektan	laporan	1	1	114,950,000	114,505,001	99.61
3	Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian	laporan	1	1	288,478,000	286,537,000	99.33
4	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	laporan	1	1	503,786,000	500,699,136	99.39
5	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Prasarana Sarana Penelitian dan Penelembaan	laporan	1	1	387,992,000	377,967,778	97.42
6	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan	laporan	1	1	334,356,000	325,416,300	97.33
7	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Karantina	laporan	1	1	465,380,000	457,157,328	98.23
9	Pembahasan RPP Bidang Perkebunan	laporan	1	1	239,656,000	237,805,000	99.23
10	Penyusunan RPP Bidang Prasarana Sarana Penelitian dan Pengembangan	laporan	1	1	292,900,000	291,900,000	99.66
11	Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pulau Karantina	laporan	1	1	214,800,000	209,831,000	97.69
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ternak dan Hewan	laporan	1	1	192,050,000	191,140,000	99.53
16	Rapat Koordinasi dan Inventarisasi Advokasi Aset Kementan dan Pemberian Bantuan Hukum Lindung Kementan	laporan	1	1	191,250,000	183,950,000	96.18
17	Pemberian Pertimbangan dan Litigasi Hukum	laporan	1	1	761,070,000	748,493,400	98.35
19	Pemantauan dan Evaluasi Layanan Bantuan Hukum	laporan	1	1	37,780,000	34,888,000	92.35
20	Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan	laporan	1	1	1,111,755,000	1,098,812,725	98.84
Biro Perencanaan							
1	Workshop evaluasi DAK bidang pertanian	laporan	1	1	1,138,705,000	1,136,464,000	99.80
2	Pemantauan dan evaluasi subsidi asuransi pertanian dan kredit program pertanian	laporan	1	1	305,575,000	303,812,896	99.42
3	Evaluasi DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 dan Pemantauan DAK Bidang Pertanian Tahun 2019	dokumen	1	1	462,595,000	455,760,253	98.52
4	Workshop Aplikasi Pengelolaan Kinerja (eSakip) Kementerian Pertanian tahun 2019	dokumen	1	1	299,410,000	298,145,000	99.58
5	Pelaporan Capaian Indikator Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian	laporan	8	8	80,350,000	79,600,000	99.07
6	Dukungan dan pemantauan Kementerian Pertanian pada program TNI Manuacal Membangun Desa (TMMD)	laporan	1	1	35,000,000	34,872,100	99.63
7	Workshop dan monitoring aplikasi Money	laporan	2	2	1,044,585,000	1,042,149,158	99.77

NO.	RENCANA AKSI	SATUAN	TARGET	REALISASI OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
8	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	dokumen	1	1	255,960,000	255,302,794	99.74
9	Pelaporan Capaian Kinerja Kegiatan Yang Dipantau Kantor Staf Presiden	Laporan	1	1	145,183,000	144,053,500	99.22
10	Workshop Penelaahan RKA DAK Sub Bidang Pertanian 2019	laporan	1	1	851,873,000	850,680,750	99.86
11	Penyusunan Data Teknis DAK Bidang Pertanian TA. 2019	laporan	1	1	576,160,000	575,284,700	99.85
12	Workshop Regional Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pertanian Tahun 2019	laporan	1	1	987,055,000	985,893,500	99.88
13	Koordinasi Identifikasi Anggaran Subsidi Kredit Program dan Asuransi Pertanian Kementerian	laporan	1	1	306,910,000	305,523,200	99.55
14	Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Kementerian Tahun 2019	laporan	1	1	189,920,000	188,439,250	99.22
15	Penyusunan Data Base Satker DIPA Kementerian Tahun 2018	laporan	1	1	35,150,000	35,085,500	99.82
16	Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Pembangunan Pertanian	laporan	1	1	1,676,783,000	1,672,756,500	99.76
17	Workshop Penyusunan Anggaran Kementerian Berbasis Kinerja TA.2019	laporan	1	1	274,296,000	273,975,811	99.88
18	Penyusunan Nota Keuangan	laporan	1	1	40,050,000	39,965,750	99.79
19	Identifikasi Hasil revisi DIPA dan POK TA.2018	laporan	1	1	205,508,000	205,218,900	99.86
20	Koordinasi Penelitian RKAKL Kementerian	laporan	1	1	967,877,000	965,473,500	99.75
21	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional Tahun 2019	dokumen	1	1	1,078,725,000	1,076,667,097	99.81
22	Koordinasi Trilateral Meeting dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	document	1	1	171,610,000	170,896,000	99.58
23	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Tahun 2019	dokumen	1	1	290,110,000	289,035,000	99.63
24	Penyusunan dan Sosialisasi E-Proposal untuk Perencanaan 2020	document	1	1	1,466,056,000	1,458,444,565	99.48
25	Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Lingkup Kementerian Pertanian	dokumen	1	1	205,320,000	203,032,480	98.89
26	Pengumpulan Data Perencanaan Pembangunan Pertanian	Dokumen	1	1	296,552,000	290,861,500	98.08
27	Koordinasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Terpadu dan Lintas Sektoral	Document	1	1	536,865,000	534,208,029	99.51
28	Reviu dan Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian jangka menengah	Dokumen	1	1	996,448,000	979,995,371	98.35
29	Reviu dan Penyusunan perencanaan pembangunan pertanian jangka panjang	Dokumen	1	1	50,140,000	49,440,000	98.60
30	Penguatan Basis Data Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dokumen	1	1	733,773,000	731,136,700	99.64
31	Penguatan Basis Data Kawasan Perkebunan	Dokumen	1	1	884,570,000	859,700,000	97.19
32	Penguatan Basis Data Kawasan Peternakan	Dokumen	1	1	794,800,000	792,682,500	99.73
33	Pemetaan dan Review Proses Bisnis Perencanaan Wilayah TP Horti	Dokumen	1	1	271,670,000	259,304,300	95.45
34	Pemetaan dan Review Proses Bisnis Perencanaan Wilayah Perkebunan	Dokumen	1	1	342,520,000	337,011,915	98.39
35	Pemetaan dan Review Proses Bisnis Perencanaan Wilayah Peternakan	Dokumen	1	1	232,150,000	231,327,600	99.65
36	Evaluasi IKU kementerian pertanian	Dokumen	1	1	70,250,000	69,730,000	99.26

NO.	RENCANA AKSI	SATUAN	TARGET	REALISASI OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Biro Organisasi dan Kepegawaian							
1	Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	232,750,000	230,181,000	98.90
2	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Pada Unit Kerja Pelayanan Publik Kementerian	Dokumen	1	1	147,000,000	146,360,000	99.56
3	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan SPI	Dokumen	1	1	67,548,000	58,244,000	86.23
4	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian	Dokumen	1	1	900,522,000	885,097,000	98.29
5	Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian dan SOP	Dokumen	1	1	409,700,000	404,999,200	98.85
6	Evaluasi NSPK dan Tata Hubungan Kerja	Dokumen	1	1	66,645,000	65,908,400	98.89
7	Diseminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building	Dokumen	1	1	134,070,000	128,514,500	95.86
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian	Dokumen	1	1	570,140,000	562,895,111	98.73
9	Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	467,760,000	459,959,495	98.33
10	Penyusunan Sistem Prosedur dan Pembakuan Sarana Kerja	Dokumen	1	1	807,195,000	793,566,200	98.31
11	Forum Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	11,505,000	8,741,200	75.98
12	Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Pertanian	Dokumen	1	1	30,640,000	20,429,200	66.67
13	Penguatan dan Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	383,333,000	379,392,400	98.97
14	Penguatan dan Penataan Organisasi Pusat Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	124,445,000	121,036,002	97.26
15	Forum Komunikasi di Bidang Kepegawaian	Laporan	1	1	273,694,000	272,644,000	99.62
16	Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian Kementerian	Dokumen	1	1	369,251,000	362,827,060	98.26
17	Pengelolaan SAPK Lingkup Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	107,730,000	105,740,000	98.15
18	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setjen Kementerian	Dokumen	1	1	350,185,000	341,096,000	97.40
19	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional	Dokumen	1	1	435,054,000	427,312,900	98.22
20	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat Pensiun dan Mutasi Lainnya	Dokumen	1	1	685,120,000	683,003,790	99.69
21	Peningkatan Kapasitas ASN Dalam Pengembangan Usaha dan Kesejahteraan	Dokumen	1	1	66,900,000	66,726,200	99.74
22	Penyelenggaraan Forum Bidang Kesejahteraan Pegawai	Dokumen	1	1	132,040,000	131,170,150	99.34
23	Kerumahtanggaan dan Ketatausahaan	Dokumen	1	1	366,282,000	358,726,000	97.94
24	Penyelenggaraan Pembekalan Calon Purna Bakti	Dokumen	1	1	58,550,000	58,165,000	99.34
25	Pembinaan Pemberdayaan Perempuan	Dokumen	1	1	65,060,000	62,805,000	96.53
26	Pembinaan Jiwa Korsa Pegawai	Dokumen	1	1	144,100,000	139,112,315	96.54
27	Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kesenian Pegawai	Dokumen	1	1	203,853,000	203,306,000	99.73
28	Pembinaan Mental Spiritual dan Agama	Dokumen	1	1	151,900,000	147,513,000	97.11
29	Fasilitasi Peningkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas	Dokumen	1	1	457,000,000	450,904,600	98.67
31	Pengadaan Calon ASN Kementerian Pertanian	Dokumen	1	1	2,974,597,000	2,961,712,400	99.57
32	Perencanaan Kebutuhan ASN	Dokumen	1	1	158,147,000	151,852,059	96.02
33	Pengelolaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Dokumen	1	1	213,429,000	210,511,294	98.63
34	Evaluasi Penerapan Etika dan Disiplin ASN	Dokumen	1	1	166,159,000	142,600,897	85.82
35	Pemberian Tanda Jasa/ Kehormatan/ Penghargaan Kementerian	Dokumen	1	1	156,142,000	154,498,550	98.95
36	Pengembangan Karir ASN	Dokumen	1	1	3,307,040,000	3,297,295,356	99.71
37	Evaluasi Hasil Penilaian Prestasi Kerja ASN Kementerian	Dokumen	1	1	318,374,000	316,316,400	99.35

NO.	RENCANA AKSI	SATUAN	TARGET	REALISASI OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
38	Pengembangan Kompetensi Tim Penilai JF Bidang Pertanian	F	1	1	203,570,000	195,250,000	95.91
39	Pengelolaan Data ASN Kementerian Pertanian	laporan	1	1	422,804,000	409,745,162	96.91
40	Penilaian Kompetensi ASN Lingkup Kementan	laporan	1	1	432,072,000	430,918,500	99.73
41	Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator dan Penawas	laporan	1	1	940,615,000	938,211,779	99.74
42	Penyusunan Pedoman/ Juuklak/ Juuknis Jabatan Fungsional	Dokumen	1	1	561,250,000	546,244,605	97.33
Biro Keuangan dan Perlengkapan							
1	Koordinasi, Pelaksanaan Kegiatan, Pembinaan SDM pengelola Keuangan, Pemantauan pelaksanaan anggaran	Dokumen	1	1	5,585,058,000	5,572,900,861	99.78
2	Verifikasi dokumen Sumber, Sosialisasi, Pembinaan SDM Penyusun laporan Keuangan, Pemantauan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen	1	1	14,020,950,000	13,695,363,285	97.68
3	Penatausahaan BMN, Revaluasi BMN, Pembinaan SDM dan Pelaporan BMN	Dokumen	1	1	1,982,660,000	1,898,116,392	95.74
4	Pembinaan Pengelolaan BMN, Pemanfaatan BMN, Penetapan Status Penggunaan BMN, Penhabusan BMN	Dokumen	1	1	1,902,790,000	1,716,939,550	90.23
5	Pembinaan pengamanan BMN, Wsadal BMN, penanganan aset bermasalah	Dokumen	1	1	1,732,090,000	1,492,911,657	86.19
6	Penyusunan laporan BMN Kementerian Pertanian, Sekretariat Jenderal dan Biro Keuangan dan Perlengkapan	Dokumen	1	1	2,561,858,000	2,463,123,302	96.15
Biro Umum dan Pengadaan							
1	Pengelolaan Arsip dan Pustaka	dokumen	1	1	41,392,363,000	40,577,233,830	98.03
2	Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	dokumen	1	1	46,476,479,000	43,064,370,523	92.66
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian							
1	Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Paket	1	1	98,211,000	97,394,500	99.17
2	Ketatausahaan Keuangan dan Perlengkapan	kegiatan	6	6	946,987,000	926,556,345	97.84
3	Monitoring dan evaluasi penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	kegiatan	3	3	801,395,000	772,184,050	96.35
4	Pengembangan Kapasitas SDM SPI Kelembagaan dan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian	kegiatan	3	3	1,093,083,000	1,056,010,887	96.61
5	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	campuran			2,000,064,000	1,807,763,549	90.39
6	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	campuran			647,210,000	629,594,580	97.28
7	Pengadaan kendaraan bermotor	Unit	4	4	646,000,000	644,670,000	99.79

NO.	RENCANA AKSI	SATUAN	TARGET	REALISASI OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik							
1	Pengelolaan Peragaan dan Display Informasi Agribisnis	layanan	12	12	171,800,000	166,924,000	97.16
2	Pengelolaan Perpustakaan	layanan	12	12	119,720,000	113,738,993	95.00
3	Penyelenggaraan Pameran	kegiatan	12	12	3,641,973,000	3,559,336,233	97.73
4	Dukungan Penyebarluasan Informasi Publik Bidang Pertanian Melalui Media TV Streaming	layanan	12	12	2,347,230,000	2,208,834,409	94.10
5	Monitoring Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik	layanan	12	12	1,210,993,000	1,125,317,080	92.93
6	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Melalui Multimedia	layanan	12	12	356,240,000	303,939,550	85.32
7	Pelayanan Informasi Publik	layanan	12	12	734,120,000	684,029,420	93.18
8	Publikasi Media Elektronik	dokumen	12	12	6,316,255,000	6,291,425,000	99.61
9	Pemberitaan Media Elektronik	dokumen	12	12	7,214,840,000	7,191,665,617	99.68
10	Publikasi Media Cetak	dokumen	12	12	1,546,000,000	1,532,959,625	99.16
11	Pemberitaan Media Cetak	dokumen	12	12	6,988,648,000	6,887,875,073	98.56
12	Analisis Pendapat Umum	dokumen	12	12	3,686,640,000	3,610,832,119	97.94
Pustaka							
1	Pengembangan Tata Kelola TI	aplikasi	3	3	354,752,000	343,185,760	96.74
2	Pengembangan Diseminasi Inovasi Pertanian	aplikasi	6	6	2,283,926,000	2,177,586,226	95.34
3	Penerbitan dan Penyebaran Publikasi	judul	5	5	1,110,166,000	1,105,717,870	99.60
Pusat PVTTP							
1	Optimalisasi Pelayanan Perumahan Hak PVT	Layanan	45	51	649,300,000	620,425,278	95.55
2	Fasilitasi Pemeriksaan Substantif	Layanan	30	36	1,473,410,000	1,435,125,019	97.40
3	Pengelolaan Stasiun Uji BUSS Manoko	Layanan	1	1	1,151,425,000	1,086,784,098	94.39
4	Pengelolaan Stasiun Uji BUSS Mojosari	Layanan	1	1	625,790,000	564,987,715	90.28
5	Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi	Layanan	45	50	1,160,075,000	1,136,735,734	97.99
6	Fasilitasi Penamaan dan Dokumentasi Varietas Tanaman	Surat	700	709	59,950,000	52,139,200	86.97
7	Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Varietas Tanaman	Tanda Daftar	195	508	2,336,150,000	2,296,922,173	98.32
8	Fasilitasi Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan	Layanan	195	508	624,750,000	607,962,740	97.31
9	Pengelolaan Database Varietas Tanaman	Layanan	1	1	109,050,000	103,942,300	95.32
10	Fasilitasi Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan	Layanan	6500	7940	503,950,000	489,453,900	97.12
11	Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Bidang Peternakan	Layanan	1100	1418	280,800,000	274,515,650	97.76
12	Fasilitasi Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih/SDG Tanaman	Layanan	1200	2546	471,300,000	460,171,848	97.64
13	Fasilitasi Rekomendasi Produk Pertanian	Layanan	200	553	197,500,000	185,203,750	93.77
14	Fasilitasi Perizinan Pupuk	Layanan	600	1470	768,225,000	759,598,000	98.88
15	Fasilitasi Perizinan Pestisida	Layanan	4500	11509	663,650,000	569,166,012	85.76
16	Gedung dan Bangunan	Paket	1	1	7,732,225,000	6,466,389,800	83.63

NO.	RENCANA AKSI	SATUAN	TARGET	REALISASI OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Biro Kerja Sama Luar Negeri							
1	Orientasi Kebijakan Pertanian Bagi Diplomat RI	Dokumen	1	1	154,050,000	153,038,624	99.34
2	Pemetaan Potensi Daerah dalam mendorong Peningkatan Daya Saing Ekspor	Dokumen	1	1	198,100,000	197,306,800	99.60
3	Kajian Referensi tarif Nasional Sektor Pertanian dalam Kerangka Perjanjian Int	Dokumen	1	1	214,050,000	212,875,000	99.45
4	Pemetaan Potensi Ekspor Komoditas unggulan	Dokumen	1	1	187,400,000	186,545,800	99.54
5	Program APO Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas SDM Pertanian	Dokumen	1	1	444,860,000	444,349,800	99.89
6	Rencana Aksi Strategis Kawasan Regional Bidang Pangan dan Pertanian 2020-	Dokumen	1	1	87,650,000	87,275,000	99.57
7	Rencana Aksi Strategis Forum Intrakawasan	Dokumen	1	1	89,900,000	89,520,000	99.58
8	Peningkatan Diplomasi Pertanian Kerja Sama Selatan- Selatan	Dokumen	1	1	241,995,000	241,173,150	99.66
9	Pemetaan Potensi Kerjasama dengan ormas asing dim mendukung peningkatan p	Dokumen	1	1	135,850,000	134,138,700	98.74
10	Perundingan Perdagangan Bidang Pertanian	Dokumen	1	1	202,000,000	200,759,133	99.39
11	Rancang Bangun Pelatihan Teknis Perdagangan Internasional	Dokumen	1	1	197,600,000	196,450,400	99.42
12	Penilaian Potensi NIAHS/GIAHS FAO di Indonesia: Nusa Tenggara Timur	Dokumen	1	1	227,780,000	226,529,900	99.45
13	Kesekretariatan Nasional Focal Point FAO dan IFAD	Dokumen	1	1	160,500,000	158,610,000	98.82
14	Kerjasama dan pengelolaan PHLN dim mendukung Peningkatan Produksi Pangan	Dokumen	1	1	591,290,000	588,800,400	99.58
15	Advokasi Pemanfaatan PHLN Bidang Pertanian	Dokumen	1	1	352,412,000	351,877,000	99.85
16	Sinkronisasi Program dan evaluasi Kinerja Atase Pertanian	Dokumen	1	1	200,278,000	198,045,100	98.89
17	Pembinaan Atase Pertanian dan Pertemuan Internasional dng neg lembag/mitra d	Dokumen	1	1	366,400,000	365,613,366	99.79
18	Penyelenggaraan tamu Asing Negara Mitra dan Badan Internasional	Dokumen	1	1	535,790,000	531,933,110	99.28
19	Perencanaan Pelaporan dan Pemantauan Kinerja Biro KLN	Dokumen	1	1	1,223,300,000	1,220,353,400	99.76
20	Pembinaan Internal	Dokumen	1	1	739,183,000	737,253,700	99.74
Program Inspektorat Jenderal							
	Penguatan Pengawasan	Layanan	1	1	94,136,261,000	89,993,615,373	95.60
TOTAL					321,724,027,000	308,578,727,771	95.91

LAMPIRAN 7. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT PERBAIKAN KINERJA

No	Rekomendasi Perbaikan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran yang Dibutuhkan (Rp)
I. Pertumbuhan Volume Ekspor untuk produk pertanian nasional				
1	Pengembangan Kacang Tanah 30.000 ha	Jan - Des 2020	Ditjen TP	106.600.000.000
2	Pengembangan Ubi Jalar 2500 ha	Jan - Des 2020	Ditjen TP	8.400.000.000
3	Pengembangan mangga 1.385 Ha	Jan - Des 2020	Ditjen Hortikultura	12.640.000.000
4	Pengembangan manggis 1.500 Ha	Jan - Des 2020	Ditjen Hortikultura	16.875.000.000
5	Pengembangan pisang 1.500 Ha	Jan - Des 2020	Ditjen Hortikultura	35.625.000.000
6	Pengembangan florikultura 225 M2	Jan - Des 2020	Ditjen Hortikultura	35.000.000.000
4	Pengembangan Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Jan - Des 2020	Ditjen PKH	3.925.000.000
5	Pengembangan Pemasaran Peternakan	Jan - Des 2020	Ditjen PKH	1.147.480.000
II. Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional				
1	Pengembangan Kacang Hijau 25.000 ha	Jan - Des 2020	Ditjen TP	23.200.000.000
2	Pengembangan Ubi Kayu 20.000 ha	Jan - Des 2020	Ditjen TP	23.000.000.000
3	Pengembangan kawasan jeruk 500 Ha	Jan - Des 2020	Ditjen Hortikultura	4.000.000.000
4	Pengembangan kawasan bawang putih 5.453 Ha	Jan - Des 2020	Ditjen Hortikultura	220.150.000.000
5	Pengembangan ternak ruminansia perah (Ekor)	Jan - Des 2020	Ditjen PKH	7.344.890.000
III. Rata-rata Peningkatan Produksi Pangan Strategis				
Produksi Padi				
1	Pengembangan Padi 2.500.000 ha	Jan - Des 2020	Ditjen TP	1.817.700.000.000
2	Perbanyak, pengawasan, perbaikan sistem perbenihan	Jan - Des 2020	Ditjen TP	120.800.000.000
3	Kawasan Korporasi Petani Padi 116 kawasan	Jan - Des 2020	Ditjen TP	33.400.000.000
Produksi Jagung				
1	Pengembangan Jagung 2.400.000 ha	Jan - Des 2020	Ditjen TP	1.541.500.000.000
2	Kawasan Korporasi Petani Jagung 80 kawasan	Jan - Des 2020	Ditjen TP	23.000.000.000
Produksi Kedelai				
1	Pengembangan Kedelai 300.000 ha	Jan - Des 2020	Ditjen TP	350.600.000.000
2	Kawasan Korporasi Petani Kedelai 44 kawasan	Jan - Des 2020	Ditjen TP	10.600.000.000
Produksi daging sapi dan kerbau				
1	Pengendalian Pematangan Betina produktif	Jan - Des 2020	Ditjen PKH	6.357.935.000
2	Hijauan Pakan Ternak	Jan - Des 2020	Ditjen PKH	40.629.934.000
3	Penguatan Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Jan - Des 2020	Ditjen PKH	15.894.372.000
4	Optimalisasi Reproduksi	Jan - Des 2020	Ditjen PKH	306.172.940.000
IV. Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen)				
1	Penyediaan sarana pasca panen sebanyak 6456 unit	Jan - Des 2020	Ditjen TP	695.200.000.000
2	mengalokasikan sarana prasarana pra panen sebanyak 14.664 unit	Jan - Des 2020	Ditjen PSP	1.169.858.485.000
3	Penyediaan sarana prasarana peternakan	Jan - Des 2020	Ditjen PKH	7.078.525.000
V. Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis				
1	Pengadaan obat hewan dan bahan biologik	Jan - Des 2020	Ditjen PKH	20.619.923.000

LAMPIRAN 8. PERJANJIAN KINERJA (PK) MENTERI PERTANIAN TAHUN 2019



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syahrul Yasin Limpo

Jabatan : Menteri Pertanian

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 25 Oktober 2019

Pihak Pertama

Syahrul Yasin Limpo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEMENTERIAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode IKSS	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pendapatan keluarga petani	1-1	PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian (RP Juta)	Rp 27.00 Juta
2	Meningkatnya ketahanan pangan nasional	2-1	Indeks Ketahanan Pangan	68 Ranking
3	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	3-1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional	10.52 %
		3-2	Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional	6.61 %
		3-3	Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian	0.10 %
4	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional	4-1	Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional	7.90 %
5	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	5-1	Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia	10 Jumlah
		5-2	Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor	40.00 %
6	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis	6-1	Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional	10 - 30 %

7	Dimanfaatkannya inovasi teknologi	7-1	Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir)	70.00 %
8	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan	8-1	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33.00 %
		8-2	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen)	68.40 %
		8-3	Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	96.83 %
9	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.	9-1	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	11.05 %
		9-2	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	80.00 %
10	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	10-1	Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional	15.00 %
11	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	11-1	Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional	30.00 %
12	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	12-1	Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	87.78 Indeks

Matriks Kegiatan Pendukung Tahun 2019

3. Indikator Kinerja : Pertumbuhan Volume Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional

No.	Kegiatan	Fisik			Keuangan			
		Satuan	Target	Capaian/Realisasi	%	Pagu	Realisasi (Rp)	%
Program Ditjen Tanaman Pangan (Produksi Ubi Jalar dan Aneka Kacang dan Umbi Lainnya)								
	Kegiatan Budidaya Ubi Jalar	Ha	1.100	1.100	100	6.600.000,000	6.574.672,000	99,62
	Kegiatan Budidaya Kacang Tanah	Ha	6.500	5.014	77,14	16.380.000,000	12.376.020,000	75,56
	Kegiatan Perbaikan Benih Sumber Palawija	Ha	2.000	3.200	160	40.000,000	40.000,000	100,00
	Pertemuan dalam Upaya Peningkatan Ekspor TP	Pertemuan	5	5	100,00	549,575,000	481,969,086	
Program Ditjen Hortikultura (Produksi Mangga, Manggis, Pisang untuk komoditas Ekspor)								
	Kawasan Mangga	Ha	1.800	1.800	100,00	12.102.600,000	11.749,294,479	97,08
	Kawasan Manggis	Ha	1.560	1.560	100,00	12.593.500,000	11,846,719,213	94,07
	Kawasan Pisang	Ha	1.500	1,475	98,33	29,647,400,000	27,306,114,647	92,10
	Kawasan Buah lainnya (Nenas)	Ha	95	95	100,00	2,028,250,000	2,028,250,000	100,00
	Kawasan Hortikultura (Krisan)	m2	12,000	12,000	100,00	1,247,000,000	1,210,621,237	97,08
	Facilitas Pasca panen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	Unit	167	165	98,80	19,220,000,000	18,116,917,813	94,26
	Benih Buah lainnya	Batang	1,475,000	1,360,362	92,23	10,926,000,000	9,112,416,691	83,40
	Sarana Prasarana Benih Hortikultura	Unit	27	27	100,00	6,605,600,000	6,464,121,155	97,86
	Sertifikasi Benih Hortikultura	Unit	1,400	6,606	471,86	14,000,000,000	13,568,444,982	96,92
	Pengembangan Mutu dan Standarisasi	unit	162	150	92,59	5,917,100,000	5,019,787,796	84,84
	Pemasaran Produk Hortikultura	Unit	235	223	94,89	5,005,000,000	4,531,963,940	90,55
	Facilitas Teknis Dukungan Produksi Buah dan Florikultura	Bulan	12	12	100,00	9,002,791,000	8,794,668,640	97,02
	Facilitas Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Bulan	12	12	100,00	8,865,121,000	8,684,365,336	97,96
Program Ditjen Perkebunan (Produksi Karet, Kelapa, Kopi, Kakao)								
	Facilitas Pascapanen komoditas perkebunan	KT	106	106	100	21,273,772,000	20,375,460,111	95,96
	Facilitas pengolahan hasil perkebunan	Unit	142	142	100	47,368,622,000	46,185,616,285	97,50
	Pengembangan pemasaran hasil perkebunan	Keg	1	1	100	11,980,000	11,980,000	100,00
	Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan	KT	36	36	100	1,321,000,000	1,283,613,400	97,17
	Facilitas teknis dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	Bln	12	12	100	12,076,493,000	11,758,594,151	97,37
Program Ditjen PKH								
	Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Dokumen	68	68	100	18,740,274,000	17,506,632,176	93,42
	Sarana Pengolahan Pangan dan Non Pangan	Unit	17	17	100	3,400,000,000	3,216,828,411	94,61
PUSAT PERLINDUNG VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN (PPVTPP)								
	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran SDG Tanaman	Layanan Surat Izin	175	159	91			
	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan	Layanan Surat Izin	80	76	95	471,300,000	460,171,848	93,42
	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Tanaman Panga	Layanan Surat Izin	60	38	63			
	Permohonan Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih Hortikultura dan RIPH	Layanan Surat Izin	1,050	2,758	263			
	Permohonan Izin Usaha Dan Pemasukan Obat Hewan	Layanan Surat Izin	450	229	51	280,000,000	274,515,650,000	98,04
	Permohonan Pemasukan Karkas/Baging/Jeroan Dan Olahannya (KDJO)	Layanan Rekomendasi	855	1,206	141	503,950,000	489,453,900,000	97,12
TOTAL						266,137,328,000	249,409,212,947	93,71